

KOTA LANGSA



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA LANGSA

2018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya dapat disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2017 untuk disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah Otonom untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Langsa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai media informasi atas pelaksanaan tugas-tugas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan serta tugas-tugas lainnya. Media Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Langsa, disajikan dalam uraian Gambaran Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Langsa pada pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai dinamika, akan tetapi dengan segenap dukungan serta cita-cita Pemerintah Daerah Kota Langsa untuk terus

membangun Kota Langsa, sehingga tantangan dan hambatan yang terjadi dapat di atasi.

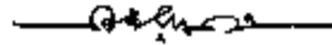
Demikian laporan ini disajikan dan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sekaligus bahan evaluasi dalam upaya mewujudkan tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa.

Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2017, harapan kami semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Langsa.

Akhirnya diharapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017 ini dapat bermanfaat sebagai upaya mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Langsa, 29 Maret 2018

Walikota Langsa,



USMAN ABDULLAH, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	3
1. Kondisi Geografis Daerah	3
2. Gambaran Umum Demografis	4
C. Kondisi Ekonomi	6
1. Potensi Unggulan Daerah	6
2. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB	8
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA LANGSA	13
A. Visi Dan Misi	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	15
C. Prioritas Daerah	19
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24
A. Urusan Konkuren	24
a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	37
1. Pendidikan	37
2. Kesehatan	42

3. Pekerjaan Umum dan	
Penataan Ruang	53
4. Perumahan Rakyat Dan	
Kawasan Permukiman	59
5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
Serta Perlindungan Masyarakat	64
6. Sosial	71
b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	77
1. Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	77
2. Pertanahan	82
3. Lingkungan Hidup	87
4. Administrasi Kependudukan dan Capil	91
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa	96
6. Pengendalian Penduduk Dan KB	101
7. Perhubungan	106
8. Komunikasi Dan Informatika	110
9. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	114
10. Penanaman Modal	118
11. Kepemudaan Dan Olah Raga	124
12. Kebudayaan	129
13. Perpustakaan	134
c. Urusan Pilihan	138
1. Kelautan Dan Perikanan	138
2. Pariwisata	143
3. Pertanian	148
4. Perdagangan	152
5. Perindustrian	156

d. Urusan Penunjang	160
1. Administrasi Pemerintahan	160
2. Pengawasan	176
3. Perencanaan	182
4. Keuangan	188
5. Kepegawaian	193
5. Pendidikan Dan Pelatihan	197
5. Penelitian Dan Pengembangan	202
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017	208
A. Prioritas Pembangunan Nasional	208
1. Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	208
2. Pembangunan Sektor Unggulan	209
3. Pemerataan Dan Kewilayahan	210
4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan Dan Keamanan	211
5. Pembangunan Ekonomi	212
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	213
A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	213
B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal	214
C. Pembinaan Batas Wilayah	217
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	217
E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	218
BAB VI PENUTUP	220

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Jumlah Pegawai	
2. Lampiran II.1 Tataran Pengambilan Kebijakan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2017	
3. Lampiran II.2 Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2017 :	
1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	229
2. Dinas Kesehatan	232
3. Rumah Sakit Umum Daerah	235
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	238
5. BPBD	241
6. BAPEDDA	244
7. Dinas Perhubungan	247
8. Dinas Komunikasi Dan Informatika	250
9. Dinas Lingkungan Hidup	253
10. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	256
11. DPP,PA,PP, Dan KB	259
12. Dinas Sosial	262
13. DISPERINDAGKOP dan UKM	265
14. DISPORAPAR	267
15. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	270
16. Kantor Satpol PP Dan WH	273
17. Sekretariat Daerah	276
18. Sekretariat DPRK	303
19. Dinas Syariat Islam	306
20. Sekretariat Baitul Mal	309
21. Sekretariat Baitul MPU	312
22. Sekretariat MPD	315

23. Sekretariat MAA	318
24. Kecamatan Langsa Timur	321
25. Kecamatan Langsa Baro	324
26. Kecamatan Langsa Barat	327
27. Kecamatan Langsa Lama	330
28. Kecamatan Langsa Kota	333
29. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	336
30. Inspektorat	339
31. BPKD	342
32. BPMG	345
33. DPMPTSP	348
34. BKPSDM	351
35. DPPKP	354

**4. Lampiran II.3 Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Wajib dan Pilihan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD
Tahun 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai media evaluasi hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Ruang lingkup pelaporan dimaksud secara garis besar mencakup pelaksanaan pemerintahan dalam kerangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, serta kinerja yang telah dicapai terkait penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan adanya Laporan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan Otonomi Daerah yang sedang berjalan di Kota Langsa, dan sekaligus dapat menjadi salah satu indikator dalam rangka penilaian kebutuhan perencanaan pembangunan diwilayah Kota Langsa.

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2017, berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
8. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Dinas Daerah dan Kecamatan Kota Langsa, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Dinas Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2017;

12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 34 Tahun 2007 tentang Koordinasi Pembidangan Tugas Para Asisten Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah Kota Langsa;
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017.
14. Peraturan Walikota Langsa Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Kota Langsa terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang sebelumnya berstatus kota administratif menjadi Pemerintah Kota. Kota Langsa terletak di sebelah Timur Provinsi Aceh, yang berposisi di sebelah Utara Pulau Sumatera, yaitu pada 04°24'35,68"-04°33'47,03" Lintang Utara dan 97°53'14,59"-98°04'42,16" Bujur Timur, dan memiliki luas wilayah 262,41 Km².

Wilayah Kota Langsa terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dan 66 (enam puluh enam) Gampong dengan cukupannya masing-masing sebagai berikut :

1. Kecamatan Langsa Barat meliputi 13 (tiga belas) Gampong dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 59,95 Km².
2. Kecamatan Langsa Barö meliputi 12 (dua belas) Gampong dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 77,5 Km².
3. Kecamatan Langsa Kota meliputi 10 (sepuluh) Gampong dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 7,53 Km².

4. Kecamatan Langsa Lama meliputi 15 (lima belas) Gampong dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 42,39 Km².
5. Kecamatan Langsa Timur meliputi 16 (enam belas) Gampong dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 75,04 Km².

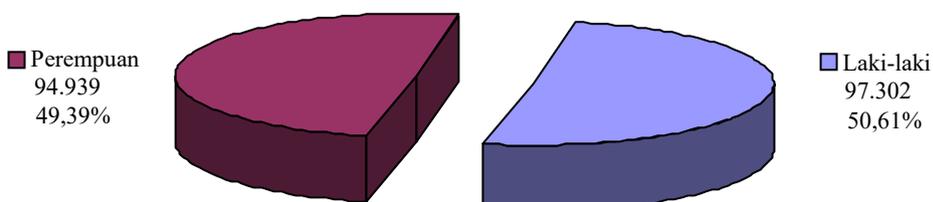
Lebih lanjut, jumlah bangunan rumah dalam wilayah Kota Langsa pada tahun 2017 sebanyak 45.908 unit, Luas wilayah yang ber HPL/HGB didalam wilayah Kota Langsa adalah seluas 3.735,9 Ha, sementara itu Luas Kawasan kumuh adalah sebesar 6.787 Ha.

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk di Kota Langsa hingga akhir tahun 2017 adalah sebesar 192.241 dengan sebaran penduduk terbesar di Kecamatan Langsa Barö yaitu sebanyak 54.913 jiwa, kemudian masing-masing diikuti oleh Kecamatan Langsa Kota sebanyak 46.934 jiwa, Kecamatan Langsa Barat sebanyak 40.757 jiwa, Kecamatan Langsa Lama sebanyak 33.523 jiwa dan Kecamatan Langsa Timur sebanyak 16.114 jiwa.

Komposisi Penduduk Kota Langsa berdasarkan jenis kelamin yaitu Penduduk Laki-laki sebanyak 97.302 jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 94.939 jiwa, sementara itu, Penduduk Kota Langsa pada Tahun 2017 didominasi oleh kelompok umur antara 30-34 tahun yaitu sebanyak 17.930 jiwa dengan komposisi berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 8.915 jiwa dan perempuan sebanyak 9.015 jiwa.

**KOMPOSISI PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKAN
JENIS KELAMIN TAHUN 2017**



Sumber : Dinas Dukcapil Kota Langsa

**KOMPOSISI PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKAN
PENDIDIKAN TAHUN 2017**

NO	PENDIDIKAN	KECAMATAN					Jumlah
		LANGSA TIMUR	LANGSA BARAT	LANGSA KOTA	LANGSA LAMA	LANGSA BARÖ	
1	Belum Sekolah	4.646	10.024	10.320	8.378	13.008	46.376
2	Belum Tamat SD/Sederajat	1.636	3.825	3.990	3.014	4.882	17.347
3	Tamat SD/Sederajat	3.562	8.382	5.640	5.790	7.371	30.745
4	Tamat SLTP/Sederajat	2.265	5.593	6.831	4.756	7.097	26.542
5	Tamat SLTA/Sederajat	3.272	9.338	15.213	9.582	16.897	54.302
6	D-I / II	88	290	443	236	448	1.505
7	Akademi/D-III Sarjana Muda	151	666	1.101	415	1.089	3.422
8	D-IV / Strata - I	469	2.450	3.157	1.266	3.813	11.155
9	Strata - II	21	181	227	79	302	810
10	Strata - III	4	8	12	7	6	37
	TOTAL	16.114	40.757	46.934	33.523	54.913	192.241

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Langsa

**PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2017**

UMUR	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
0-4	7.655	7.078	14.733
5-9	8.749	8.275	17.024
10-14	8.750	8.213	16.963
15-19	8.770	8.324	17.094
20-24	8.038	7.774	15.812
25-29	8.278	8.105	16.383
30-34	8.915	9.015	17.930
35-39	8.473	8.043	16.516

40-44	6.906	6.928	13.834
45-49	6.321	6.409	12.730
50-54	5.028	5.044	10.072
55-59	4.354	4.088	8.442
60-64	2.964	2.654	5.618
65-69	1.729	1.684	3.413
70-75	1.204	1.502	2.706
> 75 tahun	1.168	1.803	2.971
J U M L A H	97.302	94.939	192.241
T O T A L			

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Langsa

C. Kondisi Ekonomi Kota Langsa

1. Potensi Unggulan Daerah

Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas 17 kategori ekonomi. Struktur ekonomi sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh kategori ekonomi terhadap pembentukan PDRB di suatu wilayah pada waktu tertentu.

Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu (time series) maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran dalam struktur ekonomi di suatu wilayah diakibatkan adanya perkembangan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing kategori ekonomi wilayah tersebut.

Selama beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran struktur ekonomi di kota Langsa. Kontribusi kategori pertanian tidak lagi mendominasi terhadap perekonomian Kota Langsa. Hal ini menjadikan kategori konstruksi dan kategori industri pengolahan yang memberikan

kontribusi cukup besar terhadap perekonomian.

Kondisi daerah perkotaan seperti yang terjadi di Kota Langsa cenderung menitikberatkan perekonomian pada kategori non pertanian. Hal ini sesuai dengan wilayah yang berstatus kota, di mana perekonomian bertumpu pada kategori non pertanian.

Secara umum, struktur perekonomian Kota Langsa pada tahun 2016 didominasi oleh empat kategori utama yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 31%, sektor jasa-jasa memegang peranan sebesar 17 %, kategori konstruksi, dan kategori industri pengolahan masing-masing sebesar 10 %

Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2014-2016

Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	8,83	8,53	8,30
B	Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,46	0,44
C	Industri Pengolahan	10,15	10,01	9,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,11	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	9,27	9,50	9,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,63	30,10	30,98
H	Transportasi dan Pergudangan	9,01	8,66	8,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,13	2,28	2,48
J	Informasi dan Komunikasi	5,97	5,84	5,56

K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	3,10	2,98	2,94
L	Real Estate	4,22	4,26	4,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,87	0,85	0,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,40	7,54	7,61
P	Jasa Pendidikan	1,69	1,75	1,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,74	4,82	4,80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,29	2,27	2,20
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Langsa

Salah satu kategori dominan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Langsa yaitu industri pengolahan. Kategori ini terbagi menjadi beberapa sub kategori mulai dari industri batubara dan pengilangan migas, industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, hingga industri pengolahan lainnya. Diantara sekian banyak sub kategori dalam industri pengolahan, sub kategori industri makanan dan minuman serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional merupakan sub kategori yang paling dominan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

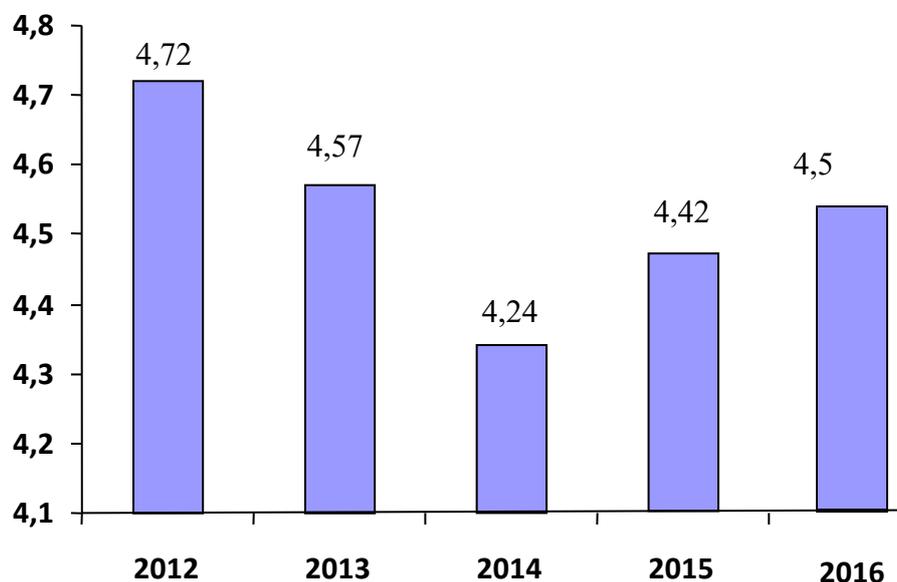
Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan ekonomi yang berhasil adalah yang berkelanjutan dan merata dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan tahun 2010. Penggunaan harga tahun dasar 2010

bertujuan untuk menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro.

Pada tahun 2012, terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Kota Langsa. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Langsa mencapai 4,72 persen, hal ini menandakan bahwa perekonomian di Kota Langsa mengalami kemajuan di berbagai kategori. Pada tahun 2013 dan 2014 perekonomian Kota Langsa cenderung melambat dibandingkan tahun 2012.

**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota Langsa, 2012 – 2016**



Sumber : BPS Kota Langsa

Sebagaimana daerah perkotaan pada umumnya, Kota Langsa memiliki karakteristik perekonomian yang terkonsentrasi pada sektor tersier, bukan pada sektor primer.

Apabila kita melihat dari sisi pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan maka dapat kita amati bahwa laju pertumbuhan kategori ini cenderung berfluktuatif selama periode 2014-2016. Kondisi terendah dalam hal laju pertumbuhan berada pada level 0,4 persen yang terjadi pada tahun 2014.

Laju pertumbuhan pada kategori pertambangan dan penggalian cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan turun drastis hingga level negatif mencapai -3,56 persen.

Laju pertumbuhan industri pengolahan terus menurun, Selama tahun 2014-2016 laju pertumbuhan kategori ini terus mengalami tren penurunan dari level 2,34 persen pada tahun 2014 hingga 1,31 persen pada tahun 2016.

Laju pertumbuhan kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan 6,19 persen dan melambat pada tahun 2015 pada level 4,43 persen kemudian pada tahun 2016 pertumbuhan ini tumbuh mencapai 7,17 persen.

Selama kurun waktu 2014-2016 laju pertumbuhan kategori konstruksi di Kota Langsa berkembang cukup signifikan. Pada tahun 2014 pertumbuhan konstruksi berada pada level 4,17 persen dan meningkat secara signifikan di tahun 2016 mencapai 8,02 persen.

Laju pertumbuhan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor selama kurun waktu 2014-2016 mengalami tren yang stabil pada kisaran 5 persen namun pada tahun 2016 pertumbuhannya sedikit melambat hingga pada level 4,38 persen.

Laju pertumbuhan kategori akomodasi dan makan minum mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2014-2016 dan pada tahun 2016 meningkat hingga pada level 11,12 persen.

Laju pertumbuhan kategori jasa keuangan dan asuransi cenderung berfluktuasi selama tahun 2014-2016 di mana terjadi perlambatan pada kurun waktu tersebut 2014-2015 yaitu di bawah 1 persen, namun mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga mencapai 5,49 persen di tahun 2016.

Laju pertumbuhan kategori real estate cenderung meningkat selama tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 kategori ini tumbuh sebesar 4,46 persen dan nilainya terus meningkat hingga mencapai 4,64 persen di tahun 2016.

Laju pertumbuhan kategori jasa pendidikan mengalami tren yang meningkat selama periode tiga tahun terakhir dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,32 persen dan terus meningkat tiap tahun hingga mencapai 7,73 persen di tahun 2016.

Laju pertumbuhan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami tren yang meningkat selama periode tiga tahun terakhir dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,80 persen pada tahun 2014 dan semakin tumbuh hingga mencapai 6,94 persen di tahun 2016.

Laju Pertumbuhan Ril PDRB Menurut Lapangan Usaha 2014-2016

Kategori	Uraian	2014	2015	2016
----------	--------	------	------	------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	0,40	1,93	2,03
B	Pertambangan dan Penggalian	2,27	-3,56	0,81
C	Industri Pengolahan	2,34	2,08	1,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,30	-2,33	-1,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,19	4,43	7,17
F	Konstruksi	4,17	5,56	8,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,44	5,26	4,38
H	Transportasi dan Pergudangan	4,60	3,98	2,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,39	10,73	11,12
J	Informasi dan Komunikasi	7,51	5,53	2,97
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	0,43	0,85	5,49
L	Real Estate	4,46	4,54	4,64
M,N	Jasa Perusahaan	2,83	3,48	6,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	3,48	6,24
P	Jasa Pendidikan	6,32	6,35	7,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,80	6,87	6,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,70	4,90	7,15
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,24	4,42	4,50

Sumber : BPS Kota Langsa

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA LANGSA

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan cita-cita atau kondisi ideal yang diinginkan di masa depan dengan memperhatikan kondisi kekinian, potensi sumber daya lokal (SDA, SDM, dan kemampuan keuangan), serta dinamika dan isu-isu strategis yang berkembang. Visi diartikan pula sebagai suatu kondisi idaman masa depan yang hendak dicapai. Idaman tersebut adalah suatu kondisi daerah yang lebih baik dari sebelumnya serta taraf hidup sosial-ekonomi masyarakatnya yang lebih baik pula.

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa visi dan misi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih, dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih melalui Pemilukada kota tahun 2012, ditetapkan menjadi dasar visi dan misi pembangunan kota periode 2012-2017. Atas dasar tersebut, dengan mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kota menetapkan visi pembangunan kota tahun 2012-2017 sebagai berikut:

"Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami"

Kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat visi di atas memiliki kandungan arti atau makna sebagai berikut:

Kota Berperadaban bermakna sebagai sebuah kota yang memiliki jati diri, harga diri, berbudaya, dan mandiri dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat Kota Langsa, berlandaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ekonomi lokal yang tangguh, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Sementara itu, *Kota yang islami* memiliki arti sebuah kota yang dihuni masyarakatnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antar ummat beragama.

Beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar visi yang ditetapkan dapat diwujudkan diantaranya adalah :

- 1) Terciptanya keberlanjutan perdamaian di Aceh secara keseluruhan termasuk di Kota Langsa, selama terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- 2) Kestabilan makro ekonomi serta kondusifnya kondisi sosial dan politik secara nasional;
- 3) Tersedianya anggaran pembangunan daerah yang memadai setiap tahun serta difokuskan pada program pembangunan prioritas; dan
- 4) Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Kota Langsa, termasuk jajaran eksekutif dan legislatif, maupun kalangan dunia usaha (swasta).

2. Misi

Misi adalah kondisi ideal yang harus diciptakan agar Visi yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terealisasi menjadi kenyataan dalam lima tahun ke depan. Misi juga berupa panggilan tugas sesuai fungsi masing-masing

untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi sampai waktu yang telah disepakati bersama.

Sejalan dengan Visi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilukada Kota Langsa tahun 2012, ditetapkan beberapa misi pembangunan dalam jangka menengah ke depan sebagai berikut :

- 1) Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah;
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel;
- 3) Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik dan nyaman);
- 4) Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah;
- 5) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
- 6) Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendorong percepatan pengembangan kota dan wilayah;
- 7) Mendorong peningkatan usaha masyarakat kecil menengah (UMKM) dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan;
- 8) Mewujudkan pemukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari;
- 9) Mewujudkan penguatan kapasitas pemerintahan gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- 10) Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta berkelanjutan perdamaian sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi disusun

dengan memadukan antara kekuatan (*strength*, S) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (*weakness*, W) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (*strength*, S) dengan ancaman (*threath*, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi pemerintah kota.

- Kekuatan - Peluang (S O)
 - a. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap kehidupan bermasyarakat;
 - b. Peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparat pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (*good governance*)
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur, meliputi jalan, jembatan, drainase, tanggul, listrik, transportasi, ICT,

internet dalam mendukung percepatan pengembangan kota dan wilayah;

- d. Penataan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan sesuai RTRW Kota Langsa.
- e. Peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan Kuala Langsa dalam rangka mendorong aktivitas perdagangan ekspor-impor;
- f. Penyediaan pusat data dan informasi secara terpadu, integratif, dan berbasis e-planning (e-klik);
- g. Pemerataan layanan kesehatan berkualitas sesuai dengan SPM Kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- h. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah sesuai dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan;
- i. Peningkatan peran aktif kelompok masyarakat/dunia usaha (swasta) untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;
- j. Penguatan kerjasama dan kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi UMKM, serta percepatan perdagangan ekspor-impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa;
- k. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha yang profesional dan berdaya saing;
- l. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan aman;
- m. Peningkatan iklim usaha yang kondusif, pemberian kemudahan prosedur investasi dan perizinan bagi investor lokal, luar daerah dan luar negeri guna mendorong peningkatan investasi dan aktivitas bisnis;
- n. Pelestarian budaya daerah dan kearifan lokal.

- Kekuatan - Ancaman (S-T)
 - a. Peningkatan sosialisasi dan penguatan pelaksanaan qanun-qanun Syariat Islam;
 - b. Penguatan kapasitas wilayahul hisbah dan lembaga sosial keagamaan dalam mengawasi dan menyahuti dinarnika dalam kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islarni;
 - c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana, peningkatan kualitas data, dan penerapan teknologi komunikasi dan guna menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas
 - d. Peningkatan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan dengan memperhatikan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi;
 - e. Perluasan layanan pendidikan non-formal yang bermutu dan berkualitas;
 - f. Peningkatan sosialisasi dan peran aktif kelompok masyarakat/dunia usaha (swasta) untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;
 - g. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan (RSU, Puskesmas, dan jaringannya);
 - h. Pemberantasan praktik KKN dan penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan dan perundangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mendorong penumbuhan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah;
 - i. Peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif guna mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah;
 - j. Pembangunan kawasan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana;

k. Penguatan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kerjasama yang intensif aparat penegak hukum dengan seluruh komponen masyarakat guna menangkal setiap ancaman keamanan dan ketertiban.

- Kelemahan - Peluang (W-O)

a. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa;

b. Pemanfaatan teknologi informasi guna menjaga validitas data indikator pembangunan;

c. Pemerataan pendidikan melalui perluasan akses pendidikan bagi masyarakat;

d. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis/ sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan;

e. Peningkatan kerjasama pembangunan dengan berbagai elemen masyarakat;

f. Pembangunan permukiman masyarakat berdasarkan rencana tata ruang wilayah;

g. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;

h. Penguatan peran Mukim dan aparaturnya Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

C. Prioritas Daerah

Kebijakan umum pada dasarnya merupakan wujud ataupun bentuk dari kebijakan Pemerintah Kota yang bersifat umum. Keberadaan bentuk kebijakan umum itu sendiri diperlukan untuk menyelaraskan antara konsep rencana pembangunan dengan potensi sumber daya yang dimiliki kota,

yang diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaan pembangunan kota yang efisien dan efektif, serta dapat berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat kota.

Kebijakan juga merupakan bentuk pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan pembangunan kota dalam jangka menengah ke depan tentunya tidak terlepas dari penilaian keterkaitan antara visi dan misi pembangunan kota dengan isu-isu strategis yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan yang disusun juga menjadi bagian dari strategi pencapaian tujuan dan sasaran maupun visi dan misi pembangunan kota, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing kota melalui pemerintahan yang bersih dan berwibawa, guna Mewujudkan Langsa Menjadi Kota yang Berperadaban dan Islami.

Kebijakan umum Pemerintah Kota dalam pembangunan jangka menengah ini hendaknya dapat menjadi acuan bagi segenap perangkat daerah dalam merumuskan program sektoral maupun program lintas sektoral, sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi keberadaannya. Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan kota serta mencermati gambaran umum potensi kota, maka Pemerintah Kota memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan umum dan program pembangunan. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Langsa tahun 2012– 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Syariat Islam

- a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran islam dalam setiap kehidupan.

- b. Melibatkan ulama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan yang berkenaan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
2. Tata Kelola Pemerintahan
- a. Mengoptimalkan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparatur pemerintahan daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
3. Pembangunan Infrastruktur Dan Penataan Ruang Kota
- a. Mengembangkan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan sesuai RTRW Kota Langsa.
 - b. Membangun jaringan air bersih yang integral dan terpadu dalam upaya meningkatkan pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat dan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (millenium Development Goals/MDGs).
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang efektif dan efisien yang menghubungkan antar gampong dan antar wilayah.
 - d. Meningkatkan kualitas infrastruktur pelabuhan kuala Langsa dalam rangka mendorong aktivitas perdagangan ekspor-impor.
4. Pendidikan
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan.
5. Pelayanan Publik Berkualitas
- a. Meningkatkan cakupan layanan kesehatan berkualitas yang merata sesuai SPM kesehatan.

- b. Melakukan percepatan revitalisasi dan relokasi BLUD RSUD Langsa sebagai salah satu rumah sakit regional wilayah timur Aceh.
 - c. Mempercepat proses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara cepat dan berkualitas.
6. Pertumbuhan Ekonomi Dan Penanggulangan Kemiskinan
- a. Mendorong dan membangun kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi UMKM.
 - b. Mendorong berkembangnya investasi swasta serta menyelesaikan infrastruktur pendukung ekonomi sesuai dengan potensi sumber daya ekonomi lokal.
 - c. Mempercepat pembangunan sentra-sentra industri potensial sesuai potensi sumber daya ekonomi lokal (pertanian, perikanan dan perkebunan) termasuk pembangunan pabrik minyak goreng.
 - d. Memberdayakan, membina, dan melakukan pendampingan nelayan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesinambungan pendapatan (income generating) masyarakat nelayan.
 - e. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk melakukan intensifikasi PAD sesuai qanun dan perundangan.
 - f. Mengembangkan pusat pasar dan perdagangan di kota langsa yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) guna mendorong aktivitas perdagangan dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Penataan Permukiman Masyarakat Dan Lingkungan Hidup
- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman masyarakat yang berkualitas.
 - b. Melaksanakan gerakan hidup bersih dan sehat dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

8. Sosial Kemasyarakatan

- a. Mengoptimalkan peran mukim dan aparat gampong (termasuk tuha peuet, tuha lapan) pemuda dan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan.
- b. Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya daerah termasuk pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma, adat-istiadat, dan budaya leluhur daerah guna menuju kemajuan, kemandirian dan ketahanan budaya daerah yang mendukung
- c. Pembangunan daerah dan syariat islam.

9. Keamanan Dan Perdamaian

- a. Membangun kepercayaan (trus building) seluruh komponen masyarakat dan stakeholders guna mendorong keberlanjutan perdamaian dan percepatan pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan mendorong tumbuhnya demokrasi serta menghargai HAM.

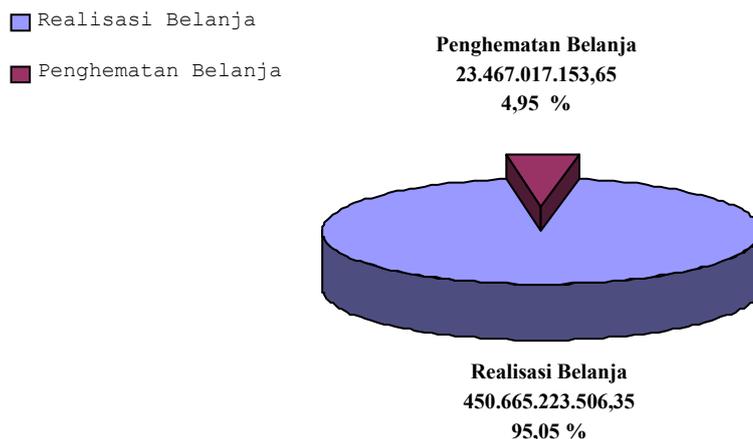
BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

A. URUSAN KONKUREN

1. Anggaran, Realisasi Dan Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pemerintah Kota Langsa dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar didukung oleh 11 (sebelas) Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 450.665.223.506,35 atau sebesar 95,05 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 474.132.240.660

POSISI BELANJA URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR
KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017



Sumber: DPKA Kota Langsa

Selanjutnya, komposisi belanja dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2017, dapat dijabarkan sebagai berikut :

**ANGGARAN, REALISASI DAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAH KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2017**

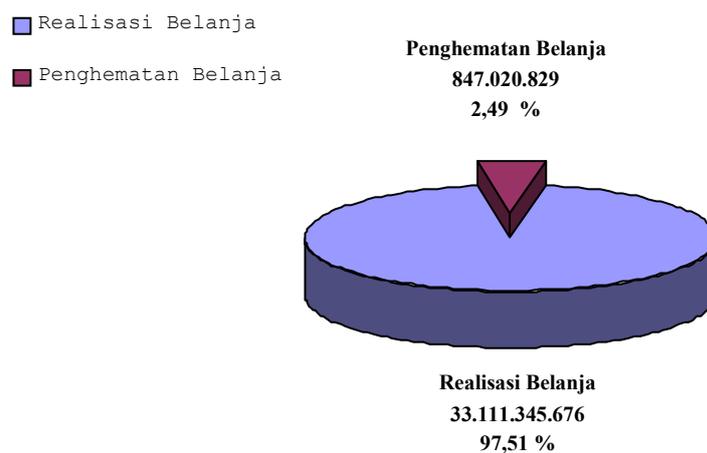
NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	JENIS BELANJA			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	%	SKPD PELAKSANA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	3.209.567.500,00	3.430.130.737,00	22.715.672.672,00	29.355.370.909,00	28.365.602.574,00	96,63	1. Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	<u>20.324.562.050,00</u>	<u>83.203.930.779,00</u>	<u>56.933.286.846,00</u>	<u>160.461.779.675,00</u>	<u>145.669.299.464,35</u>	<u>90,78</u>	1. Dinas Kesehatan
		11.527.941.050,00	10.040.738.839,00	14.938.521.980,00	36.507.201.869,00	32.567.646.944,35	89,21	2. RSUD Langsa
		2.468.841.000,00	1.570.000,00	31.484.166.806,00	33.954.577.806,00	32.882.415.654,00	96,84	3. BLUD
		6.327.780.000,00	73.161.621.940,00	10.510.598.060,00	90.000.000.000,00	80.219.236.866,00	89,13	
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.171.585.000,00	21.324.720.536,00	216.500.176.586,00	238.996.482.122,00	232.282.940.566,00	97,19	1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3.609.350.000,00	12.601.961.000,00	168.000.000,00	16.379.311.000,00	16.301.403.996,00	99,52	1. Badan Penggulangan Bencana Daerah
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<u>7.694.712.000,00</u>	<u>2.285.855.954,00</u>	<u>11.398.945.000,00</u>	<u>21.379.512.954,00</u>	<u>20.867.458.400,00</u>	<u>97,60</u>	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1.545.141.000,00	1.839.515.635,00	11.178.945.000,00	14.563.601.635,00	14.253.256.410,00	97,87	2. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
		6.149.571.000,00	446.340.319,00	220.000.000,00	6.815.911.319,00	6.614.201.990,00	97,04	3. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
		1.045.825.000,00	1.933.944.000,00	115.000.000,00	3.094.769.000,00	2.758.819.300,00	89,14	
6	Sosial	<u>1.305.990.000,00</u>	<u>3.159.025.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.465.015.000,00</u>	<u>4.419.699.206,00</u>	<u>98,99</u>	1. Dinas Sosial
		1.305.990.000,00	3.062.465.000,00	0,00	4.368.455.000,00	4.349.163.206,00	99,56	2. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
		0,00	96.560.000,00	0,00	96.560.000,00	70.536.000,00	73,05	
	JUMLAH	<u>38.361.591.550,00</u>	<u>127.939.568.006,00</u>	<u>307.831.081.104,00</u>	<u>474.132.240.660,00</u>	<u>450.665.223.506,35</u>	<u>95,05</u>	

Sumber : DPKA Kota Langsa

2. Anggaran, Realisasi Dan Pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Pemerintah Kota Langsa dalam rangka pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar didukung oleh 15 (lima belas) Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 33.111.345.676 atau sebesar 97,51 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 33.958.366.505

POSISI BELANJA URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017



Sumber: DPKA Kota Langsa

Selanjutnya, komposisi belanja dalam pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2017, dapat dijabarkan sebagai berikut :

**ANGGARAN, REALISASI DAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMERINTAH KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	JENIS BELANJA			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	%	SKPD PELAKSANA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	601.395.500,00	751.837.400,00	42.100.000,00	1.395.332.900,00	1.361.547.548,00	97,58	1. Dinas PP,PA,PP dan KB
2	Pertanahan	83.190.000,00	312.922.000,00	0,00	396.112.000,00	390.639.839,00	98,62	1. Bagian Tata Pemerintahan
3	Lingkungan Hidup	6.287.548.500,00	7.891.919.306,00	4.351.658.728,00	18.531.126.534,00	18.280.572.909,00	98,65	1. Dinas Lingkungan Hidup
4	Administrasi Kependudukan Dan Capil	305.900.000,00	865.551.800,00	238.381.000,00	1.409.832.800,00	1.399.144.387,00	99,24	1. Dinas Kependudukan Dan Capil
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	355.575.000,00	1.078.079.000,00	0,00	1.433.654.000,00	1.418.362.431,00	98,93	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.170.000,00	799.896.000,00	569.332.151,00	1.398.398.151,00	1.209.666.440,00	86,50	1. Dinas PP,PA,PP dan KB
7	Perhubungan	1.130.142.000,00	949.108.100,00	207.437.592,00	2.286.687.692,00	2.170.540.059,00	94,92	1. Dinas Perhubungan
8	Komunikasi dan Informatika	595.470.000,00	263.200.000,00	8.350.000,00	867.020.000,00	819.697.489,00	94,54	1. Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	129.730.340,00	129.730.340,00	129.730.340,00	100,00	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
10	Penanaman Modal	<u>325.087.500,00</u> 306.697.500,00 18.390.000,00	<u>394.735.188,00</u> 302.735.188,00 92.000.000,00	<u>93.000.000,00</u> 93.000.000,00 0,00	<u>812.822.688,00</u> 702.432.688,00 110.390.000,00	<u>793.303.148,00</u> 684.123.148,00 109.180.000,00	<u>97,60</u> 97,39 98,90	1. DPMPSTP 2. Bagian perekonomian, Energi dan Sumber Daya
11	Kepemudaan dan Olah raga	578.630.000,00	1.154.535.600,00	248.300.000,00	1.981.465.600,00	1.932.673.806,00	97,54	1. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

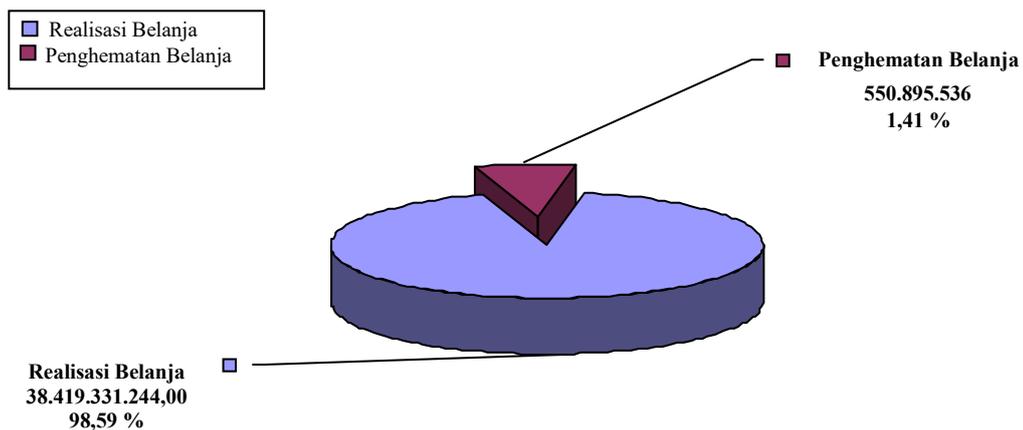
NO	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	JENIS BELANJA			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	%	SKPD PELAKSANA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
12	Kebudayaan	<u>1.052.196.000,00</u> 6.876.000,00	<u>1.569.540.000,00</u> 12.180.000,00	<u>100.000.000,00</u> 100.000.000,00	<u>2.721.736.000,00</u> 119.056.000,00	<u>2.621.277.900,00</u> 118.874.600,00	<u>96,31</u> 99,85	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
		1.045.320.000,00	1.557.360.000,00	0,00	2.602.680.000,00	2.502.403.300,00	96,15	
13	Perpustakaan	458.220.000,00	136.227.800,00	0,00	594.447.800,00	584.189.380,00	98,27	
	JUMLAH	11.802.524.500,00	16.167.552.194,00	5.988.289.811,00	33.958.366.505,00	33.111.345.676,00	97,51	

Sumber : DPKA Kota Langsa

3. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan

Dalam pelaksanaan urusan pilihan, pemerintah Kota Langsa didukung oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Sementara itu anggaran yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 38.419.331.244,00 atau sebesar 98,59 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 38.970.226.780,00.

POSISI BELANJA URUSAN PILIHAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017



Sumber : DPKA Kota Langsa

Selanjutnya, komposisi belanja dalam pelaksanaan Urusan Pilihan Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**ANGGARAN, REALISASI DAN PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAH KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2017**

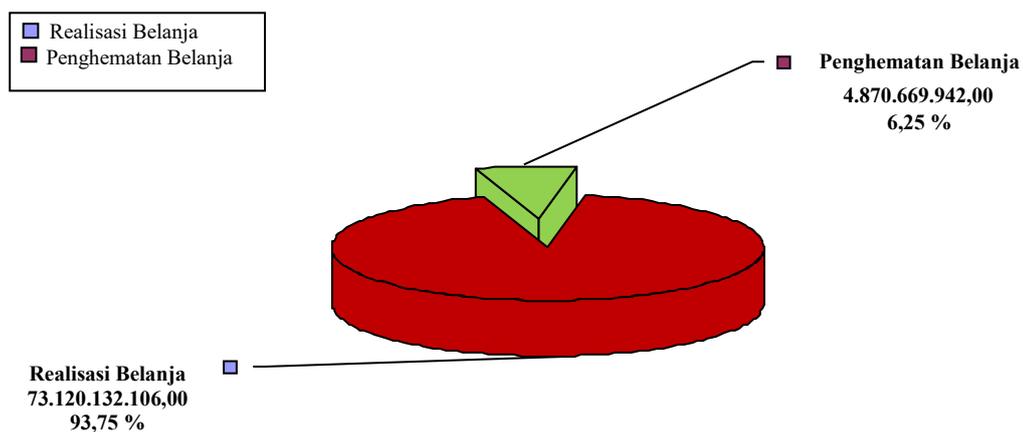
NO	URUSAN PILIHAN	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	%	SKPD PELAKSANA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kelautan dan Perikanan	0,00	6.389.260.000,00	64.432.795,00	6.453.692.795,00	6.433.965.295,00	99,69	1. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2.	Pariwisata	163.400.000,00	1.445.824.500,00	14.529.632.000,00	16.138.856.500,00	15.794.967.460,00	97,87	1. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3.	Pertanian	830.447.500,00	5.411.816.600,00	2.463.736.860,00	8.706.000.960,00	8.597.853.337,00	98,76	1. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
4.	Perdagangan	76.890.000,00	314.861.775,00	4.272.433.317,00	4.664.185.092,00	4.659.180.092,00	99,89	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5.	Perindustrian	308.555.000,00	2.547.144.000,00	151.792.433,00	3.007.491.433,00	2.933.365.060,00	97,54	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	JUMLAH	1.379.292.500,00	16.108.906.875,00	21.482.027.405,00	38.970.226.780,00	38.419.331.244,00	98,59	

Sumber : DPKA Kota Langsa

4. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Penunjang

Dalam pelaksanaan urusan penunjang pemerintah Kota Langsa didukung oleh 16 (enam belas) Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Sementara itu anggaran yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 73.120.132.106,00 atau sebesar 93,75 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 77.990.802.048,00.

POSISI BELANJA URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017



Sumber : DPKA Kota Langsa

Selanjutnya, komposisi belanja dalam pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**ANGGARAN, REALISASI DAN PELAKSANAAN URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN PENUNJANG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	%	SKPD PELAKSANA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Administrasi Pemerintahan	<u>12.957.025.250,00</u>	<u>31.397.837.690,00</u>	<u>5.726.694.000,00</u>	<u>50.081.556.940,00</u>	<u>46.560.012.738,00</u>	<u>92,97</u>	
		3.987.865.000,00	11.995.758.500,00	3.995.679.000,00	19.979.302.500,00	18.801.347.943,00	94,10	1. Bagian Umum
		745.755.000,00	474.910.000,00	110.000.000,00	1.330.665.000,00	1.303.470.337,00	97,96	2. Bagian Hukum
		183.960.000,00	218.640.000,00	0,00	402.600.000,00	398.100.811,00	98,88	3. Bagian Tata Pemerintahan
		33.660.000,00	78.994.000,00	0,00	112.654.000,00	112.088.750,00	99,50	4. Bagian Adm Pembangunan
		305.670.000,00	1.799.353.300,00	114.950.000,00	2.219.973.300,00	2.208.227.286,00	99,47	5. Bagian Humas dan Protokol
		145.000.000,00	530.560.000,00	0,00	675.560.000,00	541.318.129,00	80,13	6. Bagian Isra dan Kesra
		414.162.500,00	439.770.000,00	117.000.000,00	970.932.500,00	929.330.857,00	95,72	7. Bagian PBJ
		287.884.500,00	411.351.000,00	0,00	699.235.500,00	694.215.750,00	99,28	8. Bagian Organisasi
		2.127.943.500,00	8.696.209.200,00	737.400.000,00	11.561.552.700,00	11.300.533.380,00	97,74	9. Sekretariat DPR
		1.419.520.000,00	2.736.923.050,00	313.500.000,00	4.469.943.050,00	2.740.628.113,00	61,31	10. Dinas SI dan Pendidikan Dayah
		554.700.000,00	209.610.000,00	0,00	764.310.000,00	741.427.852,00	97,01	11. Kecamatan Langsa Kota
		407.130.000,00	254.985.343,00	0,00	662.115.343,00	654.033.111,00	98,78	12. Kecamatan Langsa Barat
		458.561.250,00	253.100.000,00	31.000.000,00	742.661.250,00	733.339.516,00	98,74	13. Kecamatan Langsa Timur
		380.958.000,00	207.600.000,00	44.000.000,00	632.558.000,00	625.825.436,00	98,94	14. Kecamatan Langsa Lama
		387.102.000,00	201.124.000,00	15.665.000,00	603.891.000,00	564.497.011,00	93,48	15. Kecamatan Langsa Baro
		475.501.000,00	2.402.456.865,00	0,00	2.877.957.865,00	2.874.086.350,00	99,87	16. Baitul Mal
		118.020.000,00	191.277.000,00	186.000.000,00	495.297.000,00	484.654.728,00	97,85	17. MPU
		281.712.500,00	130.516.432,00	0,00	412.228.932,00	408.088.803,00	99,00	18. MPD
		241.920.000,00	164.699.000,00	61.500.000,00	468.119.000,00	444.798.575,00	95,02	19. MAA
2.	Pengawasan	<u>888.000.000,00</u>	<u>2.647.976.500,00</u>	<u>28.400.000,00</u>	<u>3.564.376.500,00</u>	<u>3.470.759.987,00</u>	<u>97,37</u>	
		772.080.000,00	1.116.650.000,00	28.400.000,00	1.917.130.000,00	1.882.951.387,00	98,22	1. Inspektorat
		40.800.000,00	40.326.500,00	0,00	81.126.500,00	79.507.000,00	98,00	2. Bagian Adm Pembangunan
		75.120.000,00	1.491.000.000,00	0,00	1.566.120.000,00	1.508.301.600,00	96,31	3. Bagian perekonomian, Energi dan Sumber Daya

NO	URUSAN PENUNJANG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	%	SKPD PELAKSANA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
3.	Perencanaan	<u>2.691.663.000,00</u>	<u>1.990.387.000,00</u>	<u>186.000.000,00</u>	<u>4.868.050.000,00</u>	<u>4.702.552.864,00</u>	<u>96,60</u>	1. BAPEDDA 2. Bagian Tata Pemerintahan
		2.543.523.000,00	1.885.787.000,00	43.000.000,00	4.472.310.000,00	4.316.941.364,00	96,53	
		148.140.000,00	104.600.000,00	143.000.000,00	395.740.000,00	385.611.500,00	97,44	
4.	Keuangan	5.683.779.000,00	5.949.453.811,00	5.088.345.165,00	16.721.577.976,00	15.694.594.050,00	93,86	1. BPKD
5.	Kepegawaian	588.659.500,00	1.312.495.620,00	93.453.512,00	1.994.608.632,00	1.939.130.867,00	97,22	1. BKPSDM
6.	Pendidikan dan Pelatihan	30.070.000,00	497.382.000,00	0,00	527.452.000,00	522.283.300,00	99,02	1. BKPSDM
7.	Penelitian dan Pengembangan	52.400.000,00	180.780.000,00	0,00	233.180.000,00	230.798.300,00	98,98	1. BAPEDDA
	JUMLAH	22.891.596.750,00	43.976.312.621,00	11.122.892.677,00	77.990.802.048,00	73.120.132.106,00	93,75	

Sumber : DPKA Kota Langsa

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Susunan Perangkat Daerah dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan :

- ❖ Penunjang urusan pemerintahan :
 - 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Sekretariat DPRK
 - 3) Inspektorat
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 5) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- ❖ Satuan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum
 - 4) Dinas Sosial

- ❖ Satuan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :
 - 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 2) Dinas Perhubungan
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
 - 6) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 8) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
 - 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 10) Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

- ❖ Satuan Perangkat Daerah yang menangani urusan pilihan :
 - 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

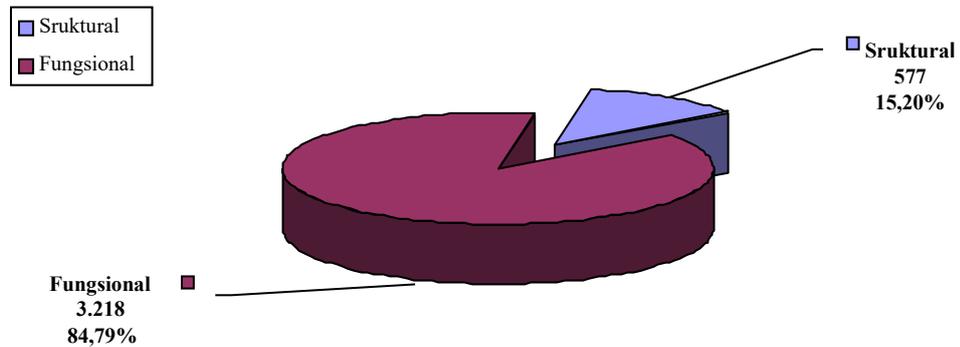
- ❖ Satuan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan :
 - 1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
 - 2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
 - 3) Dinas Pertanahan
 - 4) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
 - 5) Sekretariat Majelis Adat Aceh
 - 6) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
 - 7) Sekretariat Baitul Mal

- ❖ Satuan Perangkat Daerah Lainnya :
 - 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah
 - 3) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

- ❖ Penjabaran Kecamatan meliputi sebagai berikut :
 - 1) Kecamatan Langsa Kota
 - 2) Kecamatan Langsa Barat
 - 3) Kecamatan Langsa Timur
 - 4) Kecamatan Langsa Lama
 - 5) Kecamatan Langsa Baru

Lebih lanjut, jumlah personil PNS yang tersebar diseluruh SKPD Pemerintah Kota Langsa Sebanyak 3795 Orang dengan klasifikasi tenaga Struktural sebanyak 577 Orang dan tenaga Fungsional sebanyak 3.218 Orang.

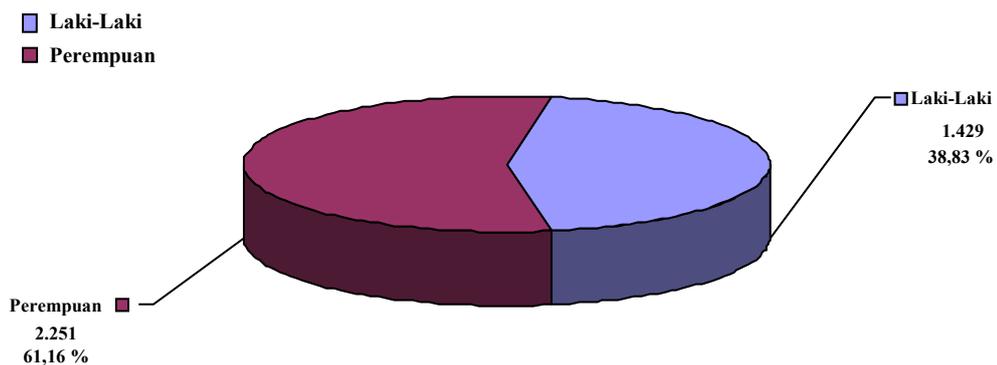
**KOMPOSISI JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA LANGSA
BERDASARKAN TENAGA FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL
TAHUN ANGGARAN 2017**



Sumber : BKPP Kota Langsa

Sementara itu, jumlah personil PNS Pemerintah Kota Langsa berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki sebanyak 1.429 Orang dan perempuan sebanyak 2.251 Orang.

**KOMPOSISI JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA LANGSA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN ANGGARAN 2017**



Sumber : BKPP Kota Langsa

Penjabaran jumlah PNS pemerintah Kota Langsa secara lebih rinci dapat dilihat pada lembar Lampiran pelaporan ini.

a. Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib pelayanan dasar Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib pelayanan dasar Pendidikan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 6 (enam) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
 - ❖ Pelaksanaan program sebanyak 6 program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 29 kegiatan

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan pendidikan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Pendidikan Usia Dini	43,42 %
b.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf	98,00 %
c.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,74 %

d.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	98,17 %
e.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00 %
f.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,05 %
g.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %
h.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,76 %
i.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	109,57 %
o.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,50 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib pelayanan dasar Pendidikan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 164.217.370.800,96 dan terealisasi sebesar Rp. 162.098.209.045,00 atau sebesar 98,71 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar pendidikan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 15,81 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar pendidikan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN PENDIDIKAN				
	A.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	A.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	134.861.999.891,96	133.732.606.471,00	(1.129.393.421)	99,16
	A.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.624.141.600,00	2.550.165.693,00	(73.975.907)	97,18
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.861.000,00	3.861.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	226.949.733,00	162.094.319,00	(64.855.414)	71,42
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	41.408.350,00	41.405.750,00	(2.600)	99,99
	4. Penyediaan alat tulis kantor	84.038.267,00	84.031.650,00	(6.617)	99,99
	5. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	49.999.024,00	(976)	100,00
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	30.524.250,00	30.523.000,00	(1.250)	100,00
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan makanan dan minuman	22.500.000,00	22.344.500,00	(155.500)	99,31
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	230.000.000,00	229.746.450,00	(253.550)	99,89
	10. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	1.928.860.000,00	1.920.160.000,00	(8.700.000)	99,55
				-	
	A.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200.699.460,00	178.578.419,00	(22.121.041)	88,98
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	22.500.000,00	22.493.680,00	(6.320)	99,97
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	142.200.000,00	120.095.279,00	(22.104.721)	84,46
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35.999.460,00	35.989.460,00	(10.000)	99,97
	A.1.4. Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.382.362.000,00	2.376.516.000,00	(5.846.000)	99,75
	1. Penambahan ruang kelas sekolah	1.086.000.000,00	1.082.890.000,00	(3.110.000)	99,71
	2. Pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	678.600.000,00	676.826.000,00	(1.774.000)	99,74
	3. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	617.762.000,00	616.800.000,00	(962.000)	99,84

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	A.1.5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	23.254.552.537,00	22.456.413.082,00	(798.139.455)	96,57
	1. Pembangunan Gedung sekolah	2.390.097.272,00	2.385.238.000,00	(4.859.272)	99,80
	2. Penambahan Ruang kelas sekolah	2.712.780.000,00	2.704.856.000,00	(7.924.000)	99,71
	3. Pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	2.975.075.600,00	2.967.863.000,00	(7.212.600)	99,76
	4. Pembangunan perpustakaan sekolah	855.120.000,00	594.630.000,00	(260.490.000)	69,54
	5. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.363.000.000,00	1.333.184.292,00	(29.815.708)	97,81
	6. Pengadaan Mebeluer sekolah	2.659.860.000,00	2.644.767.100,00	(15.092.900)	99,43
	7. Rehabilitasi sedang/berat ruang Bangunan sekolah	3.500.112.000,00	3.475.911.000,00	(24.201.000)	99,31
	8. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	4.793.807.665,00	4.457.524.610,00	(336.283.055)	92,99
	9. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	500.000.000,00	470.109.500,00	(29.890.500)	94,02
	10. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	1.150.000.000,00	1.082.573.960,00	(67.426.040)	94,14
	11. Monitoring, evaluasidan pelaporan	354.700.000,00	339.755.620,00	(14.944.380)	95,79
	A.1.6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	893.615.312,00	803.929.380,00	(89.685.932)	89,96
	1. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	566.053.500,00	511.620.080,00	(54.433.420)	90,38
	2. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru	327.561.812,00	292.309.300,00	(35.252.512)	89,24
	JUMLAH	164.217.370.800,96	162.098.209.045,00	(2.119.161.755,96)	98,71

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib pelayanan dasar Pendidikan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan Konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan urusan Pendidikan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan ketersediaan laboratorium bidang studi pada setiap sekolah yang belum mencukupi.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan urusan Pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan ada koordinasi terhadap SKPD terkait.
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
 4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan baik pada tingkat SD, SMP maupun Sederajat
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah secara bertahap meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang pendidikan.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

2. Urusan Kesehatan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib Pelayanan dasar kesehatan sebanyak 2 SKPD, yaitu :

1. Dinas Kesehatan
2. Rumah Sakit Umum Daerah

SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Urusan wajib pelayanan dasar Kesehatan adalah Dinas Kesehatan serta

Rumah Sakit Umum Daerah bertindak sebagai mitra kerja dengan pelaksanaannya mencakup pelayanan teknis kesehatan kepada masyarakat.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam Urusan Wajib pelayanan dasar Kesehatan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan
 - ❖ Pelaksanaan program sebanyak 12 program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 29 kegiatan

2. Rumah Sakit Umum Daerah
 - ❖ Pelaksanaan program sebanyak 3 program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 2 kegiatan

3. Rumah sakit Umum Daerah (BLUD)
 - ❖ Pelaksanaan program sebanyak 2 program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 1 kegiatan

Untuk selanjutnya, penjabaran program dan kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pada Tahun 2017 jumlah RSUD yang berada dalam wilayah kota Langsa sebanyak 1 unit dengan Klasifikasi dan jumlah ruang rawat inap pada RSUD kota langsa dapat dilihat sebagai berikut :

**KLASIFIKASI DAN JUMLAH RUANG RAWAT INAP
RSUD KOTA LANGSA TAHUN 2017**

NO.	KLASIFIKASI RUANG RAWAT INAP	JUMLAH (KAMAR)	JUMLAH TEMPAT TIDUR
1	2	3	4
1.	Ruang Kelas Utama B (Ie Mawe)	14	14
2.	Kelas I A (Seulanga)	12	22
3.	Kelas I B (Jambe)	6	12
4.	RPD B	8	26
5.	RPD A	9	42
6.	ICCU	2	6
7.	ICU	2	10
8.	PICU	3	10
9.	RPA	8	22
10.	Ruang Kebidanan	9	29
11.	Rooming In		15
12.	NICU	3	18
13.	RTA (Jarom)	6	24
14.	RTB (Sitahun)	7	24
15.	RPTM Lantai I	4	18
	RPTM Lantai II	5	
16.	Kelas Utama A Lantai I	18	30
	Kelas Utama A Lantai II	6	
	Kelas Utama A Lantai III	6	
	JUMLAH	132	332

Sumber : RSUD Kota Langsa

Sementara itu, dokter yang tersedia pada RSUD Kota langsa adalah sebanyak 65 Orang.

DOKTER YANG TERSEDIA PADA RSUD KOTA LANGSA TAHUN 2017

NO	KLASIFIKASI JENIS DOKTER	JUMLAH (Orang)	KET
1	2	3	4
1.	Dokter Umum	23	12 PNS 11 tenaga kontrak
2.	Dokter Spesialis Anak	3	3 PNS
3.	Dokter Spesialis Jiwa	1	Part Time 1
4.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	3 PNS
5.	Dokter Spesialis Obgyn	4	3 PNS 1 Kontrak
6.	Dokter Spesialis THT	1	1 Kontrak
7.	Dokter Spesialis Bedah	3	3 PNS
8.	Dokter Spesialis Paru	2	1 PNS 1 Kontrak
9.	Dokter Spesialis Mata	3	2 PNS 1 Kontrak
10.	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	1	1 PNS
11.	Dokter Gigi	6	5 PNS 1 kontrak
12.	Dokter Spesialis Jantung	1	1 PNS
13.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1 Part Time
14.	Dokter Spesialis Neurologi	3	2 PNS 1 Kontrak
15.	Dokter Spesialis Anastesi	2	2 Part Time
16.	Dokter Spesialis Radiologi	1	1 PNS
17.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1 Part Time
18.	Dokter Spesialis Urologi	-	-
19.	Dokter Spesialis Orthopedi	1	1 PNS
20.	Dokter Spesialis Forensik	1	1 PNS
21.	Dokter Spesialis Bedah Saraf	1	1 Kontrak
22.	Dokter Spesialis Rehap Medik	1	1 PNS
23.	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	1 PNS
24.	Dokter Spesialis Konsultan Jantung	1	1 Part Time
	JUMLAH	65	

Sumber : RSUD Kota Langsa

Pencatatan jenis penyakit yang ditangani pada tahun 2017 setidaknya sebanyak 28 jenis penyakit, berikut penjabarannya.

**KLASIFIKASI JENIS PENYAKIT RAWAT JALAN YANG DITANGANI
PADA TAHUN 2017**

NO	KLASIFIKASI JENIS PENYAKIT	JUMLAH PASIEN	KET
1	2	3	4
1.	Penyakit Dalam	21752	
2.	Bedah	5091	
3.	Neonatal	0	
4.	Kesehatan Anak Lainnya	3128	
5.	Obstetri & Ginekologi (ibu hamil)	0	
6.	Obstetri & Ginekologi (lainnya)	3818	
7.	Keluarga Berencana	567	
8.	Bedah saraf	21	
9.	Saraf	13166	
10.	Jiwa	765	
11.	Napza	0	
12.	Psikologi	0	
13.	THT	2212	
14.	Mata	6934	
15.	Kulit dan Kelamin	2153	
16.	Gigi dan Mulut	1163	
17.	Geriatric	0	
18.	Kardiologi	10676	
19.	Radiologi	13727	
20.	Bedah Orthopedi	6540	
21.	Paru-paru	1596	
22.	Kusta	0	
23.	Umum	3431	
24.	Rawat Darurat	27670	
25.	Rehabilitasi Medik	6793	

26.	Akupuntur medik	0	
27.	Konsultasi Gizi	0	
28.	Day care	0	
29.	Lain-lain	0	
JUMLAH		131203	

Sumber : RSUD Kota Langsa

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib pelayanan dasar kesehatan dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJAKUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	100 %
b.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	93,97 %
c.	Cakupan desa/kelurahan Universitas Chil Immunization (UCI).	93,94 %
d.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.	100%
e.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.	18,69 %
f.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.	100%
g.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin.	43,38 %
h.	Cakupan kunjungan bayi	86,76 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada lampiran daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi

Alokasi Anggaran Belanja urusan Wajib pelayanan dasar Kesehatan pada tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 222.380.856.398,- dan terealisasi sebesar Rp. 207.239.082.483,35,- atau 93,19 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib pelayanan dasar Kesehatan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 20,45 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar kesehatan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
B.	URUSAN KESEHATAN				
B.1.	DINAS KESEHATAN	65.821.612.755,00	61.777.844.776,35	(40.941.199)	99,64
B.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	29.314.410.886,00	29.210.197.832,00	(104.213.054,00)	99,64
B.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.787.886.250,00	1.750.627.637,00	(37.258.613,00)	97,92
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	2.997.000,00		99,90
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	404.187.250,00	396.143.906,00	(8.043.344,00)	98,01
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.500.000,00	8.449.121,00	(50.879,00)	99,40
	4. Penyediaan alat tulis kantor	21.000.000,00	20.997.000,00		99,99
	5. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	33.750.000,00	33.535.300,00	(214.700,00)	99,36
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.300.000,00	6.297.100,00	(2.900,00)	99,95
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.200.000,00	6.000.000,00	(200.000,00)	96,77
	8. Penyediaan makanan dan minuman	14.850.000,00	14.850.000,00	-	100,00
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	57.000.000,00	56.929.210,00	(70.790,00)	99,88
	10. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	1.233.099.000,00	1.204.429.000,00	(28.670.000,00)	97,67
B.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.154.638.000,00	1.067.021.223,00	(87.616.777,00)	92,41
	1. Pembangunan gedung kantor	907.938.000,00	896.771.000,00	(11.167.000,00)	98,77
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	227.100.000,00	150.650.223,00	(76.449.777,00)	66,34
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.100.000,00	15.100.000,00	-	100,00
B.1.4.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	962.865.000,00	649.559.960,00	(313.305.040,00)	67,46
	1. Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan	962.865.000,00	649.559.960,00	(313.305.040,00)	67,46

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	B.1.5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.660.951.000,00	3.065.278.110,00	1.595.672.890,00	65,77
	1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	77.000.000,00	71.007.900,00	(5.992.100,00)	92,22
	2. perbaikan gizi masyarakat	35.007.000,00	29.431.000,00	(5.576.000,00)	84,07
	3. Pengadaan peralatan dan persediaan kesehatan termasuk obat generik esensial	1.200.000.000,00	1.178.930.865,00	(21.069.135,00)	98,24
	4. Peningkatan kesehatan masyarakat	3.348.944.000,00	1.785.908.345,00	(1.563.035.655,00)	53,33
	B.1.6. Program Pengawasan Obat dan Makanan	151.310.000,00	104.805.000,00	(46.505.000,00)	69,27
	1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	151.310.000,00	104.805.000,00	(46.505.000,00)	
	B.1.7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.262.600.000,00	1.254.838.000,00	(7.762.000,00)	99,39
	1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	1.262.600.000,00	1.254.838.000,00	(7.762.000,00)	
	B.1.8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	181.560.000,00	134.459.000,00	(47.101.000,00)	74,06
	1. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	20.500.000,00	19.300.000,00	(1.200.000,00)	
	2. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	16.850.000,00	7.350.000,00	(9.500.000,00)	
	3. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	144.210.000,00	107.809.000,00	(36.401.000,00)	74,76
	B.1.9. Program standarisasi pelayanan kesehatan	640.990.000,00	235.249.500,00	405.740.500,00	36,70
	1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	640.990.000,00	235.249.500,00	(405.740.500,00)	36,70
	B.1.10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	11.292.179.806,00	11.087.850.137,00	(204.329.669,00)	98,19
	1. Pembangunan puskesmas pembantu	950.000.000,00	926.334.000,00	(23.666.000,00)	97,51
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	10.342.179.806,00	10.161.516.137,00	(180.663.669,00)	98,25
	B.1.11. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	14.252.525.813,00	13.080.678.377,35	-1.171.847.435,65	91,78
	1. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	14.252.525.813,00	13.080.678.377,35	(1.171.847.435,65)	91,78
	B.1.12. Program Peningkatan keselamatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	159.696.000,00	137.280.000,00	(22.416.000,00)	85,96
	1. Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita	159.696.000,00	137.280.000,00	(22.416.000,00)	85,96

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	B.2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	66.559.243.643,00	65.242.000.841,00	363.406.502,00	98,02
	B.2.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	32.604.665.837,00	32.359.585.187,00	(245.080.650,00)	99,25
	B.2.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.427.441.000,00	2.195.603.500,00	(231.837.500,00)	90,45
	1. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	2.427.441.000,00	2.195.603.500,00	(231.837.500,00)	90,45
	B.2.3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah sakit Mata	31.527.136.806,00	30.686.812.154,00	840.324.652,00	97,33
	1. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	31.527.136.806,00	30.686.812.154,00	(840.324.652,00)	97,33
	B.3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)	90.000.000.000,00	80.219.236.866,00	(9.780.763.134,00)	89,13
	B.3.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	0,00	-	-	
	B.3.2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan Rujukan	90.000.000.000,00	80.219.236.866,00	(9.780.763.134,00)	89,13
	1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	90.000.000.000,00	80.219.236.866,00	(9.780.763.134,00)	89,13
	JUMLAH	222.380.856.398,00	207.239.082.483,35	(15.141.773.914,65)	93,19

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib pelayanan dasar Kesehatan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib pelayanan dasar Kesehatan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan ketersediaan ruang rawat inap pada RSUD yang belum mencukupi.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
 4. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih belum memadai.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah penambahan sarana dan prasarana medis maupun non medis secara bertahap.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota

Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 12 (dua belas) Program dan 30 (tiga puluh) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	47,00 %
b.	Rumah tangga bersanitasi	50,85 %
c.	Kawasan kumuh	25,86 %
d.	Ruang Terbuka Hijau	20,48 %

Sumber : Dinas PU Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan ruang pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 244.337.150.189,- dan terealisasi sebesar

Rp. 237.575.464.595,- Atau sebesar 97,23 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan Umum dan penataan ruang terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 23,45 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
C.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	C.1. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	C.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	5.340.668.067,00	5.292.524.029,00	(48.144.038)	99,10
	C.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.566.681.536,00	1.490.301.374,00	(76.380.162)	95,12
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	105.300.000,00	80.613.042,00	(24.686.958)	76,56
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000,00	11.749.000,00	(251.000)	97,91
	4. Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	49.646.000,00	(354.000)	99,29
	5. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	45.000.000,00	44.850.000,00	(150.000)	99,67
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.000.000,00	8.928.000,00	(72.000)	99,20
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000)	98,33
	8. Penyediaan makanan dan minuman	13.860.000,00	13.651.000,00	(209.000)	0,00
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	367.436.536,00	366.532.332,00	(904.204)	99,75
	10. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	954.585.000,00	904.932.000,00	(49.653.000)	94,80
	C.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.471.110.000,00	18.404.729.091,00	(66.380.909)	99,64
	1. Pembangunan Gedung Kantor	17.797.862.000,00	17.778.075.000,00	(19.787.000)	99,89
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	94.450.000,00	94.170.000,00	(280.000)	99,70
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.300.000,00	22.300.000,00	-	0,00
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	521.668.000,00	490.805.691,00	(30.862.309)	94,08
	5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	34.830.000,00	19.378.400,00	(15.451.600)	55,64
	C.1.4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	164.268.713.072,00	160.364.630.200,00	(3.904.082.872)	97,62
	1. Pembangunan Jalan	162.810.088.072,00	158.909.740.200,00	(3.900.347.872)	97,60
	2. Pembangunan Jembatan	1.458.625.000,00	1.454.890.000,00	(3.735.000)	99,74

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	C.1.5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	17.373.812.681,00	17.277.040.000,00	(96.772.681)	99,44
	1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	17.373.812.681,00	17.277.040.000,00	(96.772.681)	99,44
	C.1.6. Program Pembangunan turap/talud/bronjong	1.225.150.000,00	1.219.165.000,00	(5.985.000)	99,51
	1. Pembangunan turap/talud/bronjong	1.225.150.000,00	1.219.165.000,00	(5.985.000)	99,51
	C.1.7. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.194.756.000,00	4.194.256.000,00	(500.000)	99,99
	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	4.011.756.000,00	4.011.456.000,00	(300.000)	99,99
	2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	183.000.000,00	182.800.000,00	(200.000)	99,89
	C.1.8. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	45.000.000,00	44.619.000,00	(381.000)	99,15
	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45.000.000,00	44.619.000,00	(381.000)	99,15
	C.1.9. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi,rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	8.106.211.261,00	7.931.963.261,00	(174.248.000)	97,85
	1. Pembangunan Jaringan Air Bersih/air minum	684.474.261,00	684.244.261,00	(230.000)	99,97
	2. Pembangunan pintu air	700.000.000,00	697.740.000,00	(2.260.000)	99,68
	3. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	6.721.737.000,00	6.549.979.000,00	(171.758.000)	97,44
	C.1.10. Program Pengendalian Banjir	11.102.458.572,00	11.057.082.000,00	(45.376.572)	99,59
	1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	141.680.000,00	141.680.000,00	-	100,00
	2. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai	10.960.778.572,00	10.915.402.000,00	(45.376.572)	99,59
	C.1.11. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	11.887.589.000,00	10.045.854.640,00	(1.841.734.360)	84,51
	1. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	11.187.589.000,00	9.347.854.640,00	(1.839.734.360)	83,56
	2. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	700.000.000,00	698.000.000,00	(2.000.000)	99,71
	C.1.12. Program Perencanaan Tata Ruang	755.000.000,00	253.300.000,00	(501.700.000)	33,55
	1. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	755.000.000,00	253.300.000,00	(501.700.000)	33,55
	JUMLAH	244.337.150.189,00	237.575.464.595,00	(6.761.685.594,00)	97,23

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPDP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan laboratorium serta alat penunjang teknis pengukuran pada Dinas Pekerjaan Umum.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib pelayanan dasar Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib pelayanan dasar Perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Rumah tangga penggunaan air bersih	15,54 %
b.	Lingkungan pemukiman kumuh	25,86 %
c.	Rumah layak huni	46,54 %

Sumber : Dinas PU Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib pelayanan dasar Perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 18.403.155.916,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.312.197.840,- atau sebesar 99,51 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib Urusan perumahan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,81 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
D.	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	D.1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	D.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.023.844.916,00	2.010.793.844,00	(13.051.072,00)	99,36
	D.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.764.611.000,00	3.731.618.846,00	(32.992.154,00)	99,12
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.501.000,00	3.501.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.560.000,00	38.372.177,00	(187.823,00)	99,51
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan alat tulis kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan makanan dan minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	137.000.000,00	136.965.669,00	(34.331,00)	99,97
	10. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	3.549.950.000,00	3.517.180.000,00	(32.770.000,00)	99,08
	D.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	541.400.000,00	526.339.150,00	(15.060.850,00)	97,22
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	351.400.000,00	336.339.450,00	(15.060.550,00)	95,71
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	182.800.000,00	182.799.700,00	(300,00)	100,00
	D.1.4 Program Pengembangan perumahan	12.073.300.000,00	12.043.446.000,00	(29.854.000,00)	99,75
	1. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	12.073.300.000,00	12.043.446.000,00	(29.854.000,00)	99,75
	JUMLAH	18.403.155.916,00	18.312.197.840,00	(90.958.076,00)	99,51

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib pelayanan dasar Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib pelayanan dasar Perumahan rakyat dan kawasan permukiman dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan jumlah armada pemadam kebakaran yang belum mencukupi pada kantor pemadam Kebakaran dan penanggulangan Bencana.

h. Permasalahan dan Solusi

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan ada koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 12 (dua belas) Program dan 41 (empat puluh satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - ❖ Pelaksanaan program sebanyak 7 program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 24 kegiatan
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
 - ❖ Pelaksanaan program sebanyak 4 program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 15 kegiatan
3. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
 - ❖ Pelaksanaan program sebanyak 1 program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 2 kegiatan

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1
b.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP	1

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib pelayanan dasar ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 28.938.877.451,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.982.258.055,- atau 96,69 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib Urusan Penataan Ruang terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 2,76 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat berdasarkan Program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
E.	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
E.1.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.799.261.394,00	16.479.487.138,00	(312.105.130,00)	98,10
E.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.235.659.759,00	2.226.230.728,00	(9.429.031,00)	99,58
E.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	561.580.000,00	553.910.874,00	(7.669.126,00)	98,63
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.320.000,00	40.303.606,00	(3.016.394,00)	93,04
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan alat tulis kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan	35.920.000,00	35.920.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan makanan dan minuman	24.500.000,00	24.492.000,00	(8.000,00)	99,97
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	152.500.000,00	152.205.268,00	(294.732,00)	99,81
	10. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	211.950.000,00	207.600.000,00	(4.350.000,00)	97,95
E.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.800.000,00	134.507.422,00	(9.292.578,00)	93,54
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	86.400.000,00	86.300.000,00	(100.000,00)	99,88
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28.800.000,00	19.607.422,00	(9.192.578,00)	68,08
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00
E.1.4	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	899.117.799,00	886.578.684,00	(12.539.115,00)	98,61
	1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	539.147.799,00	531.071.759,00	(8.076.040,00)	98,50
	2. Pengendalian keamanan lingkungan	359.970.000,00	355.506.925,00	(4.463.075,00)	98,76

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	E.1.5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	137.371.418,00	128.344.162,00	(9.027.256,00)	93,43
	1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	75.371.256,00	72.147.000,00	(3.224.256,00)	95,72
	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	62.000.162,00	56.197.162,00	(5.803.000,00)	90,64
	E.1.6. Program Pendidikan Politik Masyarakat	821.732.418,00	801.561.360,00	(20.171.058,00)	97,55
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	163.566.691,00	153.750.691,00	(9.816.000,00)	94,00
	2. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	99.760.120,00	95.902.239,00	(3.857.881,00)	96,13
	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	412.231.710,00	406.688.400,00	(5.543.310,00)	98,66
	4. Penyuluhan kepada partai politik, ormas, OKP dan LSM	40.749.919,00	40.523.919,00	(226.000,00)	99,45
	5. Penelitian dan pengujian lapangan dokumen kelengkapan pendaftaran orkemas	105.423.978,00	104.696.111,00	(727.867,00)	99,31
	E.1.7. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	12.000.000.000,00	11.748.353.908,00	(251.646.092,00)	97,90
	1. Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	12.000.000.000,00	11.748.353.908,00	(251.646.092,00)	97,90
	E.2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	9.044.847.057,00	8.743.951.617,00	(152.297.596,00)	96,67
	E.2.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.228.935.738,00	2.129.749.627,00	(99.186.111,00)	95,55
	E.2.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.330.843.319,00	6.182.245.475,00	(148.597.844,00)	97,65
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.300.000,00	30.110.388,00	(10.189.612,00)	74,72
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.083.119,00	4.036.737,00	(4.046.382,00)	49,94
	4. Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	9.952.252,00	(10.047.748,00)	49,76
	5. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	7.498.256,00	(7.501.744,00)	49,99
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.585.200,00	3.765.070,00	(3.820.130,00)	49,64
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	2.490.000,00	(2.510.000,00)	49,80
	8. Penyediaan makanan dan minuman	7.200.000,00	3.570.000,00	(3.630.000,00)	49,58
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	135.000.000,00	60.347.772,00	(74.652.228,00)	44,70
	10. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	6.090.275.000,00	6.059.275.000,00	(31.000.000,00)	99,49
	E.2.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	334.440.000,00	283.382.515,00	(51.057.485,00)	84,73
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	220.000.000,00	219.148.000,00	(852.000,00)	99,61
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.500.000,00	22.054.515,00	(445.485,00)	98,02
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77.000.000,00	34.840.000,00	(42.160.000,00)	45,25
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	14.940.000,00	7.340.000,00	(7.600.000,00)	49,13

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	E.2.4 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	150.628.000,00	148.574.000,00	(2.054.000,00)	98,64
	1. Pengendalian keamanan lingkungan	150.628.000,00	148.574.000,00	(2.054.000,00)	98,64
	E.3. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.094.769.000,00	2.758.819.300,00	(335.949.700,00)	89,14
	E.3.1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3.094.769.000,00	2.758.819.300,00	(335.949.700,00)	89,14
	1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	1.866.464.000,00	1.537.905.800,00	(328.558.200,00)	82,40
	2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1.228.305.000,00	1.220.913.500,00	(7.391.500,00)	99,40
	JUMLAH	28.938.877.451,00	27.982.258.055,00	(800.352.426,00)	96,69

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan Wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan Wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan ada koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

6. Urusan Sosial

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib pelayanan dasar Sosial adalah sebanyak 2 SKPD, yaitu :

1. Dinas Sosial
2. Sekretariat Daerah Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat.

SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sosial adalah Dinas Sosial sementara itu Sekretariat Daerah bertindak sebagai mitra kerja dengan

pelaksanaannya mencakup sinkronisasi dan koordinasi kesejahteraan sosial.

b. Program dan kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib pelayanan dasar Sosial Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 7 (tujuh) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 6 program
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 15 Kegiatan

2. Sekretariat Daerah

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 1 program
- ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 kegiatan

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib pelayanan dasar Sosial dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4 Unit
b.	Persentase penyandang cacat baik fisik maupun mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10,84 %
c.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18,19 %

Sumber: Dinsos Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib pelayanan dasar Sosial pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 6.812.000.673,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.724.539.724,- atau sebesar 98,72 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar Sosial terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,66 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar Sosial berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN SOSIAL
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
F.	URUSAN SOSIAL				
F.1.	DINAS SOSIAL	6.715.440.673,00	6.654.003.724,00	(61.436.949,00)	99,09
F.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.346.985.673,00	2.304.840.518,00	(42.145.155,00)	98,20
F.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.072.925.000,00	1.066.665.535,00	(6.259.465,00)	99,42
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.135.000,00	6.134.000,00	(1.000,00)	99,98
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.395.000,00	52.629.148,00	(1.765.852,00)	96,75
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.000.000,00	22.950.000,00	(50.000,00)	99,78
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	73.438.396,00	(1.561.604,00)	97,92
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.000.000,00	62.277.674,00	(722.326,00)	98,85
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.500.000,00	19.350.000,00	(150.000,00)	99,23
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.910.000,00	(90.000,00)	98,20
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	21.890.000,00	21.881.500,00	(8.500,00)	99,96
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	80.000.000,00	79.977.317,00	(22.683,00)	99,97
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	725.005.000,00	723.117.500,00	(1.887.500,00)	99,74
F.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	181.030.000,00	177.000.641,00	(4.029.359,00)	97,77
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	153.830.000,00	150.157.510,00	(3.672.490,00)	97,61
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	27.200.000,00	26.843.131,00	(356.869,00)	98,69
F.1.4.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	767.500.000,00	764.751.600,00	(2.748.400,00)	99,64
	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	767.500.000,00	764.751.600,00	(2.748.400,00)	99,64

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.1.5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	2.247.000.000,00	2.241.961.430,00	(5.038.570,00)	99,78
	1. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	2.247.000.000,00	2.241.961.430,00	(5.038.570,00)	99,78
	F.1.6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	100.000.000,00	98.784.000,00	(1.216.000,00)	98,78
	1. Penjaringan Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila	100.000.000,00	98.784.000,00	(1.216.000,00)	98,78
F.2	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	96.560.000,00	70.536.000,00	(26.024.000,00)	73,05
	F.2.1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	96.560.000,00	70.536.000,00	(26.024.000,00)	73,05
	1. Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	96.560.000,00	70.536.000,00	(26.024.000,00)	73,05
	JUMLAH	6.812.000.673,00	6.724.539.724,00	(87.460.949,00)	98,72

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib pelayanan dasar Sosial. Perencanaan Pembangunan Daerah dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil dari pada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan sosial masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan Sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
 4. Penerapan Dokumen Perencanaan pada SKPD belum optimal.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

b. Ringkasan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksanaan

Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan wajib bukan pelayanan dasar Perempuan dan Perlindungan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 5 (lima) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat kami uraikan sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	65,42 %
b.	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	97,07 %
c.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	53,62 %

Sumber : DPP,PA,PP dan KB Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 4.240.711.033,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.145.592.071,- atau sebesar 97,76 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,41 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
G.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
G.1.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
G.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.845.378.133,00	2.784.044.523,00	(61.333.610,00)	97,84
G.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	610.575.400,00	601.411.120,00	(9.164.280,00)	98,50
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.490.000,00	60.848.175,00	(3.641.825,00)	94,35
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.533.200,00	8.533.200,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.337.200,00	15.337.200,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.560.000,00	15.560.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.908.000,00	7.908.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.640.000,00	5.640.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.485.000,00	(15.000,00)	
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	59.532.000,00	58.899.545,00	(632.455,00)	98,94
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	427.575.000,00	422.700.000,00	(4.875.000,00)	98,86
G.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137.300.000,00	127.784.060,00	(9.515.940,00)	93,07
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00
	2. Pengadaan mebeleur	8.100.000,00	8.000.000,00	(100.000,00)	98,77
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000,00	1.535.000,00	(1.465.000,00)	51,17
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	108.800.000,00	101.049.060,00	(7.750.940,00)	92,88
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan peralatan gedung kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00
G.1.4.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	31.120.000,00	27.998.000,00	(3.122.000)	89,97
	1. Fasilitasi upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan	31.120.000,00	27.998.000,00	(3.122.000)	89,97
G.1.5.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	616.337.500,00	604.354.368,00	(11.983.132,00)	98,06
	1. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	616.337.500,00	604.354.368,00	(11.983.132,00)	98,06
				-	
	JUMLAH	4.240.711.033,00	4.145.592.071,00	(95.118.962,00)	97,76

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang).

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
4. Keterbatasan sarana dan Prasarana pelayanan Urusan Perhubungan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap.

a. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

2. Urusan Pertanahan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Pertanahan adalah sekretariat daerah Bagian Tata Pemerintahan subbag Pemerintahan Umum yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap Urusan tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Pertanahan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Sekretariat Daerah.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib bukan pelayanan dasar Pertanahan dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Luas lahan bersertifikat	58,20 %
b.	Penyelesaian kasus tanah negara	100 %
c.	Penyelesaian ijin lokasi	0,00 %

Sumber : BPN Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Urusan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 396.112.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 390.639.839,- atau

sebesar 98,62 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar/pertanahan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,04 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar Pertanian berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
H.	URUSAN PERTANAHAN				
H.1.	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
H.1.1.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	396.112.000,00	390.639.839,00	(5.472.161,00)	98,62
	1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	396.112.000,00	390.639.839,00	(5.472.161,00)	98,62
	JUMLAH	396.112.000,00	390.639.839,00	(5.472.161,00)	98,62

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Pertanahan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan pertanahan dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan pertanahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah koordinasi terhadap SKPD terkait.
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

3. Urusan Lingkungan Hidup

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap bidang tersebut.

b. Program dan kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 5 (lima) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan Hidup dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Penanganan sampah	52,36 %
b.	Kebersihan	100 %
c.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0 %
d.	Penegakan hukum lingkungan	0 %

Sumber : DLH Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar lingkungan hidup pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 24.890.357.580,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.607.911.656,- atau sebesar 98,87 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar lingkungan hidup terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 2,43 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar lingkungan hidup berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
G.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	G.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	G.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	6.359.231.046,00	6.327.338.747,00	(31.892.299)	99,50
	G.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.860.358.979,00	11.814.010.651,00	(46.348.328)	99,61
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.044.112.479,00	5.040.868.335,00	(3.244.144)	99,94
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	68.398.000,00	68.398.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.200.000,00	13.171.500,00	(28.500)	99,78
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	167.180.000,00	167.180.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.002.000,00	(998.000)	83,37
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.950.000,00	(10.000)	99,75
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	140.000.000,00	139.814.316,00	(185.684)	99,87
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	6.391.308.500,00	6.349.426.500,00	(41.882.000)	99,34
	G.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	705.600.000,00	694.881.512,00	(10.718.488,00)	98,48
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	10.750.000,00	10.750.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	193.000.000,00	192.706.600,00	(293.400,00)	99,85
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	496.720.000,00	486.416.912,00	(10.303.088,00)	97,93
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	5.130.000,00	5.008.000,00	(122.000,00)	97,62
	G.1.4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.109.000.000,00	1.962.427.895,00	(146.572.105,00)	93,05
	1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.289.000.000,00	1.146.220.000,00	(142.780.000,00)	88,92
	2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	820.000.000,00	816.207.895,00	(3.792.105,00)	99,54
	G.1.5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.856.167.555,00	3.809.252.851,00	(46.914.704,00)	98,78
	1. Penataan RTH	2.897.208.827,00	2.850.446.523,00	(46.762.304,00)	98,39
	2. Pemeliharaan RTH	958.958.728,00	958.806.328,00	(152.400,00)	99,98
	JUMLAH	24.890.357.580,00	24.607.911.656,00	(282.445.924,00)	98,87

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar lingkungan hidup dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPDP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib bukan pelayanan dasar lingkungan hidup dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan jumlah armada pengangkut sampah yang belum mencukupi.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan lingkungan hidup dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
4. Keterbatasan sarana dan Prasarana persampahan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah peningkatan sarana dan prasarana persampahan secara bertahap.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar administrasi Kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan Urusan tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar administrasi Kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib pelayanan dasar administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Kepemilikan KTP	70,25 %
b.	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	18,09 %
c.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar administrasi Kependudukan dan catatan sipil pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 3.980.463.893,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.913.985.560,- atau sebesar 98,33 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar administrasi Kependudukan dan catatan sipil terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,39 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar administrasi Kependudukan dan catatan sipil berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
H.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
	H.1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
	H.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.570.631.093,00	2.514.841.173,00	(55.789.920,00)	97,83
	H.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	997.759.800,00	992.628.187,00	(5.131.613,00)	99,49
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.648.000,00	1.648.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.100.000,00	51.843.152,00	(4.256.848,00)	92,41
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.886.000,00	2.886.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	279.432.500,00	279.432.300,00	(200,00)	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	118.208.500,00	118.205.000,00	(3.500,00)	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.364.800,00	2.364.800,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.090.000,00	3.090.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	249.780.000,00	249.358.935,00	(421.065,00)	99,83
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	281.550.000,00	281.100.000,00	(450.000,00)	99,84
	H.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	315.144.000,00	314.062.200,00	(1.081.800,00)	99,66
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	108.381.000,00	108.381.000,00	-	100,00
	2. Pengadaan mebeleur	130.000.000,00	129.950.000,00	(50.000,00)	99,96
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	36.900.000,00	36.900.000,00	-	100,00
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17.100.000,00	16.068.200,00	(1.031.800,00)	93,97
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	22.763.000,00	22.763.000,00	-	100,00
	H.1.4. Program Penataan Administrasi Kependudukan	96.929.000,00	92.454.000,00	(4.475.000,00)	95,38
	1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	96.929.000,00	92.454.000,00	(4.475.000,00)	95,38
	JUMLAH	3.980.463.893,00	3.913.985.560,00	(66.478.333,00)	98,33

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar administrasi Kependudukan dan catatan sipil dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib bukan pelayanan dasar administrasi Kependudukan dan catatan sipil dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan wajib bukan pelayanan dasar administrasi Kependudukan dan catatan sipil dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. Dimana yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 5 (lima) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan untuk selanjutnya Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	PKK Aktif	100 %
b.	Posyandu aktif	100 %

Sumber : DPMG Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan masyarakat desa pada tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 3.348.129.353,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.242.863.462,- atau sebesar 96,86 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib

bukan pelayanan dasar Pemberdayaan masyarakat desa terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,32 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Pemberdayaan masyarakat berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
I.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
I.1.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG				
I.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	1.914.475.353,00	1.824.501.031,00	(89.974.322,00)	95,30
I.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	719.735.000,00	708.462.230,00	(11.272.770,00)	98,43
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.950.000,00	27.947.016,00	(10.002.984,00)	73,64
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.650.000,00	4.650.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.220.000,00	(780.000,00)	87,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	26.365.000,00	25.880.000,00	(485.000,00)	98,16
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.000.000,00	299.995.214,00	(4.786,00)	100,00
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	237.920.000,00	237.920.000,00	-	100,00
I.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	451.800.000,00	450.356.201,00	(1.443.799,00)	99,68
	1. Pembangunan Gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	208.000.000,00	207.800.000,00	(200.000,00)	99,90
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29.800.000,00	28.606.201,00	(1.193.799,00)	95,99
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	14.000.000,00	13.950.000,00	(50.000,00)	99,64
I.1.4.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	76.301.000,00	75.637.000,00	(664.000,00)	99,13
	1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	76.301.000,00	75.637.000,00	(664.000,00)	99,13
I.1.5.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	185.818.000,00	183.907.000,00	(1.911.000,00)	98,97
	1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	131.518.000,00	130.729.000,00	(789.000,00)	99,40
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	54.300.000,00	53.178.000,00	(1.122.000,00)	97,93
	JUMLAH	3.348.129.353,00	3.242.863.462,00	(105.265.891,00)	96,86

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan masyarakat desa dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan masyarakat desa masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib bukan pelayanan dasar pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Prevalensi peserta KB aktif	85,46 %
b.	Rasio Petugas Lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap Desa/Kelurahan	2,27 %

Sumber : BKKBPP Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.398.398.151,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.209.666.440,- atau sebesar 86,50 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,12 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
J.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	J.1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			-	
	J.1.1. Program Keluarga Berencana	1.398.398.151,00	1.209.666.440,00	(188.731.711,00)	86,50
	1. Pelayanan KIE	1.398.398.151,00	1.209.666.440,00	(188.731.711,00)	86,50
	JUMLAH	1.398.398.151,00	1.209.666.440,00	(188.731.711,00)	86,50

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan urusan wajib bukan pelayanan dasar pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang).

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

7. Urusan Perhubungan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Perhubungan adalah Dinas Perhubungan yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Perhubungan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 5 (lima) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Perhubungan.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Perhubungan dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Angkutan darat	1200
b.	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	131.105

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Perhubungan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 4.068.274.243,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.735.137.703,- atau sebesar 91,81 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib Urusan perhubungan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,37 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar perhubungan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
K.	URUSAN PERHUBUNGAN				
	K.1. DINAS PERHUBUNGAN				
	K.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	1.781.586.551,00	1.564.597.644,00	(216.988.907,00)	87,82
	K.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.622.992.100,00	1.527.832.444,00	(95.159.656,00)	94,14
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.700.000,00	179.196.244,00	(93.503.756,00)	65,71
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.865.000,00	3.864.300,00	(700,00)	99,98
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.495.100,00	16.495.100,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	14.290.000,00	14.290.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150.000.000,00	149.994.800,00	(5.200,00)	100,00
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.143.142.000,00	1.141.492.000,00	(1.650.000,00)	99,86
	K.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	578.800.000,00	557.812.615,00	(20.987.385,00)	96,37
	1. Pengadaan mebeleur	200.000.000,00	199.850.000,00	(150.000,00)	99,93
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000,00	34.981.748,00	(18.252,00)	99,95
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	328.200.000,00	307.380.867,00	(20.819.133,00)	93,66
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00
	5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	K.1.4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	77.458.000,00	77.458.000,00	-	100,00
	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	77.458.000,00	77.458.000,00	-	100,00
	K.1.5. Program Peningkatan pelayanan angkutan	7.437.592,00	7.437.000,00	(592,00)	99,99
	1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	7.437.592,00	7.437.000,00	(592,00)	99,99
	JUMLAH	4.068.274.243,00	3.735.137.703,00	(333.136.540)	91,81

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Perhubungan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. Lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan perhubungan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan lokasi pelayanan uji kelayakan kendaraan (KIR) kepada angkutan yang belum memenuhi standar.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan wajib bukan pelayanan dasar perhubungan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan-pelatihan teknis kepada Aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

8. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga bertindak sebagai penanggung jawab.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika oleh Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan. Untuk selanjutnya, penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib bukan pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	ELEMEN DATA DALAM LPPD
a.	Web Site milik pemerintah daerah	Ada
b.	Leaflet/Brosur	Ada
c.	Pameran/Expo	1

Sumber : Diskominfo Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.281.577.125,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.026.074.636,- atau sebesar 88,80 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib Urusan Komunikasi dan Informatika terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,20 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
K.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	K.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	K.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	1.414.557.125,00	1.206.377.147,00	(208.179.978,00)	85,28
	K.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	768.470.904,00	723.348.489,00	(45.122.415,00)	94,13
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.300.000,00	35.778.989,00	(5.521.011,00)	86,63
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	68.600.904,00	67.399.500,00	(1.201.404,00)	98,25
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	605.470.000,00	567.070.000,00	(38.400.000,00)	93,66
	K.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.199.096,00	87.999.000,00	(2.200.096,00)	97,56
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.800.000,00	11.600.000,00	(2.200.000,00)	84,06
	2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	76.399.096,00	76.399.000,00	(96,00)	100,00
	K.1.4. Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	8.350.000,00	8.350.000,00	-	100,00
	1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	8.350.000,00	8.350.000,00	-	100,00
	JUMLAH	2.281.577.125,00	2.026.074.636,00	(255.502.489)	88,80

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. Lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembaguan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Komunikasi dan informatika masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan-pelatihan teknis kepada Aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

9. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan wajib bukan pelayanan dasar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan Urusan tersebut.

b. Program dan kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan wajib bukan pelayanan dasar koperasi dan usaha kecil menengah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu)

Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib bukan pelayanan dasar Koperasi dan UKM dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Koperasi aktif	37,94 %
b.	Usaha mikro dan kecil	76,23 %

Sumber : Disperindagkop Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan wajib bukan pelayanan dasar Koperasi dan UKM pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 129.730.340,- dan terealisasi sebesar Rp. 129.730.340,- atau sebesar 100 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar Koperasi dan UKM terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,01 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar Koperasi dan UKM berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN KOPERASI DAN UKM
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
L.	URUSAN KOPERASI DAN UKM				
	L.1. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM				
	L.1.1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	129.730.340,00	129.730.340,00	-	100,00
	1. Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah	129.730.340,00	129.730.340,00	-	100,00
	JUMLAH	129.730.340,00	129.730.340,00	-	100,00

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Koperasi dan UKM dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPd (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Koperasi dan UKM masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan minimnya sarana dan prasarana.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar Koperasi dan UKM dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
- 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
- 4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bidang Koperasi dan UKM.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

10. Urusan Penanaman Modal

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang sekaligus sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan tersebut dan Bagian Perekonomian, Energi dan Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Langsa yang bertindak sebagai mitra kerja.

b. Program dan kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Penanaman Modal Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 3 Program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 16 kegiatan
2. Bagian Perekonomian, Energi dan Sumber Daya
 - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 1 Program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 1 kegiatan

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib bukan pelayanan dasar Penanaman Modal dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	45,06%

Sumber : Disperindagkop Kota Langsa

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dalam hal ini dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu sebagai SKPD penanggung jawab pada tahun 2017 telah menerbitkan izin sebanyak 2337 perizinan dengan kontribusi yang diperoleh sebesar Rp. 624.974.000,- berikut penjabarannya :

**KOMPOSISI PERIZINAN DAN KONTRIBUSI
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2017**

No.	Nama Izin	Jumlah Perizinan	Pendapatan
1.	Ijin Mendirikan Bangunan	155	Rp. 216.917.000
2.	Ijin Gangguan	844	Rp. 402.629.000
3.	SITU	0	0
4.	SIKPI/SIPI Kelautan Perikanan	0	Rp. 5.428.000
5.	Ijin Walet	32	0
6.	Ijin Bidang Kesehatan	22	0
7.	Ijin Sumur Bor	0	0
8.	SIUP	533	0
9.	TDP	495	0
10.	TDI	3	0
11.	IUJK	142	0
12.	Badan Hukum Koperasi	0	0
13.	Izin Reklame	107	0
14.	Ijin Pariwisata	0	0
15.	Tanda Daftar Gudang	4	0
	Total	2337	Rp. 624.974.000

Sumber : DPMPTSP Kota Langsa

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan wajib bukan pelayanan dasar Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.672.642.175,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.629.334.089,- atau sebesar 98,38 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib Urusan Penanaman Modal terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,26 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar Penanaman Modal berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN PENANAMAN MODAL
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
M.	URUSAN PENANAMAN MODAL				
M.1.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.562.252.175,00	2.520.154.089,00	(42.098.086,00)	98,36
	M.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	1.859.819.487,00	1.836.030.941,00	(23.788.546,00)	98,72
	M.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	571.040.688,00	555.720.624,00	(15.320.064,00)	97,32
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.150.000,00	42.139.807,00	(1.010.193,00)	97,66
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	80.700.000,00	67.735.000,00	(12.965.000,00)	83,93
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.574.000,00	6.574.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	42.873.600,00	42.873.600,00	-	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.516.588,00	21.515.000,00	(1.588,00)	99,99
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.837.000,00	1.837.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	6.187.000,00	6.187.000,00	-	100,00
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	98.845.000,00	97.891.717,00	(953.283,00)	99,04
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	263.357.500,00	263.087.500,00	(270.000,00)	99,90
	M.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	131.392.000,00	128.402.524,00	(2.989.476,00)	97,72
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	5.892.000,00	5.891.900,00	(100,00)	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.400.000,00	11.578.424,00	(2.821.576,00)	80,41
	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.100.000,00	18.088.500,00	(11.500,00)	99,94
	5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	8.000.000,00	7.843.700,00	(156.300,00)	98,05
M.2.	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA	110.390.000,00	109.180.000,00	(1.210.000,00)	98,90
	M.2.1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	110.390.000,00	109.180.000,00	(1.210.000,00)	98,90
	1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan	110.390.000,00	109.180.000,00	(1.210.000,00)	98,90
	JUMLAH	2.672.642.175,00	2.629.334.089,00	(43.308.086,00)	98,38

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Penanaman Modal dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPJMD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Penanaman Modal masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan minimnya sarana dan prasarana.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
 4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bidang Penanaman Modal.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

11. Urusan Kepemudaan dan olah Raga

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Kepemudaan dan Olah raga adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan Urusan tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib bukan pelayanan dasar kepemudaan dan Olah Raga dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	1
b.	Lapangan Olahraga	1,15 %

Sumber : Disporabudpar Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Kepemudaan dan olah raga pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar

Rp. 7.601.757.948,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.409.067.562,- atau sebesar 97,47 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar kepemudaan dan olah raga terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,73 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar kepemudaan dan olah raga berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
N.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
N.1.	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.353.422.724,00	3.259.066.731,00	(94.355.993,00)	97,19
N.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.266.869.624,00	2.217.327.025,00	(49.542.599,00)	97,81
N.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	791.253.100,00	748.941.906,00	(42.311.194,00)	94,65
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.210.000,00	1.210.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.200.000,00	117.015.731,00	(18.184.269,00)	86,55
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.355.600,00	6.355.600,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.212.500,00	21.211.260,00	(1.240,00)	99,99
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.753.000,00	4.751.000,00	(2.000,00)	99,96
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	142.237.000,00	130.563.315,00	(11.673.685,00)	91,79
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	450.925.000,00	438.475.000,00	(12.450.000,00)	97,24
N.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	295.300.000,00	292.797.800,00	(2.502.200,00)	99,15
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	48.500.000,00	48.500.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	204.800.000,00	204.800.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31.200.000,00	28.697.800,00	(2.502.200,00)	91,98
	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00
N.1.4.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	894.912.500,00	890.934.100,00	(3.978.400,00)	99,56
	1. Pendidikan dan Pelatihan dasar masyarakat dalam kegiatan kepemudaan	894.912.500,00	890.934.100,00	(3.978.400,00)	99,56
	JUMLAH	7.601.757.948,00	7.409.067.562,00	(192.690.386,00)	97,47

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar kepemudaan dan olah raga dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPDP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Kepemudaan dan olah raga dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Kepemudaan dan olah raga dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkn koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

12. Urusan Kebudayaan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan tersebut dan Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Langsa yang bertindak sebagai mitra kerja.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar kebudayaan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun

Anggaran 2017 adalah sebanyak 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - ❖ Pelaksanaan program sebanyak 1 program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 1 kegiatan
2. Sekretariat Daerah
 - ❖ Pelaksanaan program sebanyak 1 program
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 2 kegiatan

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib bukan pelayanan dasar Kebudayaan dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1
b.	Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1
c.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100 %

Sumber : Disporabudpar Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.721.736.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.621.277.900,- atau sebesar 96,31 %. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar kebudayaan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,26 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar kebudayaan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
O.	URUSAN KEBUDAYAAN				
	O.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	119.056.000,00	118.874.600,00	(181.400,00)	99,85
	O.1.1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	119.056.000,00	118.874.600,00	(181.400,00)	99,85
	1. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	119.056.000,00	118.874.600,00	(181.400,00)	99,85
	O.2. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.602.680.000,00	2.502.403.300,00	(100.276.700,00)	96,15
	O.2.1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.602.680.000,00	2.502.403.300,00	(100.276.700,00)	96,15
	1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.056.945.000,00	1.985.067.300,00	(71.877.700,00)	96,51
	2. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	545.735.000,00	517.336.000,00	(28.399.000,00)	94,80
	JUMLAH	2.721.736.000,00	2.621.277.900,00	(100.458.100,00)	96,31

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar kebudayaan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Kebudayaan dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan Kebudayaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD terkait.
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

13. Urusan Perpustakaan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan urusan tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Perpustakaan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 3 (tiga) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan wajib bukan pelayanan dasar Perpustakaan dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	16,57 %
b.	Pengunjung Perpustakaan	13,76 %

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.019.692.611,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.970.615.210,- atau 97,57 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Perpustakaan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,19 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Perpustakaan berdasarkan Program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN PERPUSTAKAAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
P.	URUSAN PERPUSTAKAAN				
P.1.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
P.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	1.425.244.811,00	1.386.425.830,00	(38.818.981,00)	97,28
P.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	536.149.800,00	533.110.528,00	(3.039.272,00)	99,43
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	816.000,00	816.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.400.000,00	14.550.528,00	(1.849.472,00)	88,72
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.184.000,00	5.183.500,00	(500,00)	99,99
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.728.000,00	1.728.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	4.354.000,00	4.353.500,00	(500,00)	99,99
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	28.307.000,00	28.289.000,00	(18.000,00)	99,94
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	464.440.800,00	463.270.000,00	(1.170.800,00)	99,75
P.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	58.298.000,00	51.078.852,00	(7.219.148,00)	87,62
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48.000.000,00	40.786.852,00	(7.213.148,00)	84,97
	2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.298.000,00	10.292.000,00	(6.000,00)	99,94
	JUMLAH	2.019.692.611,00	1.970.615.210,00	(49.077.401,00)	97,57

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Perpustakaan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Perpustakaan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Perpustakaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan Kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada Aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

c. Ringkasan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran

2017 adalah sebanyak 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Pangan, Pertanian Kelautan dan Perikanan.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minima

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Produksi Perikanan	85,68 %
b.	Konsumsi Ikan	75,88 %

Sumber : DPPKP Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 6.453.692.795,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.433.965.295,- atau sebesar 99,69 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Kelautan dan perikanan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,63 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja Urusan Pilihan Urusan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
A.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	A.1. DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	A.1.1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.374.260.000,00	3.364.445.000,00	(9.815.000,00)	99,71
	1. Pembinaan dan pengembangan perikanan	3.374.260.000,00	3.364.445.000,00	(9.815.000,00)	99,71
	A.1.2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3.079.432.795,00	3.069.520.295,00	(9.912.500,00)	99,68
	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	3.079.432.795,00	3.069.520.295,00	(9.912.500,00)	99,68
	JUMLAH	6.453.692.795,00	6.433.965.295,00	(19.727.500,00)	99,69

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatoha teknis kepada Aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

2. Urusan Pariwisata

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pilihan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Pariwisata Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan pilihan Pariwisata dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Kunjungan wisata	746.586 orang
b.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,90 %

Sumber : DISPORAPAR Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Pariwisata pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 16.138.856.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.794.967.460,- atau sebesar 97,87 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan pariwisata terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,55 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja Urusan Pilihan Urusan Pariwisata berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN URUSAN PARIWISATA
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
B.	URUSAN PARIWISATA				
	B.1. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	B.1.1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	16.138.856.500,00	15.794.967.460,00	(343.889.040,00)	97,87
	1. Pengembangan objek pariwisata unggulan	511.424.500,00	511.162.500,00	(262.000,00)	99,95
	2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	15.627.432.000,00	15.283.804.960,00	(343.627.040,00)	97,80
	JUMLAH	16.138.856.500,00	15.794.967.460,00	(343.889.040,00)	97,87

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan pilihan Pariwisata dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan pilihan Pariwisata masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan Pariwisata dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatoha teknis kepada Aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

3. Urusan Pertanian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pilihan Pertanian adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Pertanian Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan pilihan Pertanian dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	0,17 ton
b.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8,29 %

Sumber : DPPKP Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Pertanian pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 14.183.992.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.051.821.460,- atau sebesar 99,07 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,38 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja Urusan Pilihan Pertanian berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
C.	URUSAN PERTANIAN				
C.1.	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN				
C.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	5.477.991.721,00	5.453.968.123,00	(24.023.598,00)	99,56
C.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.278.105.000,00	1.250.880.848,00	(27.224.152,00)	97,87
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.010.000,00	2.010.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	78.005.675,00	(21.994.325,00)	78,01
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.600.000,00	4.144.638,00	(1.455.362,00)	74,01
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	34.999.012,00	(988,00)	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.697.000,00	(3.000,00)	99,95
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	265.000.000,00	264.994.523,00	(5.477,00)	100,00
	10. Penyediaan jasa penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	822.795.000,00	819.030.000,00	(3.765.000,00)	99,54
C.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	453.387.460,00	430.297.451,00	(23.090.009,00)	94,91
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	25.883.460,00	25.844.000,00	(39.460,00)	99,85
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	208.800.000,00	205.790.500,00	(3.009.500,00)	98,56
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	202.270.000,00	182.228.951,00	(20.041.049,00)	90,09
	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.434.000,00	16.434.000,00	-	100,00
C.1.4.	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	368.623.000,00	368.421.000,00	(202.000,00)	99,95
	1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	368.623.000,00	368.421.000,00	(202.000,00)	99,95
C.1.5.	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.846.142.500,00	1.821.139.100,00	(25.003.400,00)	98,65
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1.846.142.500,00	1.821.139.100,00	(25.003.400,00)	98,65
C.1.6.	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	4.759.743.000,00	4.727.114.938,00	(32.628.062,00)	99,31
	1. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	4.759.743.000,00	4.727.114.938,00	(32.628.062,00)	99,31
	JUMLAH	14.183.992.681,00	14.051.821.460,00	(131.969.221,00)	99,07

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan pilihan Pertanian dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan pilihan Pertanian masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatihan teknis kepada Aparatur.

j. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

4. Urusan Perdagangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pilihan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Urusan tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Perdagangan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan pilihan Perdagangan dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	23,71 %
b.	Ekspor Bersih Perdagangan	Nihil

Sumber : Disperindagkop Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 4.664.185.092,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.659.180.092,- atau sebesar 99,89 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Perdagangan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,45 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja Urusan Pilihan Perdagangan berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN URUSAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
D.	URUSAN PERDAGANGAN				
	D.1. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM				
	D.1.1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4.664.185.092,00	4.659.180.092,00	(5.005.000,00)	99,89
	1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	4.664.185.092,00	4.659.180.092,00	(5.005.000,00)	99,89
	JUMLAH	4.664.185.092,00	4.659.180.092,00	(5.005.000,00)	99,89

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan pilihan Perdagangan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan urusan pilihan Perdagangan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan pilihan Perdagangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatihat teknis kepada Aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

5. Urusan Perindustrian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan Pilihan Perindustrian adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan urusan tersebut.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Perindustrian Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perindustrian dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7,18 %
b.	Pertumbuhan Industri	41,45 %

Sumber : Disperindagkop Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5.577.909.477,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.462.667.229,- atau sebesar 97,93 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Perindustrian terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,53 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja Urusan Pilihan Perindustrian berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN URUSAN PERINDUSTRIAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
E.	URUSAN PERINDUSTRIAN				
	E.1. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM				
	E.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.570.418.044,00	2.529.302.169,00	(41.115.875,00)	98,40
	E.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	582.449.000,00	577.407.900,00	(5.041.100,00)	99,13
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000,00	2.743.860,00	(1.356.140,00)	66,92
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.575.000,00	38.182.488,00	(3.392.512,00)	91,84
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.189.000,00	(11.000,00)	99,85
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	162.019.000,00	161.967.552,00	(51.448,00)	99,97
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	320.555.000,00	320.325.000,00	(230.000,00)	99,93
	E.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	336.042.433,00	273.297.572,00	(62.744.861,00)	81,33
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	1.792.433,00	1.750.000,00	(42.433,00)	97,63
	2. Pengadaan mebeleur	150.000.000,00	149.660.000,00	(340.000,00)	99,77
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	103.500.000,00	53.390.000,00	(50.110.000,00)	51,58
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.500.000,00	48.247.572,00	(12.252.428,00)	79,75
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	20.250.000,00	20.250.000,00	-	100,00
	D.1.4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.089.000.000,00	2.082.659.588,00	(6.340.412,00)	99,70
	1. Fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah	2.089.000.000,00	2.082.659.588,00	(6.340.412,00)	99,70
	JUMLAH	5.577.909.477,00	5.462.667.229,00	(115.242.248,00)	97,93

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan pilihan Perindustrian dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan pilihan Perindustrian masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan pilihan Perindustrian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatihat teknis kepada Aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

d. Ringkasan Urusan Penunjang

1. Urusan Administrasi Pemerintahan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan penunjang administrasi pemerintahan yaitu :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRK
3. Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah
4. Kecamatan Langsa Kota
5. Kecamatan Langsa Barat
6. Kecamatan Langsa Timur
7. Kecamatan Langsa Lama

8. Kecamatan Langsa Barö
9. Sekretariat Baitul Mal
10. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
11. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
12. Sekretariat Majelis Adat Aceh

Keseluruhan SKPD tersebut bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan penunjang administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 60 (enam puluh) Program dan 212 (dua ratus dua belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
 - Pelaksanaan Program sebanyak 12 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 42 kegiatan
2. Sekretariat DPRK
 - Pelaksanaan Program sebanyak 5 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 22 kegiatan
3. Dinas Syariat Islam
 - Pelaksanaan Program sebanyak 5 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 18 kegiatan
4. Kecamatan Langsa Kota
 - Pelaksanaan Program sebanyak 3 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 14 kegiatan
5. Kecamatan Langsa Barat
 - Pelaksanaan Program sebanyak 3 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 14 kegiatan
6. Kecamatan Langsa Timur
 - Pelaksanaan Program sebanyak 3 program

- Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 kegiatan
- 7. Kecamatan Langsa Lama
 - Pelaksanaan Program sebanyak 3 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 14 kegiatan
- 8. Kecamatan Langsa Barö
 - Pelaksanaan Program sebanyak 3 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 16 kegiatan
- 9. Sekretariat Baitul Mal
 - Pelaksanaan Program sebanyak 3 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 13 kegiatan
- 10. Sekretariat Majelis Permusyawaratan ulama
 - Pelaksanaan Program sebanyak 2 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 13 kegiatan
- 11. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
 - Pelaksanaan Program sebanyak 4 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 16 kegiatan
- 12. Sekretariat Majelis Adat Aceh
 - Pelaksanaan Program sebanyak 2 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 16 kegiatan

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan penunjang administrasi pemerintahan pada tahun Anggaran 2017 adalah sebesar

Rp. 84.601.060.345,00 dan terealisasi sebesar Rp. 76.145.630.726,00 atau sebesar 90,01 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Penunjang administrasi pemerintahan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 7,51 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Penunjang administrasi pemerintahan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
F.	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH	38.054.135.027,00	36.563.149.960,00	(1.490.985.067,00)	96,08
	F.1. BAGIAN UMUM	31.642.514.370,00	30.376.398.040,00	(1.266.116.330,00)	96,00
	F.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	11.663.211.870,00	11.575.050.097,00	(88.161.773,00)	99,24
	F.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.516.083.000,00	8.046.544.547,00	(469.538.453,00)	94,49
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.360.000,00	27.552.240,00	(1.807.760,00)	93,84
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	919.690.000,00	860.627.428,00	(59.062.572,00)	93,58
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	40.000.000,00	23.461.000,00	(16.539.000,00)	58,65
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	119.656.000,00	119.316.000,00	(340.000,00)	99,72
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	220.000.000,00	219.825.000,00	(175.000,00)	99,92
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	193.850.000,00	179.387.000,00	(14.463.000,00)	92,54
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.000.000,00	61.992.400,00	(2.007.600,00)	96,86
	8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.480.000,00	43.533.608,00	(15.946.392,00)	73,19
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00	1.989.000,00	(11.011.000,00)	15,30
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	1.911.000.000,00	1.785.274.650,00	(125.725.350,00)	93,42
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.362.982.000,00	2.362.705.346,00	(276.654,00)	99,99
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	2.583.065.000,00	2.360.880.875,00	(222.184.125,00)	91,40
	F.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.869.997.000,00	7.598.076.851,00	(271.920.149,00)	96,54
	1. Pembangunan Gedung Kantor	2.649.779.000,00	2.636.060.600,00	(13.718.400,00)	99,48
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	2.436.678.000,00	2.406.820.350,00	(29.857.650,00)	98,77
	3. Pengadaan mebeleur	349.400.000,00	338.195.000,00	(11.205.000,00)	96,79
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	97.000.000,00	87.013.000,00	(9.987.000,00)	89,70
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas	267.000.000,00	207.182.100,00	(59.817.900,00)	77,60
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	298.140.000,00	289.181.004,00	(8.958.996,00)	97,00
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.467.000.000,00	1.346.372.797,00	(120.627.203,00)	91,78
	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
	9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	303.000.000,00	287.252.000,00	(15.748.000,00)	94,80
	F.1.4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	72.620.000,00	70.390.000,00	(2.230.000,00)	96,93
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	72.620.000,00	70.390.000,00	(2.230.000,00)	96,93

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.1.5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	3.520.602.500,00	3.086.336.545,00	(434.265.955,00)	87,67
	1. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	1.732.010.000,00	1.542.135.750,00	(189.874.250,00)	89,04
	2. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	551.132.500,00	454.343.500,00	(96.789.000,00)	82,44
	3. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	419.595.000,00	359.234.500,00	(60.360.500,00)	85,61
	4. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	684.540.000,00	631.240.750,00	(53.299.250,00)	92,21
	5. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	46.000.000,00	38.505.545,00	(7.494.455,00)	83,71
	6. Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Kemasyarakatan	87.325.000,00	60.876.500,00	(26.448.500,00)	69,71
	F.2. BAGIAN HUKUM				
	F.2.1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.330.665.000,00	1.303.470.337,00	(27.194.663,00)	97,96
	1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	326.340.000,00	325.080.922,00	(1.259.078,00)	99,61
	2. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	95.232.600,00	94.775.100,00	(457.500,00)	99,52
	3. Publikasi peraturan perundang-undangan	224.920.000,00	222.700.000,00	(2.220.000,00)	99,01
	4. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan perundang-undangan	296.267.400,00	294.117.300,00	(2.150.100,00)	99,27
	5. Penyelesaian sengketa hukum dan konsultasi hukum	387.905.000,00	366.797.015,00	(21.107.985,00)	94,56
	F.3. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
	F.3.1. Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	402.600.000,00	398.100.811,00	(1.656.939,00)	98,88
	1. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	157.820.000,00	156.163.061,00	(1.656.939,00)	98,95
	2. Koordinasi penyusunan LPPD	134.640.000,00	133.357.000,00	(1.283.000,00)	99,05
	3. Koordinasi penyusunan LKPJ	110.140.000,00	108.580.750,00	(1.559.250,00)	98,58
	F.4. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR				
	F.4.1. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	112.654.000,00	112.088.750,00	(565.250,00)	99,50
	1. Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	112.654.000,00	112.088.750,00	(565.250,00)	99,50

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.5. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				
	F.5.1. Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.219.973.300,00	2.208.227.286,00	(11.746.014,00)	99,47
	1. Penyelenggaraan kehumasan dan penyebarluasan informasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.219.973.300,00	2.208.227.286,00	(11.746.014,00)	99,47
	F.6. BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	F.6.1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	675.560.000,00	541.318.129,00	(134.241.871,00)	80,13
	1. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan Pelayanan Dasar	675.560.000,00	541.318.129,00	(134.241.871,00)	80,13
	F.7. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
	F.7.1. Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	970.932.857,00	929.330.857,00	(41.602.000,00)	95,72
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	970.932.857,00	929.330.857,00	(41.602.000,00)	95,72
	F.8. BAGIAN ORGANISASI				
	F.8.1. Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	299.559.500,00	294.956.750,00	(4.602.750,00)	98,46
	1. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	299.559.500,00	294.956.750,00	(4.602.750,00)	98,46
	F.8.2. Program Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah	399.676.000,00	399.259.000,00	(417.000,00)	99,90
	1. Koordinasi pengelolaan dan Pengembangan organisasi kelembagaan pemerintahan	399.676.000,00	399.259.000,00	(417.000,00)	99,90
	F.9. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA	13.916.881.286,00	13.647.734.404,00	(269.146.882,00)	98,07
	F.9.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.355.328.586,00	2.347.201.024,00	(8.127.562,00)	99,65
	F.9.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.480.808.666,00	6.332.996.472,00	(147.812.194,00)	97,72
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	4.497.500,00	(1.502.500,00)	74,96
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.500.000,00	381.122.939,00	(41.377.061,00)	90,21
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.500.000,00	42.500.000,00		100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	129.519.000,00	129.519.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	467.500.000,00	467.037.000,00	(463.000,00)	99,90
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.750.000,00	33.750.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000,00	61.460.625,00	(8.539.375,00)	87,80
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	549.250.000,00	524.987.050,00	(24.262.950,00)	95,58
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.445.039.666,00	2.440.022.358,00	(5.017.308,00)	99,79
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	2.314.750.000,00	2.248.100.000,00	(66.650.000,00)	97,12

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.9.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.884.767.500,00	1.826.617.060,00	(58.150.440,00)	96,91
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	519.400.000,00	519.321.000,00	(79.000,00)	99,98
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	152.500.000,00	152.361.000,00	(139.000,00)	99,91
	3. Pengadaan mebeleur	65.500.000,00	65.208.000,00	(292.000,00)	99,55
	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	290.475.000,00	289.803.000,00	(672.000,00)	99,77
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	574.192.500,00	517.772.060,00	(56.420.440,00)	90,17
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	282.700.000,00	282.152.000,00	(548.000,00)	99,81
	F.9.4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	436.000.000,00	434.350.000,00	(1.650.000,00)	99,62
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	436.000.000,00	434.350.000,00	(1.650.000,00)	99,62
	F.9.5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2.447.330.034,00	2.394.123.348,00	(53.206.686,00)	97,83
	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	296.735.700,00	276.197.014,00	(20.538.686,00)	93,08
	2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	783.254.000,00	759.881.000,00	(23.373.000,00)	97,02
	3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	782.500.000,00	773.205.000,00	(9.295.000,00)	98,81
	4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah	584.840.334,00	584.840.334,00	-	100,00
	F.9.6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	312.646.500,00	312.446.500,00	(200.000,00)	99,94
	1. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	312.646.500,00	312.446.500,00	(200.000,00)	99,94
	F.10. DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	12.423.831.718,00	6.073.579.964,00	(6.350.251.754,00)	48,89
	F.10.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.330.837.968,00	2.313.716.851,00	(17.121.117,00)	99,27
	F.10.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.285.790.150,00	1.265.900.588,00	(19.889.562,00)	98,45
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.300.000,00	21.449.497,00	(14.850.503,00)	59,09
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.950.000,00	6.947.600,00	(2.400,00)	99,97
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.150,00	30.000.150,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.400.000,00	52.397.414,00	(2.586,00)	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	106.595.000,00	104.075.927,00	(2.519.073,00)	97,64
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.038.025.000,00	1.035.530.000,00		99,76

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.10.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	165.390.000,00	161.561.525,00	(3.828.475,00)	97,69
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.000.000,00	8.997.040,00	(2.960,00)	99,97
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	105.600.000,00	101.804.485,00	(3.795.515,00)	96,41
	5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.290.000,00	7.260.000,00	(30.000,00)	99,59
	F.10.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.641.813.600,00	2.332.401.000,00	(6.309.412.600,00)	26,99
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	517.746.000,00	413.725.000,00	(104.021.000,00)	79,91
	F.10.5. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Ibadah	4.062.033.800,00	959.338.000,00	(3.102.695.800,00)	23,62
	1. Pembangunan Prasarana Ibadah	940.000.000,00	839.544.000,00	(100.456.000,00)	89,31
				-	
	F.10.6. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islami	1.561.016.900,00	59.897.000,00	(1.501.119.900,00)	3,84
	1. Penyediaan Sarana Pendidikan Islam	1.561.016.900,00	59.897.000,00	(1.501.119.900,00)	3,84
	F.11. KECAMATAN LANGSA KOTA	2.792.165.358,00	2.734.830.983,00	(57.334.375,00)	97,95
	F.11.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	2.027.855.358,00	1.993.403.131,00	(34.452.227,00)	98,30
	F.11.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	715.860.000,00	695.884.875,00	(19.975.125,00)	97,21
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00		100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.300.000,00	16.483.451,00	(10.816.549,00)	60,38
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.000.000,00	8.964.825,00		99,61
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	23.998.642,00		99,99
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.800.000,00	18.798.769,00	(1.231,00)	99,99
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	4.498.500,00	(1.500,00)	99,97
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.999.252,00		99,99
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	9.400.000,00	9.400.000,00		100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	45.000.000,00	43.597.436,00		96,88
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	570.460.000,00	562.744.000,00		98,65
	F.11.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.050.000,00	31.142.977,00	(2.907.023,00)	91,46
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	10.800.000,00	10.799.900,00	(100,00)	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	19.200.000,00	16.294.577,00	(2.905.423,00)	84,87
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	4.050.000,00	4.048.500,00	(1.500,00)	99,96
	F.11.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.12. KECAMATAN LANGSA BARAT	2.449.284.889,00	2.433.373.869,00	(15.911.020,00)	99,35
	F.12.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	1.787.169.546,00	1.779.340.758,00	(7.828.788,00)	99,56
	F.12.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	520.055.343,00	513.519.111,00	(6.536.232,00)	98,74
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	738.000,00	738.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000,00	16.091.591,00	(2.508.409,00)	86,51
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.039.543,00	17.039.543,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.225.000,00	11.225.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	442.800,00	442.800,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	6.880.000,00	6.880.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	43.650.000,00	43.640.177,00	(9.823,00)	99,98
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	413.280.000,00	409.262.000,00	(4.018.000,00)	99,03
	F.12.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	127.660.000,00	126.114.000,00	(1.546.000,00)	98,79
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	102.160.000,00	102.060.000,00	(100.000,00)	99,90
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	23.250.000,00	21.804.000,00	(1.446.000,00)	93,78
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00
	F.12.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00
	F.13. KECAMATAN LANGSA TIMUR	2.647.988.350,00	2.631.862.655,00	(16.125.695,00)	99,39
	F.13.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	1.905.327.100,00	1.898.523.139,00	(6.803.961,00)	99,64
	F.13.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	604.861.250,00	596.730.200,00	(8.131.050,00)	98,66
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.350.000,00	19.193.000,00	(7.157.000,00)	72,84
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.500.000,00	7.498.000,00	(2.000,00)	99,97
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.500.000,00	21.499.800,00	(200,00)	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.000,00	3.247.000,00	(3.000,00)	99,91
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	11.050.000,00	11.050.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	43.650.000,00	43.650.000,00	-	100,00
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	468.561.250,00	467.592.400,00	(968.850,00)	99,79

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.13.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.800.000,00	84.609.316,00	(1.190.684,00)	98,61
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31.800.000,00	30.609.316,00	(1.190.684,00)	96,26
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
	F.13.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52.000.000,00	52.000.000,00	-	100,00
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52.000.000,00	52.000.000,00	-	100,00
	F.14. KECAMATAN LANGSA LAMA	2.421.329.184,00	2.404.639.135,00	(16.690.049,00)	99,31
	F.14.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	1.788.771.184,00	1.778.813.699,00	(9.957.485,00)	99,44
	F.14.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	548.198.000,00	545.120.136,00	(3.077.864,00)	99,44
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	23.039.586,00	(960.414,00)	96,00
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.840.000,00	27.840.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	30.000.000,00	28.902.550,00	(1.097.450,00)	96,34
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	390.958.000,00	389.938.000,00	(1.020.000,00)	99,74
	F.14.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69.960.000,00	66.305.300,00	(3.654.700,00)	94,78
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	18.210.000,00	17.305.300,00	(904.700,00)	95,03
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	7.750.000,00	5.000.000,00	(2.750.000,00)	64,52
	F.14.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.15. KECAMATAN LANGSA BARÖ	2.426.092.003,00	2.359.233.371,00	(66.858.632,00)	97,24
	F.15.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	1.822.201.003,00	1.794.736.360,00	(27.464.643,00)	98,49
	F.15.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	536.626.000,00	498.817.232,00	(37.808.768,00)	92,95
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	960.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.000.000,00	15.937.992,00	(7.062.008,00)	69,30
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	63.000.000,00	62.931.740,00	(68.260,00)	99,89
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	393.866.000,00	363.187.500,00	(30.678.500,00)	92,21
	F.15.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43.715.000,00	42.129.779,00	(1.585.221,00)	96,37
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6.745.000,00	6.745.000,00	-	100,00
	2. Pengadaan mebeleur	8.920.000,00	8.920.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16.800.000,00	15.214.779,00	(1.585.221,00)	90,56
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00
	F.15.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.550.000,00	23.550.000,00	-	100,00
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23.550.000,00	23.550.000,00	-	100,00
	F.16. SEKRETARIAT BAITUL MAL	3.617.104.272,00	3.597.426.527,00	(19.677.745,00)	99,46
	F.16.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	739.146.407,00	723.340.177,00	(15.806.230,00)	97,86
	F.16.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	521.177.000,00	520.545.807,00	(631.193,00)	99,88
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.002.000,00	1.002.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	7.572.749,00	(427.251,00)	94,66
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.000.000,00	2.999.851,00	(149,00)	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	10.998.920,00	(1.080,00)	99,99
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	10.996.498,00	(3.502,00)	99,97
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	900.000,00	899.814,00	(186,00)	99,98
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	3.999.600,00	(400,00)	99,99
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.489.500,00	(10.500,00)	99,77
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	45.000.000,00	44.811.875,00	(188.125,00)	99,58
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	432.775.000,00	432.775.000,00	-	100,00
	F.16.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29.600.000,00	26.660.849,00	(2.939.151,00)	90,07
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.100.000,00	22.160.849,00	(2.939.151,00)	88,29
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.16.3. Program Peningkatan Peran Serta Baitul Mal	2.327.180.865,00	2.326.879.694,00	(301.171,00)	99,99
	1. Koordinasi Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf	2.327.180.865,00	2.326.879.694,00	(301.171,00)	99,99
	F.17. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	1.972.940.035,00	1.893.132.631,00	(79.807.404,00)	95,95
	F.17.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	1.477.643.035,00	1.408.477.903,00	(69.165.132,00)	95,32
	F.17.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	270.367.000,00	262.767.628,00	(7.599.372,00)	97,19
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	660.000,00	660.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.040.000,00	18.527.348,00	(7.512.652,00)	71,15
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.296.000,00	2.296.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.767.000,00	9.767.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.780.000,00	8.780.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.934.000,00	2.934.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	8.190.000,00	8.186.000,00	(4.000,00)	99,95
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	81.000.000,00	80.917.280,00	(82.720,00)	99,90
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	126.020.000,00	126.020.000,00	-	100,00
	F.17.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	224.930.000,00	221.887.100,00	(3.042.900,00)	98,65
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	204.500.000,00	204.500.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.400.000,00	13.887.100,00	(512.900,00)	96,44
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	6.030.000,00	3.500.000,00	(2.530.000,00)	58,04

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.18. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	887.396.549,00	859.419.438,00	(27.977.111,00)	96,85
	F.18.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	545.985.617,00	522.148.635,00	(23.836.982,00)	95,63
	F.18.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	317.890.932,00	316.826.688,00	(1.064.244,00)	99,67
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.892.000,00	1.776.000,00	(116.000,00)	93,87
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.140.000,00	6.232.796,00	(907.204,00)	87,29
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.876.182,00	1.876.182,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.746.110,00	13.705.070,00	(41.040,00)	99,70
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.877.640,00	4.877.640,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.044.000,00	1.044.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.575.000,00	2.575.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	20.080.000,00	20.080.000,00	-	100,00
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	259.220.000,00	259.220.000,00	-	100,00
	F.18.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.520.000,00	20.444.115,00	(3.075.885,00)	86,92
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.000.000,00	6.700.990,00	(2.299.010,00)	74,46
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.000.000,00	11.223.125,00	(776.875,00)	93,53
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00
	F.18.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.950.000,00	36.950.000,00	-	100,00
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36.950.000,00	36.950.000,00	-	100,00
	F.18.3. Program Peningkatan Peran Serta Majelis Pendidikan Daerah	33.868.000,00	33.868.000,00	-	100,00
	1. Peningkatan Kapasitas Komite Sekolah	33.868.000,00	33.868.000,00	-	100,00
	F.19. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	991.911.674,00	947.247.789,00	(44.663.885,00)	95,50
	F.19.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)	523.792.674,00	502.449.214,00	(21.343.460,00)	95,93
	F.19.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	385.619.000,00	364.753.410,00	(20.865.590,00)	94,59
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	750.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.400.000,00	7.739.035,00	(8.660.965,00)	47,19
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.350.000,00	16.350.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.799.000,00	2.799.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.385.000,00	(15.000,00)	99,38
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.478.000,00	(22.000,00)	99,51
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	72.000.000,00	70.344.875,00	(1.655.125,00)	97,70
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	261.920.000,00	251.407.500,00	(10.512.500,00)	95,99

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	F.19.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82.500.000,00	80.045.165,00	(2.454.835,00)	97,02
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
	3. Pengadaan mebeleur	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.300.000,00	4.604.860,00	(1.695.140,00)	73,09
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.000.000,00	11.240.305,00	(759.695,00)	93,67
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00
	JUMLAH	84.601.060.345,00	76.145.630.726,00	(8.455.429.619,00)	90,01

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan penunjang Administrasi Pemerintahan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan penunjang Administrasi Pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

2. Urusan Pengawasan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan penunjang pengawasan yaitu :

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah

SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan urusan penunjang pengawasan adalah Inspektorat sementara itu Sekretariat Daerah bertindak sebagai mitra kerja dengan pelaksanaannya mencakup sinkronisasi dan koordinasi.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan penunjang pengawasan Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 7 (tujuh) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Inspektorat
 - Pelaksanaan Program sebanyak 4 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 16 kegiatan
2. Sekretariat Daerah
 - Pelaksanaan Program sebanyak 3 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 kegiatan

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan penunjang pengawasan dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
b.	Temuan BPK yang ditindaklanjuti	79,08 %

Sumber : Inspektorat Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan penunjang pengawasan pada tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 7.920.575.487 dan terealisasi sebesar Rp. 7.814.583.595 atau sebesar 98,66 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan penunjang pengawasan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,77 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan penunjang Pengawasan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENGAWASAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
G.	URUSAN PENGAWASAN				
G.1.	INSPEKTORAT	6.274.076.987,00	6.226.026.995,00	(48.049.992,00)	99,23
G.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	4.356.946.987,00	4.343.075.608,00	(13.871.379,00)	99,68
G.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.450.530.000,00	1.438.278.422,00	(12.251.578,00)	99,16
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.650.000,00	2.647.000,00	(3.000,00)	99,89
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.350.000,00	63.986.000,00	(2.364.000,00)	96,44
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.000.000,00	6.912.488,00	(87.512,00)	98,75
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.330.000,00	39.324.576,00	(5.424,00)	99,99
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	33.935.959,00	(64.041,00)	99,81
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	31.650.000,00	31.643.735,00	(6.265,00)	99,98
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	315.200.000,00	315.196.664,00	(3.336,00)	100,00
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	946.350.000,00	936.632.000,00	(9.718.000,00)	98,97
G.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101.850.000,00	99.384.865,00	(2.465.135,00)	97,58
	1. Pengadaan Peralatan gedung kantor	28.400.000,00	28.379.400,00	(20.600,00)	99,93
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	4.989.436,00	(10.564,00)	99,79
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	51.300.000,00	48.913.887,00	(2.386.113,00)	95,35
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	17.150.000,00	17.102.142,00	(47.858,00)	99,72
G.1.4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	364.750.000,00	345.288.100,00	(19.461.900,00)	94,66
	1. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	150.500.000,00	146.048.100,00	(4.451.900,00)	97,04
	2. Inventarisasi temuan pengawasan	214.250.000,00	199.240.000,00	(15.010.000,00)	92,99

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT DAERAH				
	G.2. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR	80.378.500,00	80.255.000,00	(123.500,00)	99,85
	G.2.1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	39.104.500,00	38.233.000,00	(871.500,00)	97,77
	1. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah	39.104.500,00	38.233.000,00	(871.500,00)	97,77
	G.2.2. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	41.274.000,00	42.022.000,00	748.000,00	101,81
	1. Koordinasi kegiatan operaional dan pembinaan	41.274.000,00	42.022.000,00	748.000,00	101,81
	G.3. BAGIAN PEREKONOMIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA	1.566.120.000,00	1.508.301.600,00	(57.818.400,00)	96,31
	G.3.1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.566.120.000,00	1.508.301.600,00	(57.818.400,00)	96,31
	1. Koordinaasi pengawasan yang lebih komprehensif	1.566.120.000,00	1.508.301.600,00	(57.818.400,00)	96,31
	JUMLAH	7.920.575.487,00	7.814.583.595,00	(105.991.892,00)	98,66

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan fungsi penunjang pengawasan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan penunjang pengawasan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan penunjang pengawasan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

3. Urusan Perencanaan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan penunjang perencanaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah bagian Tata Pemerintahan. Bapedda bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan perencanaan sementara itu Sekretariat Daerah bertindak sebagai mitra kerja dengan pelaksanaannya mencakup sinkronisasi dan koordinasi.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam urusan penunjang perencanaan Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 8 (delapan) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pelaksanaan Program sebanyak 7 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 24 kegiatan
2. Sekretariat Daerah
 - Pelaksanaan Program sebanyak 1 program
 - Pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 kegiatan

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan penunjang pengawasan dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada
b.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada
c.	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada
d.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	55,97 %

Sumber : BAPEDDA Kota Langsa

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan penunjang perencanaan pada tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 8.250.075.217 dan terealisasi sebesar Rp. 8.058.169.881 atau sebesar 97,67 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan penunjang perencanaan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,79 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan penunjang Perencanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
H.	URUSAN PERENCANAAN				
H.1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.854.335.217,00	7.672.558.381,00	(181.776.836,00)	97,69
H.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	3.382.025.217,00	3.355.617.017,00	(26.408.200,00)	99,22
H.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.240.604.000,00	1.208.252.353,00	(32.351.647,00)	97,39
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.809.000,00	(191.000,00)	90,45
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.000.000,00	110.434.428,00	(10.565.572,00)	91,27
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	49.997.600,00	(2.400,00)	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000,00	47.250.000,00	(750.000,00)	98,44
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	5.972.900,00	(27.100,00)	99,55
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.975.000,00	(25.000,00)	99,58
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000,00	19.995.000,00	(5.000,00)	99,98
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	486.829.000,00	482.748.425,00	(4.080.575,00)	99,16
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	492.775.000,00	476.070.000,00	(16.705.000,00)	96,61
H.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	202.200.000,00	188.414.960,00	(13.785.040,00)	93,18
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	43.000.000,00	42.350.000,00	(650.000,00)	98,49
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	70.000.000,00	69.992.500,00	(7.500,00)	99,99
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.200.000,00	30.462.460,00	(12.737.540,00)	70,51
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	1.000.000,00	626.000,00	(374.000,00)	62,60
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	45.000.000,00	44.984.000,00	(16.000,00)	99,96
H.1.4.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	132.360.000,00	121.345.800,00	(11.014.200,00)	91,68
	1. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	132.360.000,00	121.345.800,00	(11.014.200,00)	91,68

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	H.1.5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.590.490.000,00	2.513.862.751,00	(76.627.249,00)	97,04
	1. Penyusunan rancangan RPJMD	782.072.000,00	725.938.803,00	(56.133.197,00)	92,82
	2. Penyusunan rancangan RKPD	645.918.000,00	645.918.000,00	-	100,00
	3. Koordinasi perencanaan bidang pembangunan sarana dan prasarana	141.000.000,00	131.136.300,00	(9.863.700,00)	93,00
	4. penyusunan dan pembahasan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	788.300.000,00	778.600.000,00	(9.700.000,00)	98,77
	5. Pelaksanaan Musrenbag desa/kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional	233.200.000,00	232.269.648,00	(930.352,00)	99,60
	H.1.6. Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	151.566.000,00	130.056.500,00	(21.509.500,00)	85,81
	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	67.970.000,00	49.935.300,00	(18.034.700,00)	73,47
	2. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	83.596.000,00	80.121.200,00	(3.474.800,00)	95,84
	H.1.7. Program Perencanaan sosial dan budaya	155.090.000,00	155.009.000,00	(81.000,00)	99,95
	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	155.090.000,00	155.009.000,00	(81.000,00)	99,95
H.2	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	395.740.000,00	385.611.500,00	(10.128.500,00)	97,44
	H.2.1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	395.740.000,00	385.611.500,00	(10.128.500,00)	97,44
	1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	395.740.000,00	385.611.500,00	(10.128.500,00)	97,44
	JUMLAH	8.250.075.217,00	8.058.169.881,00	(191.905.336,00)	97,67

Sumber : DPKA Kota Langsa

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan penunjang perencanaan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan penunjang perencanaan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan penunjang perencanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

4. Urusan Keuangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan penunjang keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan keuangan.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan penunjang keuangan Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan. Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan penunjang keuangan pada tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 31.470.558.122 dan terealisasi sebesar Rp. 30.332.074.725 atau sebesar 96,38 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan penunjang keuangan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 2,99 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan penunjang Keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
I.	URUSAN KEUANGAN				
I.1.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
I.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	14.748.980.146,00	14.637.480.675,00	(111.499.471,00)	99,24
I.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.629.552.500,00	2.455.751.400,00	(173.801.100,00)	93,39
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.320.000,00	10.260.000,00	(60.000,00)	99,42
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.601.500,00	437.499.306,00	(61.102.194,00)	87,75
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6.000.000,00	2.191.000,00	(3.809.000,00)	36,52
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.000.000,00	44.556.047,00	(443.953,00)	99,01
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	135.000.000,00	130.459.148,00	(4.540.852,00)	96,64
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	320.000.000,00	319.295.000,00	(705.000,00)	99,78
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	29.377.799,00	(622.201,00)	97,93
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	90,00
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	119.500.000,00	119.270.000,00	(230.000,00)	99,81
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	410.443.000,00	408.121.931,00	(2.321.069,00)	99,43
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.048.688.000,00	949.321.169,00	(99.366.831,00)	90,52
I.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.567.545.165,00	5.508.110.895,00	(59.434.270,00)	98,93
	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	3.870.292.965,00	3.870.292.965,00	-	100,00
	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	396.052.200,00	394.655.000,00	(1.397.200,00)	99,65
	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	269.000.000,00	269.000.000,00	-	100,00
	4. Pengadaan Mebeleur	135.000.000,00	132.635.000,00	(2.365.000,00)	98,25
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	544.000.000,00	542.976.000,00	(1.024.000,00)	99,81
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	108.700.000,00	54.142.930,00	(54.557.070,00)	49,81
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	244.500.000,00	244.409.000,00	(91.000,00)	99,96

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	I.1.4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.524.480.311,00	7.730.731.755,00	(793.748.556,00)	90,69
	1. Penyusunan Analisa Standar Belanja	79.940.000,00	79.146.400,00	(793.600,00)	99,01
	2. Penyusunan Standar Satuan Harga	85.140.000,00	83.502.640,00	(1.637.360,00)	98,08
	3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1.591.235.657,00	1.507.973.960,00	(83.261.697,00)	94,77
	4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1.503.302.111,00	1.459.431.677,00	(43.870.434,00)	97,08
	5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	915.630.000,00	835.621.626,00	(80.008.374,00)	91,26
	6. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	418.870.000,00	132.033.390,00	(286.836.610,00)	31,52
	7. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	58.320.000,00	-	(58.320.000,00)	0,00
	8. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	120.320.000,00	-	(120.320.000,00)	0,00
	9. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	516.359.193,00	504.422.583,00	(11.936.610,00)	97,69
	10. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	683.575.000,00	658.339.070,00	(25.235.930,00)	96,31
	11. Peningkatan Manajemen Penatausahaan Perbendaharaan	1.309.791.350,00	1.298.585.279,00	(11.206.071,00)	99,14
	12. Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah	387.940.000,00	364.421.760,00	(23.518.240,00)	93,94
	13. Sensus Barang Milik Daerah	210.780.000,00	201.781.520,00	(8.998.480,00)	95,73
	14. Peningkatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan	643.277.000,00	605.471.850,00	(37.805.150,00)	94,12
	JUMLAH	31.470.558.122,00	30.332.074.725,00	(1.138.483.397,00)	96,38

Sumber : DPKA Kota Langsa

e. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan penunjang keuangan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan konkuren.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan penunjang keuangan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan penunjang keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

h. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

5. Urusan Kepegawaian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan penunjang Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, yang juga bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan Kepegawaian.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam urusan penunjang kepegawaian Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan penunjang kepegawaian pada tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 8.627.164.579 dan terealisasi sebesar Rp. 8.497.165.054 atau sebesar 98,49 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pemerintahan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,83 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan penunjang Perencanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
J.	URUSAN KEPEGAWAIAN				
J.1.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM				
J.1.1.	Non Program (Belanja Tak Langsung)	6.632.555.947,00	6.558.036.187,00	(74.519.760,00)	98,88
J.1.2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	964.149.172,00	942.828.369,00	(21.320.803,00)	97,79
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000,00	121.426.751,00	(9.573.249,00)	92,69
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.020.012,00	5.020.012,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	72.943.167,00	72.943.167,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.300.000,00	13.150.000,00	(150.000,00)	98,87
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.629.384,00	4.629.384,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	3.420.000,00	(2.580.000,00)	57,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	47.500.000,00	47.498.000,00	(2.000,00)	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	313.626.609,00	313.491.055,00	(135.554,00)	99,96
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	366.980.000,00	358.100.000,00	(8.880.000,00)	97,58
J.1.3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	71.638.000,00	69.918.038,00	(1.719.962,00)	97,60
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	34.100.000,00	32.380.038,00	(1.719.962,00)	94,96
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	12.538.000,00	12.538.000,00	-	100,00
J.1.4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	958.821.460,00	926.382.460,00	(32.439.000,00)	96,62
	1. Penyusunan rencana pembinaan karir ASN	211.020.000,00	205.750.000,00	(5.270.000,00)	97,50
	2. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	31.810.948,00	30.552.948,00	(1.258.000,00)	96,05
	3. Penyusunan instrumen analisis jabatan ASN	37.912.000,00	35.874.000,00	(2.038.000,00)	94,62
	4. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	640.403.512,00	616.665.512,00	(23.738.000,00)	96,29
	5. Penerapan aplikasi kepegawaian berbasis media center	37.675.000,00	37.540.000,00	(135.000,00)	99,64
	JUMLAH	8.627.164.579,00	8.497.165.054,00	(129.999.525,00)	98,49

e. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan penunjang Kepegawaian dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan konkuren.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan penunjang Kepegawaian masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan penunjang Kepegawaian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

h. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

6. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, yang juga bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyelenggara Urusan penunjang urusan Pendidikan dan Pelatihan.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam urusan penunjang pendidikan dan pelatihan Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan penunjang pendidikan dan pelatihan dapat kami uraikan sebagai berikut :

**PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR
DALAM BENTUK PEMBERIAN IZIN DAN TUGAS BELAJAR
TAHUN 2017**

No	JENIS PENJABARAN	TINGKAT PENDIDIKAN LANJUTAN DAN PROFESI					JUMLAH
		D3	S1	S2	S3	Spesialis	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	IZIN BELAJAR	25	90	10	0	-	125
2.	TUGAS BELAJAR	0	0	4	0	-	4
JUMLAH		25	90	14	0	-	129

Sumber : BKPP Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan penunjang pendidikan dan pelatihan pada tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 527.452.000 dan terealisasi sebesar Rp. 522.283.300 atau sebesar 99,02 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pemerintahan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,05 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan penunjang pendidikan dan pelatihan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
K.	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	K.1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM				
	K.1.2. Program Pendidikan Kedinasan	527.452.000,00	522.283.300,00	(5.168.700,00)	99,02
	1. Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme	36.265.000,00	35.352.000,00	(913.000,00)	97,48
	2. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	491.187.000,00	486.931.300,00	(4.255.700,00)	99,13
	JUMLAH	527.452.000,00	522.283.300,00	(5.168.700,00)	99,02

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan penyelenggara Urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan konkuren.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan penunjang pendidikan dan pelatihan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan penyelenggara Urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

7. Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertindak juga sebagai penanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan.

b. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan penunjang penelitian dan pengembangan dapat kami uraikan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
a.	Buku "Kota dalam angka"	ada
b.	Buku "PDRB Kota"	ada

Sumber : BPS Kota Langsa

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Urusan penunjang penelitian dan pengembangan pada tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 233.180.000 dan terealisasi sebesar Rp. 230.798.300 atau sebesar 98,98 %. Sementara itu realisasi belanja Urusan penunjang Penelitian

dan Pengembangan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,02 %.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
L.	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	L.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	L.1.2. Program Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	233.180.000,00	230.798.300,00	(2.381.700,00)	98,98
	1. Kajian dan Penelitian Ekonomi dan Pengembangan Daerah	233.180.000,00	230.798.300,00	(2.381.700,00)	98,98
	JUMLAH	233.180.000,00	230.798.300,00	(2.381.700,00)	98,98

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Urusan penunjang penelitian dan pengembangan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Urusan penunjang penelitian dan pengembangan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Urusan penunjang penelitian dan pengembangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.

3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
 - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2017

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pembangunan Manusia Dan Masyarakat

Dalam prioritas pembangunan nasional urusan pembangunan manusia dan masyarakat ada 33 program Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
12. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
14. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
15. Program Pengembangan Perumahan
16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
17. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

18. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya
19. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
20. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
21. Program Keluarga Berencana
22. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
23. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
24. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
25. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
26. Program perencanaan sosial dan budaya
27. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
28. Program Pengawasan, Pencegahan Dan Penertiban Pelaksanaan Syariat Islam
29. Program Pembinaan Dan Pengembangan Syiar Islam
30. Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah
31. Program Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Islami
32. Program Peningkatan Peran Serta Ulama
33. Program Peningkatan Peran Serta Majelis Pendidikan Daerah

2. Pembangunan Sektor Unggulan

Dalam prioritas pembangunan nasional urusan pembangunan sektor unggulan ada 8 program Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan :

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
8. Program Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah

3. Pemerataan Dan Kewilayahan

Dalam prioritas pembangunan nasional urusan Pemerataan Dan Kewilayahan ada 16 program Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
3. Program pembangunan turap/talud/bronjong
4. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
5. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7. Program Pengendalian Banjir
8. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
9. Program Perencanaan Tata Ruang
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
13. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
14. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
15. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
16. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

4. Pembangunan Politik, hukum, Pertanahan Dan Keamanan

Dalam prioritas pembangunan nasional urusan Pembangunan Politik, hukum, pertanahan dan keamanan ada 32 program Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
6. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8. Program kerjasama informasi dengan mas media
9. Program Pengawasan Menara Telekomunikasi
10. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
11. Program penyelenggaraan komunikasi persandian
12. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
14. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
17. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
18. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
19. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
20. Program pengembangan wawasan kebangsaan

21. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
22. Program Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan
23. Program Pembinaan Dan Pengembangan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara
24. Program Pengembangan Data/Informasi
25. Program perencanaan pembangunan daerah
26. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
28. Program Pendidikan Kedinasan
29. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
30. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
31. Program Pendidikan Politik Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Pembangunan Ekonomi

Dalam prioritas pembangunan nasional urusan Pembangunan ekonomi ada 8 program Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan :

1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan
2. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
3. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program perencanaan pembangunan ekonomi
8. Program Peningkatan Peran Serta Baitul Mal

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektifitas, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu yang pendanaannya dibebankan kepada Belanja Daerah. Adapun bentuk kegiatan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kerjasama Dengan Universitas Samudera Langsa

Kegiatan ini dimaksud untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan saling memberikan manfaat untuk mendukung pengembangan kedua institusi dengan ruang lingkup meliputi pertukaran informasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pesisir dan pelibatan tim sebagai tenaga ahli.

2. Kerjasama Dengan PLN Wilayah Aceh

Kerjasama ini dilakukan terkait persoalan penyelesaian pembayaran pemakaian listrik untuk kepentingan kota dan fasilitas umum. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan di aula PLN Aceh pada tanggal 20 oktober 2017.

3. Kerjasama Dengan PT. Pelabuhan Kota Langsa

Kerjasama ini dilaksanakan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau taman hutan Kota Langsa dan Pengelolaan fasilitas Ekowisata Hutan mangrove kuala Langsa. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk MoU dengan nomor 551.43/2488/2017 109/PEKOLA/VIII/2017.

4. Kerjasama Dengan PT. Biomasa Energy Abadi

Kerjasama ini dilaksanakan untuk pelaksanaan pembangunan pembangkit pembangkit listrik tenaga biomasa (PLTBM) di desa timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk MoU dengan nomor 670/1959/2017 027/MOU/BEA/VII/2017.

5. Kerjasama Dengan PT. Perkebunan Nusantara I

Kerjasama ini dilaksanakan untuk pinjam pakai lahan tanah PTPN I untuk pasar tradisional pemerintah Kota Langsa. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk MoU dengan nomor 01.6.4/X/ADDM/06/2017 592/2397/2017.

6. Kerjasama Dengan Yayasan Dompot Dhuafa Republika

Kerjasama ini mencakup ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan program ekonomi, kesehatan, pendidikan di Kota Langsa. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk MoU dengan nomor 400/1753/2017 dan nomor 083/MOU/DD.PROGRAM-LEGAL/VI/2017.

7. Kerjasama Dengan Perum Bulog

Kerjasama ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan belanja bantuan Beras Sejahtera. kerjasama ini dituangkan dalam bentuk MoU dengan nomor 411-1/1211/2017 dan nomor B-150 A/01 B 00/ 04 / 2017

B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

Koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah mengingat keterbatasan otorisasi bidang kewenangan yang dimiliki. Dalam

pelaksanaannya, pemerintah Kota Langsa melakukan koordinasi dan sinkronisasi agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat saling mendukung.

oleh karena itu intensitas kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal perlu ditingkatkan dalam rangka mengoptimalkan program dan kebijakan pemerintah. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koordinasi Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Langsa guna membantu Pemerintah Kota Langsa dalam menyelesaikan masalah hukum perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam jajaran pemerintah kota Langsa.

2. Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Ibadah Haji

Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung Bagian Keistimewaan Aceh dan kesra Setda Kota Langsa dalam kerjasama peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan mitra pelaksana Kantor Kementerian Agama Kota Langsa Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 675.560.000,-.

3. Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Islam

Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung Bagian Keistimewaan Aceh dan kesra Setda Kota Langsa dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar Islam dengan mitra pelaksana adalah Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dan Polres Kota Langsa. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 1.866.464.000,-.

4. Koordinasi forum-forum diskusi politik

Kegiatan ini dimaksud untuk mendeteksi gangguan stabilitas keamanan daerah, kewaspadaan terhadap konflik sosial dan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. SKPK penyelenggara adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Langsa dengan mitra instansi vertikal adalah Polres Langsa, Kodim 0104 Aceh Timur, Kejaksaan dan Kantor imigrasi. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi untuk KOMINDA sebesar Rp. 99.760.120,- FKDM sebesar Rp.116.177.120,- dan tim terpadu penanganan konflik sebesar Rp.157.232.120,-.

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (RAKORPIMDA)

Kegiatan ini dimaksud untuk membahas isu-isu aktual yang timbul dan berkembang dalam masyarakat untuk dibahas dan cari solusi yang terbaik, SKPK penyelenggara adalah Bahagian Pemerintahan umum pada sekretariat Daerah, dengan peserta rapat unsur Muspida dan Muspida Plus serta para kepala SKPK dan Kepala instansi vertikal lainnya dalam Kota Langsa. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 157.820.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 153.351.061,-.

6. Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan perlindungan kepada perempuan terhadap tindak kekerasan, SKPK penyelenggara adalah Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan mitra instansi vertikal adalah Polres Langsa dan Kejaksaan. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa

dengan alokasi sebesar Rp. 647.457.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 632.352.368,-.

C. Pembinaan Batas Wilayah

Pembinaan batas wilayah Kota Langsa terus dilaksanakan setiap tahunnya untuk menghindari permasalahan yang mungkin timbul dengan Kabupaten Induk (Kabupaten Aceh Timur) dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kejelasan tapal batas dengan kedua kabupaten tersebut sangat diperlukan terkait sumber daya alam dan aset-aset yang telah diserahkan oleh kabupaten induk. Batas alam yang digunakan selama ini seperti, sungai, jalan, gunung dan lainnya perlu dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan titik kordinat geografis yang jelas. Hal ini dikarenakan batas-batas alam tersebut sewaktu-waktu dapat berubah atau hilang akibat bencana alam dan prilaku manusia.

Pemerintah Kota Langsa juga melakukan pembinaan batas kecamatan dan gampong sehubungan adanya pemekaran gampong dalam kota langsa.

Adapun SKPK penyelenggara pembinaan batas wilayah adalah Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Langsa. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 395.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 372.096.500,-.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Perubahan iklim yang sangat ekstrim saat ini sangat mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana-bencana yang tak terduga. tanggap bencana merupakan solusi cepat dan tepat dalam menghadapi kondisi tersebut. Disamping perubahan iklim, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah juga menjadi salah satu kendala dalam penanganan pencegahan bencana.

Dalam menghadapi tantangan tersebut pemerintah khususnya Kota Langsa telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam konteks tersebut, pemerintah Kota Langsa mengambil kebijakan untuk melakukan peningkatan kapasitas pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, mengingat Kota Langsa yang terletak di pulau Sumatera yang secara geografis rawan terhadap bencana alam. Adapun kebijakan pencegahan tersebut yaitu :

1. Program Pengendalian banjir, dengan alokasi dana sebesar Rp. 11.102.458.572,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.057.082.000,-
2. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.748.353.908,-

Adapun SKPK penyelenggara kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana adalah Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum.

E. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu syarat untuk bekerjanya sistem pemerintahan, hal demikian ditandai dengan adanya iklim yang kondusif. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan, konflik sosial dan model demonstrasi yang cenderung anarkis dan tak terkendali. Masyarakat Kota Langsa merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan etnis sehingga potensi konflik sangat besar kemungkinannya.

Kondisi ketertiban dan keamanan di Kota Langsa tahun 2017 secara umum relatif kondusif. Gangguan atau konflik yang terjadi yang berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya yang sifatnya dapat memicu konflik lainnya dapat dikatakan tidak terjadi di Kota Langsa, dan walaupun ada yang mengarah ke konflik tersebut dapat diatasi bersama oleh pihak TNI, POLRI dan Pemerintah Kota Langsa.

Adapun Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksud secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

SKPD Penyelenggara : Badan Kesbanpol dan Linmas
Plafon anggaran : Rp. 899.117.799,-
Realisasi anggaran : Rp. 886.578.684,-
Sumber dana : APBK Kota Langsa

2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

SKPD Penyelenggara : Satpol PP dan WH Kota Langsa
Plafon anggaran : Rp. 150.628.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 148.574.000,-
Sumber dana : APBK Kota Langsa

3. Penjaringan gelandangan ,pengemis dan orang gila

SKPD Penyelenggara : Dinas Sosial Kota Langsa
Plafon anggaran : Rp. 100.000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 98.784.000,-
Sumber dana : APBK Kota Langsa

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Langsa tahun 2017 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Langsa dalam berbagai bidang yang dijabarkan dalam sektor-sektor kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kota Langsa merupakan prioritas dalam pembangunan daerah yang menitik beratkan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak pula kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Langsa sehingga diharapkan untuk pembangunan ke depan akan lebih berhasil.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, Pemerintah Kota Langsa telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2017, dan sekaligus ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi didalam penyusunan laporan ini.

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2017**

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN										PEJABAT STRUKTURAL/ESELON				Tenaga Fungsional Umum dan Tertentu)	KET
		I	II	III	IV		LK	PR	S-3	S-2	S-1	DIPLOMA				SMA/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SD/ Sederajat	I	II	III	IV		
												I	II	III	IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Sekretariat Daerah	1	34	96	20	151	84	67	-	15	120	0	0	1	6	8	1	0	0	6	9	33	103	
2	Sekretariat DPRK	0	15	20	5	40	24	16	-	1	18	0	0	2	0	19	0	0	0	1	4	10	25	
3	Inspektorat	0	7	32	12	51	28	23	-	5	36	0	0	3	1	6	0	0	0	1	4	3	43	
4	Dinas Kesehatan	0	60	45	14	119	17	102	-	8	32	1	55	14	3	6	0	0	0	1	3	10	105	
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	6	28	4	39	21	18	-	3	27	0	0	3	1	4	1	0	0	1	3	7	28	
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	23	75	4	103	59	44	-	6	63	0	0	9	0	24	1	0	0	1	6	17	79	
7	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	0	6	30	6	42	23	19	-	3	29	0	0	3	2	4	1	0	0	1	5	12	24	
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	11	54	47	112	59	53	-	9	81	0	3	3	0	16	0	0	0	1	8	17	86	
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	28	56	3	87	69	18	-	2	42	0	0	5	1	37	0	0	0	1	6	18	62	
10	Kantor Satpol PP dan WH	0	14	18	2	34	24	10	-	0	14	0	0	2	0	18	0	0	0	1	3	6	25	
11	Dinas Sosial	1	10	17	4	32	18	14	-	3	18	0	0	1	0	9	1	0	0	1	2	10	19	
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	11	27	7	45	14	31	-	2	25	0	0	4	0	14	0	0	0	1	5	11	28	
13	Dinas Lingkungan Hidup	40	67	18	4	129	94	35	-	2	21	0	1	1	0	64	20	20	0	1	4	10	117	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	16	20	5	41	26	15	-	1	20	0	0	5	0	13	2	0	0	1	4	12	24	
15	Dinas komunikasi dan Informatika	1	8	14	3	26	20	6	-	1	14	0	0	2	0	8	1	0	0	1	3	7	26	
16	Dinas Perhubungan	0	4	12	2	18	14	4	-	1	11	0	0	4	0	2	0	0	0	1	3	7	8	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	8	18	5	31	15	16	-	2	19	0	0	1	0	9	0	0	0	1	5	10	16	
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1	10	15	5	31	19	12	-	1	17	0	0	0	2	10	1	0	0	1	5	10	31	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	9	11	3	23	12	11	-	4	9	0	0	1	0	9	0	0	0	1	4	8	11	
20	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	0	26	55	7	88	39	45	-	6	55	0	0	1	0	26	0	0	0	1	4	20	59	
21	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM	0	6	28	3	37	15	12	-	3	28	0	0	2	0	4	0	0	0	1	4	12	20	
22	Dinas Syariah Islam	0	3	23	4	30	14	16	-	1	24	0	0	1	0	4	0	0	0	1	4	13	9	
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	1	6	11	6	24	14	10	-	1	17	0	0	3	0	2	1	0	0	0	4	13	4	
24	Rumah Sakit Umum Daerah	13	71	367	83	534	50	484	-	36	342	2	0	56	0	98	0	0	0	0	8	11	514	
25	Sekretariat MAA	0	2	1	0	3	3	0	-	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	
26	Sekretariat KIP	0	7	11	1	19	11	8	-	0	13	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	3	15	
27	Sekretariat MPU	0	6	6	1	13	9	4	-	0	7	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	2	8	
28	Sekretariat MPD	1	3	2	2	8	6	2	-	1	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	2	5	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	8	16	4	28	22	6	-	3	15	0	0	0	0	10	0	0	0	0	4	11	17	
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	3	19	3	26	11	15	-	2	15	0	0	2	0	6	1	0	0	0	4	10	11	
31	Sekretariat Baitul Mal	0	4	8	1	13	10	3	-	0	9	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	10	
32	Kecamatan Langsa Barat	1	19	10	1	31	23	8	-	1	8	0	0	0	2	19	1	0	0	0	2	7	22	
33	Kecamatan Langsa Timur	1	10	19	1	31	19	12	-	0	13	1	1	2	1	12	1	0	0	0	2	7	22	
34	Kecamatan Langsa Kota	2	19	13	0	34	18	16	-	3	10	0	0	2	2	15	0	2	0	0	2	7	25	
35	Kecamatan Langsa Lama	2	19	9	1	31	22	9	-	1	9	0	0	1	1	17	2	0	0	0	2	7	22	
36	Kecamatan Langsa Baro	1	17	10	2	30	8	12	-	3	4	0	0	1	2	19	1	0	0	0	2	7	21	
37	Puskesmas Langsa Kota	0	9	75	7	91	19	72	-	1	24	5	0	46	3	12	0	0	0	0	2	7	82	
38	Puskesmas Langsa Timur	0	14	51	6	71	12	59	-	0	17	0	0	33	0	21	0	0	0	0	2	7	62	
39	Puskesmas Langsa Baro	0	8	76	10	94	5	89	-	1	33	0	0	40	2	16	0	0	0	0	2	7	85	
40	Puskesmas Langsa Barat	0	22	43	5	70	12	58	-	1	13	12	0	32	0	12	0	0	0	0	2	7	61	
41	Puskesmas Langsa Lama	0	26	45	2	73	13	60	-	1	19	3	0	38	0	12	0	0	0	0	2	7	64	
42	TK	0	10	23	24	57	0	10	-	0	1	34	0	12	1	0	9	0	0	0	0	0	57	
43	SD	7	31	204	383	625	213	412	-	8	578	1	10	10	0	11	5	2	0	0	0	0	625	
44	SLTP	3	39	240	234	516	212	304	-	8	390	15	9	48	0	40	4	2	0	0	0	0	516	
45	DPB	0	1	15	4	20	9	11	-	1	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	JUMLAH	79	736	1986	950	3751	1429	2251	0	151	2282	74	79	395	30	658	54	26	0	27	141	389	3218	

Sumber : BKPP Kota Langsa

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	ada/tidak ada PERDA	ada/tidak ada PERDA IMB	Ada/tidak	ada	ada	PERDA Nomor : 7 Tahun 2014 tentang bangunan gedung
			2	Rasio Rumah ber IMB	% Jumlah Rumah ber IMB	Jumlah rumah ber IMB sd Akhir tahun 2017	Unit	1246	2,76	Sumber Data: Dinas PU/KP2T
						Jumlah seluruh rumah s.d akhir tahun 2017	Unit	45098		
		3	Keberadaan PERDA RTRW	ada/tidak ada PERDA	ada/tidak ada PERDA RTRW	Ada/tidak	ada	ada	Qanun Nomor: 12 Tahun 2013 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032	
		Peraturan ttg Kependudukan	4	Pengurusan e - KTP	Jumlah penduduk yang telah terekam dalam e KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam e - KTP	org	96.035	70,25	Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						- Jumlah penduduk yang wajib ber KTP	jiwa	136.697		
		5	Biaya KTP	Biaya Pengurusan KTP dalam PERDA	Perda	Rp /KTP	0	100,00	Dasar hukum : Qanun Nomor 17 tahun 2015 adm kependudukan.	
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk (Personil Satpol PP Per 10.000 Penduduk)	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2015 dibagi jumlah penduduk akhir tahun 2015 x 10.000 penduduk	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2017	orang	40	2,08	Sumber Data: Kantor Satpol PP dan WH
						Penduduk pada akhir tahun 2017	Jiwa	192.241		
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS	ada/tidak ada PERDA	ada/tidak ada PERDA PSK, PKL atau PMKS	Ada/tidak	ada	ada	Qanun Kota Langsa No 14 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima
Peraturan tentang Kebersihan Ibukota Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota	ada/tidak ada PERDA Kebersihan Kota	ada/tidak ada PERDA Kebersihan Kota	Ada/ tidak	ada	ada	Qanun No 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah		

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Tanggal Penyampaian LPPD 2017 (tanggal/bulan/tahun)	Ada	ada		31-Mar-17
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2017 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)		28/03/2018		
			11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2017 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian	30/03/2017	Tidak	
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah urusan wajib yang telah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND	Urusan yang telah diterapkan	Jumlah		6	Foto copy program setiap urusan yang ada di dalam RPJM/RKPD
						1. Urusan Pendidikan	sudah/belum	sudah		
						2. Urusan Kesehatan	sudah/belum	sudah		
						3. Urusan PU dan Penataan Ruang	sudah/belum	sudah		
						4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	sudah/belum	sudah		
						5. Urusan Trantibum dan Linmas	sudah/belum	sudah		
						6. Urusan Sosial	sudah/belum	sudah		
		Kerjasama antar daerah Kab/kota	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2017	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2017	Jumlah	10	10	No & tgl MoU diisi pada kolom 9 elemen data dan ttg diisi pada kolom 11 keterangan
								050/3972-IV/522.5/2474/2017/28 agustus 2017		pengelolaan lingkungan hidup mangrove kuala langsa pada KPH wilayah III Aceh
								551,43/2488/2017/109/PEKOLA/VIII/2017/29 agustus 2017		pengelolaan ruang terbuka hijau taman hutan kota langsa dan pengelolaan fasilitas ekowisata hutan mangrove kuala
								670/1959/2017/027/MOU/BEA/VII/2017/17 juli 2017		pembangunan pembangkit listrik tenaga biomasa (PLTBM) di desa timbang langsa kecamatan langsa baru
								01.6.4/X/ADDM/06/2017/592/2397/2017/21 agustus 2017		pinjam pakai tanah PTPN.I untuk pasar tradisional pemerintah kota langsa

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								429/UN54.1/LT/2017 420/608/2017 21 agustus 2017		perjanjian kerjasama dengan fakultas hukum universitas samudra
								445/ADM-III/PKS-008/2017 276.a/800/2017 20 februari 2017		puskesmas langsa barat dengan dinas pangan, pertanian, kelautan dan perikanan Kota langsa
								400/1753/2017 083/MOU/DD. PROGRAM-LEGAL/VI/2017 20 juni 2017		pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di kota langsa dengan yayasan dompet dhuafa republica
								180/430/2017 159/NPHD/KIP. Kota Langsa/VI/2017 13 juni 2017		pemberian hibah uang kepada komisi independen pemilu kota langsa tahun 2017
								180/430/2017 B-002/N.1.14/Gs/02/2017 13 februari 2017		naskah kerjasama tahun 2017 bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan kejaksaan negeri langsa
								411-1/1211/2017 B-150 1/01 B 00/04/2017 17 april 2017		Kegiatan Belanja Bantuan berasa sejahtera
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional	Program	5	100,00	- Perwal no.27 tahun 2016 tentang perubahan rencana kerja pembangunan kota langsa tahun 2016. - Permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.
						Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas	Program	5		
		Kewenangan	15	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007)x 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada tahun 2017	Urusan	19	100,00	
		Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2017	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2017	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2017	tgl penetapan	16 januari 2017	tidak	
			17	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Ada/tidak	ada	ada	Qanun Nomor : 14 Tahun 2015 tentang perubahan atas qanun kota langsa nomor 2 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	ASPEK	FOKUS	4	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN				
								Elemen Data	Capaian Kinerja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
			18	belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%	Total Belanja pelayanan dasar APBK Tahun 2017	Rp		46,26					
						1. Urusan Pendidikan	Rp	29.355.370.909,00						
						2. Urusan Kesehatan	Rp	160.461.779.675,00						
						3. Urusan PU dan Penataan Ruang	Rp	238.996.482.122,00						
						4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	16.379.311.000,00						
						5. Urusan Trantibum dan Linmas	Rp	24.474.281.954,00						
						6. Urusan Sosial	Rp	4.465.015.000,00						
						Total Belanja pelayanan dasar		474.132.240.660,00						
						Total Belanja APBK	Rp	1.024.868.402.935,00						
			19	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100 %	Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan	Rp		18,52					
						1. Urusan Pendidikan	Rp	29.355.370.909,00						
						2. Urusan Kesehatan	Rp	160.461.779.675,00						
						Total Belanja Pendidikan dan Kesehatan		189.817.150.584,00						
						Total Belanja APBK	Rp	1.024.868.402.935,00						
						Pelayanan publik	20	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	ada/tidak PERDA tentang Standar Pelayanan Publik	Ada/tidak	ada	ada	1) Qanun Kota Langsa No. 12 Tahun 2014 tentang transparansi pelayanan publik
						Kepegawaian	21	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kota dibagi Jumlah Penduduk	Jumlah PNS Kota akhir tahun 2017	orang	3751	1,95	
										Penduduk pada akhir tahun 2017	Jiwa	192.241		
									22	Keberadaan sistem informasi kepegawaian	ada atau tidak adanya data base kepegawaian	1. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian SAPK	Ada/tidak	ada
2. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian SIMDA	Ada/tidak	ada												
Kelembagaan			23	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016	Jumlah SKPD	Unit	36	36					
						1. Bagian (setda)	Unit	9						
						2. Dinas	Unit	11						
						3. Badan	Unit	8						
						4. Kantor	Unit	2						

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5. Rumah Sakit	Unit	1		
						6. Lembaga Teknis lainnya	Unit	0		
						7. Kecamatan / Distrik	Unit	5		
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	Perda yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017	PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017	Perda	6	6	
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	25	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2017	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017	Raperda	12	100,00	
						RAPERDA yang diusulkan tahun 2017	Raperda	12		
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2017 x 100%	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017	Kep	6	100,00	
						Keputusan DPRD dalam tahun 2017	Kep	6		
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	tindaklanjuti keputusan Walikota	27	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2017 x 100%	Keputusan Walikota tahun 2017 yang ditindaklanjuti	Kep	526	100,00	
						Keputusan Walikota tahun 2017	Kep	526		
		tindaklanjuti Peraturan Walikota	28	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah peraturan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah peraturan Bupati dalam tahun 2017 x 100%	Peraturan Walikota tahun 2017 yang ditindaklanjuti	PerWal	56	100,00	
						Peraturan Walikota tahun 2017 yang ditindaklanjuti	PerWal	56		
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah Perda yang dibatalkan dibagi jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	PERDA yang dibatalkan	Perda	0	0,00	
						PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah	Perda	12		
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/Perwal tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA / Perwal	ada/tidak ada PERDA/Perwal tentang konsultasi publik	Ada/tidak	ada	ada	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun tentang (konsultasi publik)
		Media informasi pmda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pmda yang dapat diakses oleh publik (website Kota, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan PerWal	1. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #1	Media informasi	Humas.setda.langsakota.go.id	ada	Print out halaman depan
						2. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #2	Media informasi	www.langsakota.go.id		Print out halaman depan

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK, DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017	Rp	677.192.132.793,00	99,71	
						Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBK tahun 2017	Rp	679.185.589.918,00		
		Alokasi belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	Belanja Langsung (Realisasi) thn 2017	Rp	595.316.032.532,75	134,08	
						DAU Tahun 2017	Rp	444.012.586.000,00		
	Alokasi belanja pada APBD	34	Belanja Publik terhadap total APBD	Total Belanja Langsung dibagi APBD x 100%	Total Belanja langsung tahun 2017 (realisasi)	Rp	595.316.032.532,35	58,75		
					Total Belanja APBD tahun 2017 (realisasi)	Rp	1.013.221.642.589,01			
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) x 100%	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2017	Rp	118.472.175.308,75	11,69	
						Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017	Rp	1.013.221.642.589,01		
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Lapkeu	36	Opini BPK terhadap Lap Keu Daerah	Jenis Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah untuk 2 tahun terakhir	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016	WTP, WDP, TMP, TW	WTP		
						Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017	WTP, WDP, TMP, TW			
		Besaran SILPA	37	SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	SILPA Tahun 2017	Rp	31.029.697.881	3,06	
						Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017	Rp	1.013.221.642.589,01		
						Realisasi belanja	38	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	Realisasi Belanja Tahun 2017
Pengawasan Inspektorat Daerah	39	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2017	Temuan	412	79,08			
				Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2017	Temuan	521				

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD	Realisasi PAD Tahun 2017	Rp	118.472.175.309	93,05		
						Potensi PAD Pada tahun 2017	Rp	127.325.504.605			
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	(PAD 2017 - PAD 2016) : PAD 2016 x 100%	Total PAD pada tahun 2017	Rp	127.325.504.605	4,62		
						Total PAD pada tahun 2016	Rp	121.707.988.816			
13	TEROBOSAN INOVASI BARU	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017	Penghargaan	2	2	sebutkan Nomor dan tgl penghargaan yang diterima tahun 2017 dikolom 9 elemen data dan ttg pada kolom 11 keterangan.	
								#1.	Kota Peduli HAM		print out
								#2.	Lomba penanaman Pohon Tingkat Nasional		Nomor P1.74/MENLHK/DAS.1/KL/2017
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	ada/tidak ada E-Procurement	ada/tidak ada PERDA tentang E-Procurement	Ada/tidak	ada	ada	Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kota Langsa	
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Ijin Investasi dalam tahun 2017	Persetujuan ijin Investasi pada Tahun 2017	Izin	7	7		

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. URUSAN PENDIDIKAN
2. URUSAN KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD				13	
								9	10	11	12		
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Urusan 1 (PENDIDIKAN)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (BUDAYA)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	3	37,5	1	25		
						Jumlah program nasional (RKP)	program	8		4			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	5		0		
						SOP #1							
						SOP #2							
						SOP #3							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi		tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0					
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan				tdi		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan						
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan				tidak			
					1. Jabatan Fungsional #1	JFT	24						
					2. Jabatan Fungsional #2	JFU	53						
					3. Jabatan Fungsional #3								
4. Jabatan Fungsional #4													

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD				13
								9	10	11	12	
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Urusan 1 (PENDIDIKAN)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (BUDAYA)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/CATATAN	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	99	2,64	4	0,11	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	27	100,00		tdi	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	27				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegawain	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegawain dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegawain	orang	27	100,00		tdi	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	27				
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		0	
					-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada				
					-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada				
					-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada/tidak	ada				
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	13	100,00		tdi	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	13				
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	6	100,00		tdi	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	6				
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	6	100,00		tdi	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	164.217.370.801	16,02		tdi	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938					
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	22.036.855.792	13,59		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	162.098.209.045				

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN	
								Urusan 1 (PENDIDIKAN)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (BUDAYA)	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	178.683.140	5,52		tdi		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	3.235.139.282					
						Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	178.683.140	0,11		tdi		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calc)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		0		
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada						
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada						
			- CALK		- CALK	ada/tidak	ada						
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada		tdi		
			Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00		tdi	
		Total Asset yang dikuasai SKPD					Rp	294.175.189.393					
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0		0		
						1. Papan Pengumuman	ada/tidak						
						2. Pos Pengaduan	ada/tidak						
						3. Leaflet	ada/tidak						
						4. Mobil keliling	ada/tidak						
						5. Pengumuman di media massa	ada/tidak						
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak		tdi		tdi		

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN**

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	5	41.67	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	13	13	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
						SOP #4				
						SOP #5				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	16	100,00	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	10	ada	
						1. Dokter Umum		17		
						2. Dokter gigi		6		
						3. PKM		40		
						4. Adminkes		5		
						5. Perawat		141		
						6. Bidan		107		
						7. Asisten Apoteker		8		
						8. Laboratorium		11		
						9. Sanitarian		4		
						10. Nutrisionis		10		

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								9	10		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	496	13,22		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	6	28,57		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegawaian dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegawaian	orang	6	28,57		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	12	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	12			
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	10	100,00	
				Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	10					
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	10	100,00			
Jumlah program dalam DPA SKPD					program	10					

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	222.380.856.398	21,70	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	14.502.669.110	7,00		
					Total Belanja SKPD	Rp	207.239.082.483			
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	170.250.223	2,19		
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	7.791.633.594			
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	170.250.223	0,08		
					Total Belanja SKPD	Rp	207.239.082.483			
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		
					- Neraca	ada/tidak	ada			
- LRA					ada/tidak	ada				
- CALK					ada/tidak	ada				
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
						Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	68.950.143.214						
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
						1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
						2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
						3. Leaflet	ada/tidak	ada		
						4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		
						5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBLIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN**

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11	
								9	10		
ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	3	100,00		
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	4	4		
						SOP Medis		1			
						SOP Keperawatan		1			
						SOP Penunjang		1			
						SOP Administrasi		1			
				SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100,00		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	19	95,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	20			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	ada	ada	ada		
						1. Jabatan Fungsional Medis	Jabatan	43			
						2. Jabatan Fungsional Medis Perawatan	Jabatan	245			
3. Jabatan Fungsional Medis Perawat	Jabatan	107									
4. Jabatan Fungsional Administrasi	Jabatan	129									
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	543	14,48		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	7	36,84		
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	19									

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	19	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	19		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	4		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	80,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	156.559.243.643	15,28	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	36.761.642.044	25,27	
						Total Belanja SKPD	Rp	145.461.237.707		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.162.408.766	1,70	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	68.436.129.760		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.162.408.766	0,80	
						Total Belanja SKPD	Rp	145.461.237.707		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALk		- CALk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak		tdi	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	 197.106.660.564	tdi	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada			
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada			
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada			
		5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								Urusan 1 (Pekerjaan Umum)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Penataan Ruang)	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	4	50	1	100,0	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	8		1			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	0	0	
					SOP #1							
					SOP #2							
					SOP #3							
		SOP #4										
		SOP #5										
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	4	100,00		tdi	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	4					
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	25	100,00	4	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	25		4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1						
						2. Jabatan Fungsional #2						
						3. Jabatan Fungsional #3						
4. Jabatan Fungsional #4												

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								Urusan 1 (Pekerjaan Umum)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Penataan Ruang)	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	84	2,24	8	0,18	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		4455		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	25	100,00		tdi	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	25				
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	25	100,00		tdi				
			Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	25							
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	0	0	
						-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada				
						-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada				
						-RKA-SKPD	ada/tidak	ada				
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	12	100,00	1	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	12		1		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	12	100,00	1	100,00	
Jumlah Program dalam RKA SKPD	program					12		1				
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	12	100,00	1	100,00			
				Jumlah program dalam DPA SKPD	program	12		1				

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN		
								Urusan 1 (Pekerjaan Umum)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Penataan Ruang)	Capaian Kinerja			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	244.337.150.189	23,84	755.000.000	0,07			
							Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		1.024.868.402.938			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	210.646.273.901	88,66		tdi			
							Total Belanja SKPD	Rp	237.575.464.595		253.300.000			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.116.798.000	5,40		tdi			
							Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	20.683.446.665					
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	0	0			
								- Neraca		ada				
		- LRA		ada										
		- CALK		ada										
		Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	ada	tdi			
										Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD
Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	689.416.425.105												
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	0	0			
								1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
								2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
								3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
								4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
								5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak		tdi			

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	33,33	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	
						SOP #1		-		
						SOP #2		-		
						SOP #3		-		
			SOP #4		-					
			SOP #5		-					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	14	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	14		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1		-		
						2. Jabatan Fungsional #2		-		
						3. Jabatan Fungsional #3		-		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	29	0,77	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang	14	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	14		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan	orang	14	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	14		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	18.403.155.916	1,80	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	11.151.395.000	61,89	
						Total Belanja SKPD	Rp	18.017.105.748		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	541.400.000	96,59	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	560.520.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.483.771.000	8,24	
						Total Belanja SKPD	Rp	18.017.105.748		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALk		- CALk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	1.478.165.124	7,24	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	20.406.154.434		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. URUSAN PERENCANAAN

2. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD				11
								9	10	11	12	
ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	urusan perencanaan	Capaian Kinerja	urusan Penelitian dan pengembangan	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	3	60	1	20	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	5		5		
			2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	1	1	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	5	100,00	4	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	5		4		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100,00	4	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ada	ada	ada	ada	
						1. Jabatan Fungsional #1	Fungsional Perencana		Fungsional Peneliti			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	39	1,04	7	0,19	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	10	58,82	2	50,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		4		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	17	100,00	4	100,00	
			Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		4					

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN		
								urusan perencanaan	Capaian Kinerja	urusan Penelitian dan pengembangan	Capaian Kinerja			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen		0	3	3			
				-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada					
				-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		ada					
				-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		ada					
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	7	100,00	1	100,00			
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	7		1				
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	7	100,00	1	100,00			
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	7		1				
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	7	100,00	1	100,00			
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	7		1				
		6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	7.854.335.217	0,77	233.180.000	0,02	
								Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		
Besaran belanja modal	14			Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	42.350.000	0,55	0	0,00			
						Total Belanja SKPD	Rp	7.672.558.381		230.798.300				
Besaran belanja pemeliharaan	15			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	146.064.960	8,27	0	0,00			
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.766.866.364		178.398.300				
	16			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	146.064.960	1,90	0	0,00			
Total Belanja SKPD	Rp			7.672.558.381		230.798.300								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								urusan perencanaan	Capaian Kinerja	urusan Penelitian dan pengembangan	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3			
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada				
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada				
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada				
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada			
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	1.200.000	0,02			
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	6.008.079.058				
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		0			
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada				
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada				
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak				
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak				
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak			

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERHUBUNGAN**

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	16,67	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	6		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	11	91,67	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	12		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	18	0,48	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	5	45,45	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	11								

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang orang	9 11	81,82	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	57,14	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	7		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	4.068.274.243	0,40	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	207.437.592	5,55	
						Total Belanja SKPD	Rp	3.735.137.703		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	357.962.615	37,72	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	949.108.100		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	357.962.615	9,58	
						Total Belanja SKPD	Rp	3.735.137.703		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
					Total Asset yang dikuasai SKPD		Rp	16.709.927.803		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11	
								9	10		
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		
					Jumlah program nasional (RKP)	program	2				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	5		
						SOP #1					
						SOP #2					
						SOP #3					
			SOP #4								
			SOP #5								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	11	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	11			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
	3. Jabatan Fungsional #3										
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	25	0,67		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	3	27,27		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	11			

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang orang	11 11	100,00	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	5	5	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	5		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	60,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	60,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.281.577.125	0,22	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	8.350.000	0,41	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.026.074.636		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	627.800.000	55,33	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.134.581.600		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	11.600.000	0,57	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.026.074.636		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
					Total Asset yang dikuasai SKPD		Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : LINGKUNGAN HIDUP**

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	25,00	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	5	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	13	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	4	ada	
						1. Jabatan Fungsional #1		-		
						2. Jabatan Fungsional #2		-		
						3. Jabatan Fungsional #3		-		
			4. Jabatan Fungsional #4		-					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	175	4,67	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang	8	61,54	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13		
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	13	100,00				
			Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13					

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN		
								Elemen Data	Capaian Kinerja			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3			
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada				
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada				
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada				
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00			
							Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	5			
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100,00			
							Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100,00			
							Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5			
		6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	24.890.357.580	2,43	
								Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
Besaran belanja modal	14			Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	4.351.658.728	23,48			
						Total Belanja SKPD	Rp	18.531.126.534				
Besaran belanja pemeliharaan	15			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	580.130.000	7,35			
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	7.891.919.306				
	16			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	580.130.000	3,13			
						Total Belanja SKPD	Rp	18.531.126.534				
Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3					
				- Neraca		ada/tidak	ada					
				- LRA		ada/tidak	ada					
				- CALK		ada/tidak	ada					

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	31.077.228.312		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada			
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada			
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada			
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	50		
					Jumlah program nasional (RKP)	program	2				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1		
						SOP #1					
						SOP #2					
						SOP #3					
			SOP #4								
			SOP #5								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100,00		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	15	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	15			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. Jabatan Fungsional #3					
			4. Jabatan Fungsional #4								
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	41	1,09		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang		tdi		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang				

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang		tdi	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	50,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	6		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	3.980.463.893	0,39	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	238.381.000	16,91	
						Total Belanja SKPD	Rp	1.409.832.800		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	20.675.750	1,92	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.078.079.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	20.764.750	1,47	
						Total Belanja SKPD	Rp	1.409.832.800		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	Ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	Ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	2.678.663.789			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	3	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Ada		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Ada		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN	
								Urusan 1 (KB & KS)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (PP & PA)	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	25,00	2	66,66666667		
						Jumlah program nasional (RKP)	program	4		3			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	4	4	5	5		
						SOP #1							
						SOP #2							
						SOP #3							
			SOP #4										
			SOP #5										
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda						
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	100,00	6	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	6		6			
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD		Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	21	ada	0	tidak		
							1. Jabatan Fungsional #1		PLKB				
							2. Jabatan Fungsional #2						
							3. Jabatan Fungsional #3						
			4. Jabatan Fungsional #4										

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD				13
								9	10	11	12	
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Satuan elemen data	Urusan 1 (KB & KS)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (PP & PA)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	42	1,12	9	0,24	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	3	17,65	4	23,53	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	4	17		17		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	3	17,65	4	23,53	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	0	0	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada				
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada				
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada				
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	4	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3		4		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	4	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		4		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	4	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		4		

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD				13	
								9	10	11	12		
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Satuan elemen data	Urusan 1 (KB & KS)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (PP & PA)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/CATATAN		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	5.639.109.184	0,55	5.639.109.184	0,55		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	569.332.151	10,63	42.100.000	0,79		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	109.984.060	13,75	109.984.060	14,63		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	799.896.000		751.837.400			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	109.984.060	2,05	109.984.060	2,05		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	0	0		
						- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada			
						- LRA		- LRA	ada/tidak	ada			
						- CALk		- CALk	ada/tidak	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak		
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi		tdi		
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp						
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	4	4		
						1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		ada	
						2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		ada	
						3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada		ada	
						4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		ada	
						5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		tidak	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tdi			

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : DINAS SOSIAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : SOSIAL

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		
					Jumlah program nasional (RKP)	program	7				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah		0		
						SOP#					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	12	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	12			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
3. Jabatan Fungsional #3											
4. Jabatan Fungsional #4											
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	30	0,80		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751			

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN		
								9	10			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	6	50,00			
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	12				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	12	100,00			
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	12				
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3			
						-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada				
						-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada				
						-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada				
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	7	100,00			
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	7				
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100,00			
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5				
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00			
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	6.715.440.673	0,66			
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938				
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00			
						Total Belanja SKPD	Rp	6.654.003.724				
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	177.000.641	5,81			
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	3.046.510.706				
					16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	177.000.641	2,66	
								Total Belanja SKPD	Rp	6.654.003.724		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Ada			
				- LRA		- LRA	ada/tidak	Ada			
				- CALK		- CALK	ada/tidak	Ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada		
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi		
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp				
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1		
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada			
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak			
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak			
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Ada			
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak		

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
 1. URUSAN INDUSTRI
 2. URUSAN PERDAGANGAN
 3. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD						13		
								9	10	11	12	11	12			
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Urusan 1 (Industri)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Perdagangan)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Koperasi dan UKM)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/CATATAN			
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	33,33333333	1	25	1	20			
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		4		5				
			2	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	1	1	1	1		
							SOP #1									
							SOP #2									
SOP #3																
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	1	20,00		tdi			
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	5		5		5				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	8	100,00	6	100,00	4	100,00			
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	8		6		4				
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak	0	tidak	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1										
						2. Jabatan Fungsional #2										
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	17	0,45	9	0,24	8	0,21			
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		3751		3751				
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	2	25,00	1	20,00	2	50,00			
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	8		5		4				
						Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	8	100,00	5	100,00	4	100,00			
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	8		5		4							
			Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	8		5		4							

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD						13
								9	10	11	12	11	12	
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Urusan 1 (Industri)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Perdagangan)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Koperasi dan UKM)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	0	0	0	0	
				-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada							
				-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada							
				-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada/tidak	ada							
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program		tdi		tdi		tdi	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program		tdi		tdi		tdi	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program		tdi		tdi		tdi	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program							
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	5.577.909.477	0,54	5.577.909.477	0,54	5.577.909.477	0,54	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	151.792.433	5,05	4.272.433.317	91,60	129.730.340	100,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	3.007.491.433		4.664.185.092		129.730.340		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	121.887.572,00	4,79	0	0,00		tdi	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.547.144.000		314.861.775				
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	121.887.572,00	4,05	0	0,00	0	0,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	3.007.491.433,00		3.007.491.433		3.007.491.433		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3	
				- Neraca	- Neraca	ada/tidak	ada		ada		ada			
				- LRA	- LRA	ada/tidak	ada		ada		ada			
				- CALK	- CALK	ada/tidak	ada		ada		ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00		tdi		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	46.589.250.186						
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	5	5	3	3	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		ada		ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		ada		ada		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		ada		ada		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		ada		tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		ada		tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2. URUSAN PARIWISATA

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN	
								Urusan 1 (Pemuda & OR)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Pariwisata)	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	20	1	33,33		
					Jumlah program nasional (RKP)	program	5		3				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	1	1		
					SOP #1								
					SOP #2								
					SOP #3								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda							
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	14	100,00	3	100,00		
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	14		3				
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak		
					1. Jabatan Fungsional #1								
				2. Jabatan Fungsional #2									
				3. Jabatan Fungsional #3									
		4. Jabatan Fungsional #4											

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD				13
								9	10	11	12	
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Urusan 1 (Pemuda & OR)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Pariwisata)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/CATATAN	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	28	0,75	3	0,08	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	3	21,43		tdi	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	11	100,00	3	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	11		3		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		0	
						-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada				
						-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada				
						-RKA-SKPD	ada/tidak	ada				
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100,00	2	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	4		2		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	1	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		1		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	75,00	1	50,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		2		

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								Urusan 1 (Pemuda & OR)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Pariwisata)	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	20.387.191.724	1,99	20.387.191.724	1,99	
							Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		1.024.868.402.938	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	248.300.000	1,24	14.529.632.000	72,85	
						Total Belanja SKPD	Rp	19.944.968.291		19.944.968.291		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	244.297.800	21,16	244.297.800	16,90	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.154.535.600		1.445.824.500		
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	244.297.800	1,22	244.297.800	1,22				
			Total Belanja SKPD	Rp	19.944.968.291		19.944.968.291					
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3		
					- Neraca	ada/tidak	ada		ada			
					- LRA	ada/tidak	ada		ada			
					- CALk	ada/tidak	ada		ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	tdi	tdi		
						Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp									
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	0	0	
						1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada				
						2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak				
						3. Leaflet	ada/tidak	tidak				
						4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak				
						5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	50	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	2			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	5	
					SOP #1					
					SOP #2					
					SOP #3					
		SOP #4								
		SOP #5								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
		4. Jabatan Fungsional #4								
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	28	0,75	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	17	100,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan	orang	17	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	5		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	57,14	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	7		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	4.799.261.394	0,47	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	27.550.000	0,58	
						Total Belanja SKPD	Rp	4.731.106.230		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	114.007.422	10,52	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.083.967.502		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	114.007.422	2,41	
						Total Belanja SKPD	Rp	4.731.106.230		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Ada			
				- LRA		- LRA	ada/tidak	Ada			
				- CALK		- CALK	ada/tidak	Ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada		
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi		
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	5.268.158.770			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2		
					1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		
					2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Ada		
					3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		
					4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak		

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH (SATPOL PP DAN WH)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
						Jumlah program nasional (RKP)	program			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	14	14	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	12	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	12		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	16	94,12	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	40	1,07	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	orang	9	52,94	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan	orang	16	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	16		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	5		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	9.044.847.057	0,88	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	219.148.000	2,51	
						Total Belanja SKPD	Rp	8.743.951.617		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	64.234.515	25,04	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	256.522.990		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	64.234.515	0,73	
						Total Belanja SKPD	Rp	8.743.951.617		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	Ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	Ada		
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	5.854.269.338		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	3	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Ada		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Ada		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
					Jumlah program nasional (RKP)	program				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah		0	
						SOP #1				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	11	0,29	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	4	100,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program		tdi	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program			
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program		tdi	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program		tdi	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	38.054.134.670	3,71	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	3.995.679.000	20,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	19.979.302.500		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.927.819.897	16,07	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	11.995.758.500		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.927.819.897	9,65	
						Total Belanja SKPD	Rp	19.979.302.500		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	0	0	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Tidak		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	Tidak		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	Tidak		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Tidak	tidak	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
					Jumlah program nasional (RKP)	program				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	3	3	
						SOP #1				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	13	0,35	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	4	100,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	0	0	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Tidak		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Tidak		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Tidak		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	1	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	1		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	1	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	1		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	1		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	1.330.665.000	0,13	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	110.000.000	8,27	
						Total Belanja SKPD	Rp	1.330.665.000		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	474.910.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	1.330.665.000		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	2	2	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Tidak		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Tidak	tidak	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2. PERTANAHAN
3. PERENCANAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD						11
								9	10	9	10	9	10	
ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	ADM PEM	Capaian Kinerja	PERTANAHAN	Capaian Kinerja	PERENCANAAN	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		tdi		tdi		
					Jumlah program nasional (RKP)	program								
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah		0		0		0		
					SOP #									
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		tdi		
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda								
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	100,00	1	100,00	1	100,00		
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	3		1		1			
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak	0	tidak		
					1. Jabatan Fungsional #1									
					2. Jabatan Fungsional #2									
3. Jabatan Fungsional #3														
4. Jabatan Fungsional #4														

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD						11
								9	10	9	10	9	10	
	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	ADM PEM	Capaian Kinerja	PERTANAHAN	Capaian Kinerja	PERENCANAAN	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	10	0,27	6	0,16		tdi	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		3751		3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	3	100,00	1	100,00		tdi	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3		1				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan	orang	3	100,00	1	100,00		tdi	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3		1				
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	3	3	
				-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada		Ada		Ada		Ada	
				-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		Ada		Ada		Ada	
				-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		Ada		Ada		Ada	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program		tdi		tdi		tdi	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program							
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program		tdi		tdi		tdi	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program							
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program		tdi		tdi		tdi	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program							
6	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	402.600.000	0,04	396.112.000	0,04	395.740.000	0,04	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	143.000.000	36,13	
						Total Belanja SKPD	Rp	402.600.000		390.639.839		395.740.000		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	218.640.000		312.922.000		104.600.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	402.600.000		390.639.839		395.740.000		

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD						KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	9	10	9	10	
								ADM PEM	Capaian Kinerja	PERTANAHAN	Capaian Kinerja	PERENCANAAN	Capaian Kinerja	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	0	0	0	0	0	0	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp		tdi		tdi		tdi	
							Rp							
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	1	1	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		Ada		Ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUMAS

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9 ADM PEMERINTAHAN	10 Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
				Jumlah program nasional (RKP)		program				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	6	6	
						SOP #1				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
4. Jabatan Fungsional #4										
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	15	0,40	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	4	100,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	program	1	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	1		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	1	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	1		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	1		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.359.549.300	0,23	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	114.950.000	5,18	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.219.973.300		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.799.353.300		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.219.973.300		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	1	1	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Tidak		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	Tidak		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Tidak	tidak	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	3	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2. PENGAWASAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN	
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	PENGAWASAN	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		tdi		
				Jumlah program nasional (RKP)		program							
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1			0	
						SOP #1							
				SOP #2									
				SOP #3									
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda						
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	100,00	1	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	3		1			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1							
						2. Jabatan Fungsional #2							
						3. Jabatan Fungsional #3							
4. Jabatan Fungsional #4													

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	9	10	
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	PENGAWASAN	Capaian Kinerja	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	8	0,21	3	0,08	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpin	orang	3	100,00	1	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3		1		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	3	100,00	1	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3		1		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	1	1	1	1	
						-RENSTRA-SKPD		ada/tidak	Tidak		Tidak	
						-RENJA-SKPD		ada/tidak	Tidak		Tidak	
						-RKA-SKPD		ada/tidak	ada		ada	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	2	100,00	1	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	2		1		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100,00	1	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2		1		
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100,00	1	100,00			
				Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2		1				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	112.654.000	0,01	81.126.500	0,01	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp		tdi		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	112.654.000		81.126.500		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp		tdi		tdi	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	78.994.000		40.326.500		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	PENGAWASAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	112.654.000		81.126.500		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	1	1	1	1	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	Tidak		Tidak		
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp					
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		0		0	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
					Jumlah program nasional (RKP)	program				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	
						SOP #1				
								SOP #2		
								SOP #3		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	17	0,45	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	4	100,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangtatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangtatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangtatan	orang	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	6	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	6		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	1	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	1		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	1		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	970.932.500	0,09	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	117.000.000	12,05	
						Total Belanja SKPD	Rp	970.932.500		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	439.770.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	970.932.500		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	2	2	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	Tidak		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Tidak	tidak	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		0	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Tidak			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak			
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak			
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak			
		5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9 ADM PEMERINTAHAN	10 Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
					Jumlah program nasional (RKP)	program				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	
						SOP #1				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
4. Jabatan Fungsional #4										
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	9	0,24	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	4	100,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangtatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangtatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangtatan	orang	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	2	2	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Tidak		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	2		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	699.235.500	0,07	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	699.235.500		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	411.351.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	699.235.500		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	1	1	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Tidak		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	Tidak		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Tidak	tidak	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		0	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Tidak		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. PENANAMAN MODAL

2. PENGAWASAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN	
								Urusan Penanaman Modal	Capaian Kinerja	Urusan Pengawasan	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		tdi		
					Jumlah program nasional (RKP)	program							
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	2	2			0	
						SOP #1							
						SOP #2							
						SOP #3							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda						
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	100,00	1	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	3		1			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1							
						2. Jabatan Fungsional #2							
						4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	7	0,19	3	0,08		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	2	66,67	1	100,00		
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3					1						

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								Urusan Penanaman Modal	Capaian Kinerja	Urusan Pengawasan	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100,00	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		4		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada		Ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		Ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100,00	4	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	4		4		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	1	100,00	1	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	1		1		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1	100,00	1	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	1		1		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	1.566.120.000	0,15	1.566.120.000	0,15	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	110.390.000		1.566.120.000		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	92.000.000		1.491.000.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	110.390.000		1.566.120.000		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								9 Urusan Penanaman Modal	10 Capaian Kinerja	11 Urusan Pengawasan	12 Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	0	0	0	0	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				- CALk		- CALk	ada/tidak	Tidak		Tidak		
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp		tdi		tdi	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2. SOSIAL
3. KEBUDAYAAN
4. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD						11				
								9	10	9	10	9	10		9	10		
								URUSAN TRANTIB	Capaian Kinerja	SOSIAL	Capaian Kinerja	KEBUDAYAAN	Capaian Kinerja	ADM PEM	Capaian Kinerja			
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		tdi		tdi		tdi			
							program											
							buah	3	3	0	0	0						
							SOP HBI	1										
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		tdi		tdi			
							Perda											
							Jabatan	4	100,00	tdi	tdi	tdi	tdi					
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100,00	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi				
							Jabatan	4										
							Jabatan	0	tidak	0	tidak	0	tidak	0	tidak			
							Jabatan											
							Jabatan											
							Jabatan											

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD							KETERANGAN/ CATATAN			
								URUSAN TRANTIB	Capaian Kinerja	SOSIAL	Capaian Kinerja	KEBUDAYAAN	Capaian Kinerja	ADM PEM		Capaian Kinerja		
6	7	8	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	11					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	11	0,29	tdi		tdi		tdi				
					Jumlah PNS Kota	orang	3751											
				7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpin	orang	4	100,00	tdi		tdi		tdi			
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4										
				8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan	orang	4	100,00	tdi		tdi		tdi			
							Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4									
				5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	0		0		0
								-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada						
-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak					Ada										
-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak					Ada										
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKKPD	10	Jumlah Program RKKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%			Jumlah program RKKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100,00	tdi		tdi		tdi				
			Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD			program	4											
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%			Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	tdi		tdi		tdi				
			Jumlah Program dalam RKA SKPD			program	4											
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%			Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00	tdi		tdi		tdi				
			Jumlah program dalam DPA SKPD			program	4											
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13			Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	6.469.569.000	0,63	6.469.569.000	0,63	6.469.569.000	0,63	6.469.569.000	0,63	
							Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		1.024.868.402.938			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	115.000.000	3,72	tdi		tdi		tdi				
					Total Belanja SKPD	Rp	3.094.769.000		96.560.000		2.602.680.000		675.560.000					
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.933.944.000		96.560.000		1.557.360.000		530.560.000					
					Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
					Total Belanja SKPD	Rp	3.094.769.000		96.560.000		2.602.680.000		675.560.000					

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD								KETERANGAN/ CATATAN
								URUSAN TRANTIB	Capaian Kinerja	SOSIAL	Capaian Kinerja	KEBUDAYAAN	Capaian Kinerja	ADM PEM	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	9	10	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	0	0	0	0	0	0	0		
				- Neraca	- Neraca	- Neraca	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		
				- LRA	- LRA	- LRA	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		
				- CALK	- CALK	- CALK	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	6.700.000	12,18		tdi		tdi		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	54.990.950								
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	1	1	1	1	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		Ada		Ada		Ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
					Jumlah program nasional (RKP)	program				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	
						SOP #1				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	6	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	6		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	10	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	10		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	30	0,80	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	10	100,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	10	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	6	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	6		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	13.916.881.286	1,36	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	737.400.000	6,38	
						Total Belanja SKPD	Rp	11.561.552.700		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.089.727.060	12,53	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	8.696.209.200		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.089.727.060	9,43	
						Total Belanja SKPD	Rp	11.561.552.700		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Tidak	tidak	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	 18.174.966.690	tdi	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak			
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak			
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak			
		5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
					Jumlah program nasional (RKP)	program				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	
						SOP #1				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	6	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	6		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	10	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	10		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
4. Jabatan Fungsional #4										
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	30	0,80	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	12	60,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	20								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	15	75,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	20		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	5		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	6.800.781.018	0,66	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	313.500.000	7,01	
						Total Belanja SKPD	Rp	4.469.943.050		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	118.061.525	4,31	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.736.923.050		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	118.061.525	2,64	
						Total Belanja SKPD	Rp	4.469.943.050		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		0	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Tidak			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak			
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak			
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak			
		5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT BAITUL MAL

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9 ADM PEMERINTAHAN	10 Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
				Jumlah program nasional (RKP)	program					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	3	3	
						SOP #1				
								SOP #2		
								SOP #3		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	3		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
	4. Jabatan Fungsional #4									
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	13	0,35	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	3	100,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangtatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangtatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangtatan	orang	3	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	3.617.104.272,00	0,35	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.877.957.865		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	26.660.849	1,11	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.402.456.865		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	26.660.849	0,93	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.877.957.865		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	2	2	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	Tidak		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		0	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Tidak			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak			
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak			
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak			
		5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT MPU

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
				Jumlah program nasional (RKP)	program					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	
						SOP #1				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	3		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
				4. Jabatan Fungsional #4						
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	12	0,32	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	3	100,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	3	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	2		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	1.972.940.035	0,19	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	186.000.000	9,82	
						Total Belanja SKPD	Rp	1.893.132.631,00		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	206.800.000	66,86	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	309.297.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	206.800.000	10,92	
						Total Belanja SKPD	Rp	1.893.132.631,00		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	2.794.500	0,23	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.203.350.628		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		0	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Tidak		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT MPD

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
				Jumlah program nasional (RKP)	program					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	8	8	
						SOP #1				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	3		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	8	0,21	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	3	100,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	3	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	4		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	958.214.549	0,09	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	930.237.438		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	20.444.115	15,66	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	130.516.432		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	20.444.115	2,20	
						Total Belanja SKPD	Rp	930.237.438		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		0	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Tidak		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT MAA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		
					Jumlah program nasional (RKP)	program					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	3	3		
						SOP #1					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	2	66,67		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	3			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. Jabatan Fungsional #3					
				4. Jabatan Fungsional #4							

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN			
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	4	0,11				
						Jumlah PNS Kota	orang	3751					
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	2	100,00				
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	2					
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan	orang	2	100,00					
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	2						
		5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen		3	3	
								-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD		ada/tidak	ada	
-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD							ada/tidak	ada				
-RKA-SKPD	-RKA-SKPD							ada/tidak	ada				
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10			Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00				
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	5					
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11			Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100,00				
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2					
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12			Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100,00				
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2					

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								ADM PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	991.911.674,00	0,10	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	61.500.000	6,49	
						Total Belanja SKPD	Rp	947.247.789,00		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	18.545.165	11,26	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	164.699.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	18.545.165	1,96	
						Total Belanja SKPD	Rp	947.247.789		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	2	2	
						- Neraca	ada/tidak	ada		
- LRA	ada/tidak					ada				
- CALk	ada/tidak					Tidak				
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		0	
						1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Tidak		
						2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak		
						3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		
						4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		
						5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	9	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	9			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	30	0,80	
					Jumlah PNS Kota	orang	3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	2	22,22	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9			

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengkatan	orang	9	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
					-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00		
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3			
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00		
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00		
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.647.988.350	0,26		
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.864.402.938			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	31.000.000	1,18		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.631.862.655			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	53.609.316	21,90		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	244.747.116			
						Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	53.609.316	2,04
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		
						- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
						- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
- CALK						- CALK	ada/tidak	ada			

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	2.313.342.533		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	
						1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak		
						2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
						3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
						4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
						5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA BARO

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								9	10		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		
					Jumlah program nasional (RKP)	program					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0		
						SOP #1					
						SOP #2					
						SOP #3					
			SOP #4								
			SOP #5								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	9	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	9			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. Jabatan Fungsional #3					
			4. Jabatan Fungsional #4								
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	29	0,77		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan Diklatpim	orang	7	77,78		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9			

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	44,44	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.426.092.003	0,24	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.864.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	15.665.000	0,66	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.359.233.371		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	26.464.779	13,76		
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	192.394.511			
					Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	26.464.779	1,12		
					Total Belanja SKPD	Rp	2.359.233.371			
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		
					- Neraca	ada/tidak	ada			
					- LRA	ada/tidak	ada			
					- CALK	ada/tidak	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
	Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00		
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.051.240.866			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
						1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
						2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
						3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
						4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak						
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak			

**TATARAN PELAKSANA KEBLIAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA BARAT

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
					Jumlah program nasional (RKP)	program				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	9	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	9		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	31	0,83		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	1	11,11		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengkatan	orang		tdi		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3			
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3			
			Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3			

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.449.284.889	0,24	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.864.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.433.373.869		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	126.114.000	50,26	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	250.921.111		
						Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	16	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp
		Total Belanja SKPD	Rp	2.433.373.869						
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
						- Neraca		ada/tidak	ada	
- LRA						ada/tidak	ada			
- CALK						ada/tidak	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
						Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp
		Penggunaan Asset SKPD	Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	4.396.719.839					
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
						1. Papan Pengumuman		ada/tidak	ada	
						2. Pos Pengaduan		ada/tidak	tidak	
						3. Leaflet		ada/tidak	tidak	
						4. Mobil keliling		ada/tidak	tidak	
		5. Pengumuman di media massa		ada/tidak	tidak					
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA LAMA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11	
								9	10		
ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		
					Jumlah program nasional (RKP)	program					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1		
						SOP #1					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	9	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	9			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. Jabatan Fungsional #3					
4. Jabatan Fungsional #4											
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	31	0,83		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	2	22,22		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9			

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	9	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
					-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00		
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3			
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00		
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00		
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.421.329.184	0,24		
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.864.402.938			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	4.400.000	0,18		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.404.639.135			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	22.305.300	11,05		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	201.887.436			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	22.305.300	0,93		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.404.639.135			
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		
						- Neraca	ada/tidak	ada			
- LRA	ada/tidak					ada					
- CALK	ada/tidak					ada					

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	2.492.728.738		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	
						1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
						2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
						3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
						4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
						5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA KOTA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
						Jumlah program nasional (RKP)	program			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP PATEN				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	9	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	9		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	31	0,83		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	1	11,11		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9			
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	77,78					
			Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9						
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
						-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada	
						-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada	
						-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00		
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3			
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00		
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3			
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00				
				Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3					

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.792.165.359	0,27	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.864.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.734.830.983		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	34.050.000	16,24	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	209.610.000		
						Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	34.050.000	1,25	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
						- Neraca		ada/tidak	ada	
						- LRA		ada/tidak	ada	
- Calk						ada/tidak	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
						Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.201.944.752						
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
						1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
						2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
						3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
						4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
						5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBLIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PERPUSTAKAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Urusan (Perpustakaan)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	2		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	3	3	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
				SOP #4						
				SOP #5						
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	12	92,31	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	24	0,64	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	2	15,38	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Urusan (Perpustakaan)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/CATATAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan	orang	12	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	12		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	2		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.019.692.611	0,20	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	594.447.800		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	51.078.852	37,50	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	136.227.800		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	51.078.852	8,59	
						Total Belanja SKPD	Rp	594.447.800		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALk		- CALk	ada/tidak	ada		

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN		
								Urusan (Perpustakaan)	Capaian Kinerja			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada			
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi			
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp					
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	3			
						1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
						2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
						3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
						4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		
		5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada						
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak			

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : INSPEKTORAT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENGAWASAN**

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
			2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	2	2	
		SOP #1								
		SOP #2								
		SOP #3								
		SOP #4								
SOP #5										
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	9	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	9			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
					1. Jabatan Fungsional #1					
					2. Jabatan Fungsional #2					
					3. Jabatan Fungsional #3					
4. Jabatan Fungsional #4										

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	54	1,44	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	4	44,44	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	9	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
						-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
						-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
						-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	6.274.076.987	0,61	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	28.379.400	0,45	
						Total Belanja SKPD	Rp	6.274.076.987		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	73.450.000	6,58			
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.116.650.000				
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	73.450.000	1,17			
					Total Belanja SKPD	Rp	6.274.076.987				
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		
						- Neraca	ada/tidak	ada			
						- LRA	ada/tidak	ada			
- CALk	ada/tidak					ada					
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	tidak	tidak		
								Pergunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.699.710.006							
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2		
								1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak	
								2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
								3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
								4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak							
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak		

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. KEUANGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	KEUANGAN	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	100	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	5	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	2	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	2		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	24	100,00	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
						4. Jabatan Fungsional #4				

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								KEUANGAN	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	103	2,75		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	24	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	24			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangatan	orang	24	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	24			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
						-RENSTRA-SKPD		ada/tidak	ada		
						-RENJA-SKPD		ada/tidak	ada		
						-RKA-SKPD		ada/tidak	ada		
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	60,00	
							Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	5		
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
							Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00			
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3				

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								KEUANGAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	31.470.558.122,00	3,07	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	5.088.345.165	16,78	
						Total Belanja SKPD	Rp	30.332.074.725,00		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	841.527.930	14,14	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	5.949.453.811		
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	841.527.930	2,77				
			Total Belanja SKPD	Rp	30.332.074.725					
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calc)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
						- Neraca		ada/tidak	ada	
						- LRA		ada/tidak	ada	
						- CALk		ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	32.624.331.888		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	
						1. Papan Pengumuman		ada/tidak	ada	
						2. Pos Pengaduan		ada/tidak	ada	
						3. Leaflet		ada/tidak	Tidak	
						4. Mobil keliling		ada/tidak	Tidak	
		5. Pengumuman di media massa		ada/tidak	Tidak					
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak			

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	33,33	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	4	4	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	10	83,33	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	12		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	26	0,69	
						Jumlah PNS Kota	orang	3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	8	80,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	10	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/CATATAN	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	6	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	6		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	6	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	6		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	3.348.129.353	0,33	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	1.433.654.000		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	41.603.100	1,98	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.101.979.600		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	250.356.201	17,46	
						Total Belanja SKPD	Rp	1.433.654.000		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada		
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	68.748.000	1,59	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	4.322.649.522		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENANAMAN MODAL

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11		
								9	10			
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD Jumlah program nasional (RKP)	program program	 3	tdi			
			2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP SOP #1 SOP #2 SOP #3 SOP #4 SOP #5	buah	1	1			
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda Perda	0 0	tdi			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan Jabatan	16 16	100,00			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #2 3. Jabatan Fungsional #3 4. Jabatan Fungsional #4	Jabatan	0	tidak			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD Jumlah PNS Kota	orang orang	31 3751	0,83			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang orang	9 16	56,25			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	37,50			

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								9	10		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	16			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	4			
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3			
			Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.562.252.175	0,25		
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	93.000.000	3,69		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.520.154.089			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	31.605.850	12,99		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	243.333.409			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	35.558.824	1,41		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.520.154.089			
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calc)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3			
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada				
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada				
			- CALK		- CALK	ada/tidak	ada				
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	tidak	tidak		
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					dikuasai SKPD x 100%	Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.150.560.686		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada			
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak			
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak			
		5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. KEPEGAWAIAN
2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD				11	
								9	10	9	10		
ASPEK		FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	KEPEGAWAIAN	Capaian Kinerja	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	100		tdi		
						Jumlah program nasional (RKP)	program	1					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	3	3	2	2		
						SOP #1							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	2	100,00		tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	2					
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	11	91,67		tdi		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	12					
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1							
						2. Jabatan Fungsional #2							
						3. Jabatan Fungsional #3							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	48	1,28		tdi		
						Jumlah PNS Kota	orang	3751					
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	11	100,00		tdi		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	11					

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								KEPEGAWAIAN	Capaian Kinerja	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan	orang	11	100,00		tdi	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	11				
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		0	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada				
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada				
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada				
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPMD	10	Jumlah Program RKPMD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPMD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPMD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	6	100,00		tdi	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	6				
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPMD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	6	100,00		tdi	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	6				
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00		tdi	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	9.154.616.579,00	0,89	9.154.616.579,00	0,89	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	93.453.512	1,04		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	9.019.450.354,00		9.019.450.354,00		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	69.918.038	5,33	69.918.038	14,06	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.312.495.620		497.382.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	69.918.038	0,78	69.918.038	0,78	
						Total Belanja SKPD	Rp	9.019.450.354		9.019.450.354		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								KEPEGAWAIAN	Capaian Kinerja	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		0	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada				
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada				
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada				
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada		tdi	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	141.061.000	2,57		tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	5.479.606.913				
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	2	2	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		ada		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : LANGSA
NAMA SKPD : DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. URUSAN PERTANIAN
2. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD				13
								9	10	11	12	
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2014)	Satuan elemen data	Urusan 1 (Pertanian)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kelautan dan Perikanan)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/CATATAN	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	50		tdi	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	3	3	1	1	
						SOP #1						
						SOP #2						
						SOP #3						
						SOP #4						
						SOP #5						
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda					
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	22	100,00	4	100,00	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	18	ada		tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1	PP Muda	8				
						2. Jabatan Fungsional #2	PP Pertama	3				
						3. Jabatan Fungsional #3	PP Pelaksana	3				
						4. Jabatan Fungsional #4	PP	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD				13
								9	10	11	12	
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2014)	Satuan elemen data	Urusan 1 (Pertanian)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kelautan dan Perikanan)	Capaian Kinerja	KETERANGAN/CATATAN	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	50	1,33	12	0,32	
						Jumlah PNS Kabupaten	orang	3751		3751		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	12	92,31	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13		4		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	12	100,00	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	12		4		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	42,86	2	28,57	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	7		7		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	8	66,67	2	16,67	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	12		12		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	42,86	2	28,57	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	7		7		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	20.637.685.476,00	2,01	20.637.685.476	2,01	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	1.024.868.402.938		1.024.868.402.938		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	2.463.736.860	28,30	64.432.795	1,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	8.706.000.960,00		6.453.692.795		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	404.453.451	7,47	404.453.451	6,33	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	5.411.816.600		6.389.260.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	404.453.451	4,65	404.453.451	6,27	
						Total Belanja SKPD	Rp	8.706.000.960		6.453.692.795		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		ada		
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada		ada		

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2014)	Satuan elemen data	LPPD				KETERANGAN/ CATATAN
								Urusan 1 (Pertanian)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kelautan dan Perikanan)	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	tdi		tdi		
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp					
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	0	0	
						1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak		tidak		
						2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		tidak		
						3. Leaflet	ada/tidak	tidak		tidak		
						4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		tidak		
		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		tidak						
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	

LAMPIRAN II.3 :

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KOTA LANGSA

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN WAJIB								
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Orang	4.318	43,42	
				Jumlah anak usia 4-6 tahun		9.945		
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis	Orang	137.193	98,00	
				Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas		139.993		
		3	Angka Partisipasi Murnib (APM) SD / MI/ Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A	Orang	18.693	91,74	
				Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn		20.375		
		4	Angka Partisipasi Murnib (APM) SMP / MTs/ Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B	Orang	10.063	98,17	
				Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn		10.251		
		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI	Orang	-	0,00	
				Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya		19.635		
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs	Orang	4	0,05	
				Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pd tahun ajaran sebelumnya		8.220		

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		7	Angka kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	3.061	15,59			
				Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya		19.635				
		8	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	3.051	96,76			
				Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sebelumnya		3.153				
		9	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Orang	3.354	109,57			
				Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya		3.061				
		10	Guru yang memenuhi kualifikasai S1/D-IV	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	Orang	3.436	89,50			
				Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA		3.839				
		2	Kesehatan	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	808	100,00	
						Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		808		
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki potensi kebidanan			Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3629	93,97			
				Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		3862				
13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			Jumlah Desa/Kelurahan UCI		62	93,94			
				Jumlah seluruh Desa/Kelurahan		66				
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelay. Kes. Di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	4	100,00					
		Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		4						

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn	Orang	209	18,69	
				Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama		1118		
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn	Orang	47	100,00	
				Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		47		
		17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata 1	Orang	12.112	43,38	
				Jumlah seluruh maskin di kab/kota		27.919		
		18	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. Sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.146	86,76	
				Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama		3.626		
3	Lingkungan Hidup	19	Penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani (m3)	m3	35.643,6	52,36	
				Volume produksi sampah (m3)		68.075,42		
		20	Kebersihan	Jumlah Pasar Tradisional tergolong baik	Unit	3	100,00	
				Jumlah seluruh pasar tradisional	Unit	3		
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (m3)	per 1000	2	0,00	
				Jumlah penduduk	Orang	192.241		
		22	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda%	100	100,00	
				Jumlah kasus lingkungan yang ada		100		
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	Km	287,34	47,00	
				Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut	Km	611,37		
		24	Rumah Tangga ber Sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi	Unit	23.343	50,85	
				Jumlah total rumah tangga	Unit	45.908		

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		25	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	6.787	25,86	
				Luas Wilayah	Ha	26.241		
		26	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau	Ha	765	20,48	
				Luas wilayah	Ha	3735,9		
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	27	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	Unit	7133	15,54	
				Jumlah seluruh rumah tangga	Unit	45908		
		28	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas permukiman kumuh	Ha	6.787	25,86	
				Luas wilayah	Ha	26.241		
		29	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni	Unit	21.365	46,54	
				Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	Unit	45.908		
6	Kepemudaan & olahraga	30	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten		1	0,00	Jumlah lapangan olahraga Per 1000 Penduduk
				Jumlah penduduk	per 1000	192.241		
		31	Lapangan olahraga	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten	satuan	222	1,15	
				Jumlah penduduk	per 1000	192.241		
				1. lap sepakbola	satuan	68		
				2. lap basket, = ---- lap	satuan	8		
				3. lap volley, = ---- lap	satuan	96		
				4. lap bulu tangkis, = ---- lap	satuan	48		
				5. kolam renang, = ---- lap	satuan	2		
				Jumlah	satuan	222		
9	Penanaman modal	32	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyaran rupiah)	Realisasi PMDN thn 2017 - Realisasi PMDN 2016		6.214.045.541	45,06	
				Realisasi PMDN 2016%	13.790.000.000		
10	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif		129	37,94	
				Jumlah seluruh koperasi%	340		
		34	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil		667	76,23	
				Jumlah seluruh UKM%	875		

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	35	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP%	96.035	70,25	
				Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)		136.697		
		36	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah penduduk memilki akta kelahiran	per 1000	34.772	18,09	
				Jumlah penduduk		192.241		
		37	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah/belum	Sudah	sudah	
12	Tenaga Kerja	38	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif	Orang	10674	100,00	
				Jumlah Pekerja/Buruh	Orang	10674		
		39	Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	116	17,71	
				Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Orang	655		
13	Pangan	40	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb.	Ada atau tidak	ada	ada	dalam Perwal nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman penggunaan alokasi dana gampong yang bersumber dari APBN pasal 10
		41	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)	kg	69	0,04	
				Jumlah penduduk	per 1000	192.241		
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	2.433	65,42	
				Jumlah pekerja perempuan	Orang	3.719		
		43	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf	Orang	69.281	97,07	
				Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun	Orang	71.373		
		44	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	31.369	53,62	
				Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	58.501		

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45	Prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif	Orang	26.749	85,46	
				Jumlah pasangan usia subur	Orang	31.300		
		46	Rasio Petugas Lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa	66	2,27	
				PLKB/PKB	Orang	150		
16	Perhubungan	47	Angkutan darat	Jumlah angkutan darat	Unit	1200	0,92	
				Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	131.105		
17	Komunikasi & Informatika	48	Web site milik pemerintah daerah	Ada/tidak	Ada atau tidak	ada	ada	www.Langsakota.go.id
		49	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/expo per tahun	Kali	1	1	
18	Pertanahan	50	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah	ha	10.018,9	58,20	
				Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	ha	17.215		
		51	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan		1	100,00	selesai di tingkat Pengadilan Negeri
				Jumlah kasus yang terdaftar		1		
		52	Penyelesaian ijin lokasi	Jumlah izin lokasi		0	tdi	
				Permohonan izin lokasi		0		
	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	53	PKK aktif	Jumlah PKK aktif		72	100	
				Jumlah PKK		72		
		54	Posyandu	Jumlah Posyandu aktif		118	100	
				Total Posyandu		118		

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Sosial	55	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah		4	4		
		56	Persentase Penyandang cacat baik fisik maupun mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun		83	10,84		
				Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun		766			
		57	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan			2071	18,19	
				Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan			11387		
	Kebudayaan	58	Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Budaya		1	1		
		59	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya		1			
		60	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			167	100	
				Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah			167		
24	Statistik	61	Buku "Kota dalam angka"	Ada atau tidak	Ada atau tidak	ada	ada		
		62	Buku "PDRB Kota"	Ada atau tidak	Ada atau tidak	ada	ada		
25	Kearsipan	63	Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	Unit	1	2,63		
				Jumlah SKPD	Unit	38			
		64	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan		1	1	

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Perpustakaan	65	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah		7.266	16,57	
				Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah		43.849		
		66	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun		22.403	13,76	
				Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani		162.800		
URUSAN PILIHAN								
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Ikan (ton)	ton	16.194	85,68	
				Target Daerah (ton)	ton	18.900		
		2	Konsumsi ikan	Jumlah konsumsi ikan (Ton)	kg	187,43	75,88	
				Target Daerah (Ton)	kg	247		
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lainnya (ton)	ton	5	0,17	
				Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	ha	2656		
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian		349.944.000.000,00	8,30	
				Jumlah total PDRB%	4.216.216.000.000,00		(kalau tidak ada PDRB tahun 2017 gunakan PDRB Tahun 2016)
4	Pariwisata	5	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	Wisatawan	746.586		
				6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata		104.421.000.000
		Jumlah total PDRB%			4.216.216.000.000		(kalau tidak ada PDRB tahun 2017 gunakan PDRB Tahun 2016)

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Industri	7	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2017	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri		409.167.000.000,01	9,70	(kalau tidak ada PDRB tahun 2017 gunakan PDRB Tahun 2016)
				Jumlah total PDRB%	4.216.216.000.000,00		
		8	Pertumbuhan industri	Jumlah Industri Tahun 2017 - Jumlah Industri Tahun 2016	industri	417	41,45	
				Jumlah Industri s/d Tahun 2017	industri	1006		
7	Perdagangan	9	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	PDRB	1.306.257.000.000	30,98	
				Jumlah total PDRB	PDRB	4.216.216.000.000,00		
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai Ekspor bersih = nilai ekspor - nilai impor		0		
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada atau tidak	ada	ada	Qanun nomor 2 tahun 2013
		2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada atau tidak	ada	ada	Qanun nomor 19 tahun 2015
		3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada atau tidak	ada	ada	Perwal nomor 27 tahun 2016
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan%	178	55,97	
				Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan		318		
		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda ybs.Buah	2	2	Simpeg dan Simda
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada atau tidak	ada	ada	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
		1	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	1	1	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	1	